



# Plagiarism Checker X Originality Report

**Similarity Found: 20%**

Date: Tuesday, May 19, 2020

Statistics: 5254 words Plagiarized / 26258 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

---

PENDIDIKAN PERDAMAIAN: Model Pembelajaran, Tantangan dan Solusinya Dr. Suadi Zainal Dr. Saifuddin Yunus Fadli, M.Si BAB I PENDAHULUAN Pendidikan Perdamaian at Glance Sekarang ini pendidikan perdamaian sudah menjadi gerakan global dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. Nasib dan masa depan suatu bangsa tergantung pada perdamaian dan keadilan yang dirasakannya. Tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Dalam hal ini perdamaian yang dimaksudkan bukan sebatas tiada perang, tetapi adanya keadilan dalam segala aspek yang membawa kesejahteraan hidup manusia - ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan spiritual.

Perdamaian dibentuk oleh pandangan kita tentang dunia - pandangan kita tentang realitas, sifat manusia, tujuan hidup dan hubungan manusia. Pendidikan perdamaian adalah proses pengembangan keterampilan yang holistik, beraneka ragam, dan meneguhkan kehidupan yang memberdayakan anak didik dengan kegiatan kreatif dan tidak merusak. Ini menekankan pengajaran perdamaian, non-kekerasan, resolusi konflik, keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, partisipasi praktis dan kepedulian lingkungan.

Pendidikan perdamaian adalah keadaan psikologis, sosial, politik, etis, dan spiritual dengan ekspresi dalam bidang kehidupan manusia intrapersonal, antarpribadi, antarkelompok, internasional, dan global. Oleh sebab itu, pendidikan tentang perdamaian melibatkan pengembangan dan praktik instruksi dan proses yang membentuk tatanan sosial yang damai. Anak didik perlu diajarkan pedagogik perdamaian yang mencakup pengakuan dan penolakan terhadap kekerasan, pemahaman tentang perbedaan melalui dialog, kesadaran kritis terhadap ketidakadilan, keadilan sosial dan pemahaman imajinatif tentang perdamaian (Nair dan Nath, 2009).

Senada itu, Harris dan Synott (2002) menjelaskan pendidikan perdamaian merupakan

serangkaian pertemuan pengajaran untuk membangkitkan keinginan orang (anak didik) untuk perdamaian dan memberikan kepada mereka cara-cara non kekerasan dalam mengelola konflik, serta keterampilan menganalisis secara kritis terhadap pengaturan struktural yang melegitimasi dan menghasilkan ketidakadilan serta ketidaksetaraan. Dalam praktik pengajaran, Sharma dan Jain (2012) menganjurkan bahwa guru harus meminimalkan atau menghilangkan lima karakteristik pengajaran yang tidak membantu perdamaian.

Sebagai gantinya, guru harus mengadvokasi lima hal lainnya untuk memperoleh kualitas perdamaian. Lima hal yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: No \_Pengajaran yang Tidak Membantu Perdamaian \_Pengajaran yang Membuat Perdamaian \_1\_Klaim guru untuk memiliki kebenaran \_Dialog penuh rasa hormat di antara guru dan peserta didik \_2\_Kelas yang kompetitif \_Suasana kelas kerjasama \_3\_Kepasifan siswa \_Pendekatan pembelajaran pemecahan masalah \_4\_Ketidakterampilan siswa \_Penegasan nilai (kelebihan) setiap pelajar \_5\_Penggunaan kekuatan otoritatif oleh guru \_Pengaturan batas demokratis harapan kelas \_ Menurut Abebe et. al. (2006) pendidikan perdamaian adalah konsep pemersatu dan komprehensif yang berupaya mempromosikan pandangan holistik tentang pendidikan dengan tidak melepaskan khususnya kontekstual.

Ia merupakan proses mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku dan nilai-nilai yang memungkinkan peserta didik untuk mengidentifikasi dan memahami sumber-sumber masalah lokal dan global serta memperoleh kepekaan positif dan tepat untuk masalah-masalah tersebut, mengatasi konflik dan untuk mencapai keadilan dengan cara tanpa kekerasan, dan untuk hidup dengan standar **universal hak asasi manusia dan** keadilan dengan menghargai keanekaragaman budaya, menghormati bumi dan saling menghormati satu sama lain. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui badan-badan di bawahnya seperti UNESCO dan UNICEF telah menjadikan pendidikan perdamaian sebagai bagian dari agenda kemanusiaan di wilayah bekas konflik untuk menciptakan perilaku masyarakat di kawasan konflik lebih damai. Dalam hal ini pendidikan perdamaian diyakini mampu mengurangi bahkan menghilangkan tindakan kekerasan dan menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati.

Ini karena melalui pendidikan perdamaian budaya kekerasan akan digantikan dengan budaya perdamaian. UNESCO menyatakan bahwa Pendidikan Perdamaian lebih efektif dan bermakna ketika diadopsi sesuai dengan konteks sosial dan budaya serta kebutuhan suatu negara. Ini harus diperkaya dengan nilai-nilai budaya dan spiritualnya bersama dengan nilai-nilai kemanusiaan universal (Akinyoade, 2011).

Dengan demikian, pendidikan perdamaian efektif untuk memberikan kepada orang atau anak didik mengenai nilai-nilai dan pengetahuan, dan mengembangkan sikap,

keterampilan, dan perilaku mereka untuk hidup dalam harmoni dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan lingkungan alam. Castro dan Galace (2010) menyakini pendidikan perdamaian dapat menghilangkan segala bentuk kekerasan, fisik, struktur dan kekerasan budaya, karena melalui pendidikan perdamaian budaya damai dapat terwujud dalam masyarakat. Untuk itu, para pendidik mesti memahami kekerasan dan perdamaian secara holistik yang saling berkaitan.

Sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut: Definisi Perdamaian dan Kekerasan / Pendidikan Perdamaian di Aceh Aceh yang dikenal sebagai daerah bekas konflik, banyak lembaga non pemerintah (NGOs), baik lembaga lokal, nasional maupun internasional telah berandil dalam mempromosikan pendidikan perdamaian, secara informal dan formal, seperti Peace Brigades International (PBI), Peace Generation, dan Acehese Civil Society Task Force (ACSTF). Bahkan UNICEF telah mengambil perannya dalam melaksanakan pendidikan perdamaian di Aceh sejak tahun 2001 sebelum kesepakatan damai antara GAM dan Pemerintah Indonesia ditandatangani.

Sejumlah 96 Sekolah Menengah Atas di wilayah Aceh telah didampingi untuk melaksanakan pendidikan perdamaian, termasuk Aceh Timur (Ashton, 2002). Namun paska damai formula pendidikan perdamaian yang kembangkan oleh Dinas Pendidikan Aceh belum jelas bentuk kurikulumnya walaupun Gubernur Aceh sering menyampaikan di media massa agar perdamaian Aceh dimasukkan dalam kurikulum di sekolah. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Aceh bahwa pendidikan perdamaian sudah pernah diwacanakan dan dibahas, tetapi hingga kini belum ada satu keputusan dan mekanisme pelaksanaannya yang jelas.

Sebagian guru berpendapat bahwa pendidikan agama dan aqidah akhlak sudah merangkumi pendidikan perdamaian di dalamnya, sehingga tidak perlu menambahkan kurikulum yang memberatkan beban siswa. Selain itu, pendidikan perdamaian dapat diajarkan melalui pelajaran muatan lokal, seperti pelajaran Sejarah Kebudayaan Aceh, tetapi hal ini tergantung pada pemahaman dan pertimbangan masing-masing kepala sekolah. Mereka memiliki otonomi untuk menentukan tema pelajaran muatan lokal. Oleh sebab itu, pendidikan perdamaian belum menjadi program utama Dinas Pendidikan.

Program utamanya adalah Pelaksanaan Kurikulum Nasional tahun 2013 dan peningkatan mutu pendidikan (Suadi, 2015). Pendidikan perdamaian tetap diwacanakan oleh Dinas Pendidikan Aceh, karena sudah menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Aceh. Mungkin nantinya akan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, seperti pendidikan lingkungan yang diintegrasikan ke dalam Ilmu Pengetahuan Alam, sehingga tidak menambah mata pelajaran bagi siswa (Suadi, 2015). Menurut

Wenger (2014) diantara materinya yang didambakan oleh para guru dan siswa adalah sejarah Aceh dan konflik Aceh yang baru diselaikan, karena selama ini pendidikan sejarah yang diajarkan lebih didominasi oleh sejarah nasional, karena kurikulum pendidikan di Aceh harus mengikut kepada kurikulum dan sistem pendidikan nasional Indonesia. Namun, salah satu upaya pelaksanaan pendidikan perdamaian di sekolah telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Perwisata Aceh.

Pada tahun 2012 dinas ini telah melakukan pelatihan pembinaan kapasitas guru, masyarakat dan remaja mengenai pendidikan dan budaya perdamaian di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Khususnya bagi guru sekolah telah dilaksanakan pelatihan penanaman nilai budaya, karakter dan budi pekerti bangsa. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan para guru dalam usaha menanamkan kepada anak didik nilai-nilai; keagamaan, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, berdaya saing, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai dan tanggungjawab. Diharapkan nilai-nilai ini dapat diintegrasikan oleh para guru dalam setiap mata pelajaran, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah (Dinas Kebudayaan dan Perwisata Aceh, 2012).

Sejalan dengan itu, untuk mewujudkan budaya damai di kalangan generasi muda Aceh, terdapat Kepala Daerah Kabupaten yang membuat satu aturan khusus berkaitan dengan pencegahan kekerasan. Misalnya Bupati Aceh Timur telah mengeluarkan satu Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Melalui Sekolah dan Posyandu. Namun demikian, upaya-upaya tersebut belum membawa hasil yang maksimal. Praktik kekerasan di sekolah masih menjadi fenomena, terutama kekerasan non fisik.

Mujibur Rahman, Ketua Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh dalam penelitiannya di Aceh Besar, Aceh Jaya dan Aceh Timur menyebutkan bahwa bentuk kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan non fisik, berupa dimarahi di depan teman-teman sebanyak 56 persen, disuruh berdiri di depan kelas sebanyak 52,4 persen, dan dicubit sebanyak 50,6 persen. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan guru terhadap bentuk kekerasan bagi anak. Para guru lebih memahami kekerasan hanya dalam bentuk fisik semata (Tribunnews, 2012). Walaupun demikian, pola interaksi sosial di sekolah semasa konflik dan paska konflik berbeda.

Pada masa konflik interaksi sosial diwarnai dengan kebencian, kecurigaan dan dendam, sementara pada masa paska konflik interaksi sosial dapat berlangsung tanpa rasa takut, curiga dan perasaan dendam berkurang (Saifuddin, 2013). Berdasarkan hal tersebut, pendidikan perdamaian adalah kurikulum penting yang mesti dilaksanakan di lembaga pendidikan formal di Aceh. Hal ini tidak hanya untuk mencegah timbul kembali gerakan

separatis di Aceh pada masa yang akan datang, tetapi juga untuk menumbuhkan budaya damai di kalangan generasi muda.

Dengan demikian, kondisi Aceh menjadi damai positif, dapat menjamin setiap individu mampu mengembangkan potensinya untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera secara utuh, bebas dari segala bentuk kekerasan, ketakutan dan kekurangan hidup. Pada akhirnya, perdamaian positif berkelanjutan terwujud di Aceh, sehingga stabilitas nasional dan ketertiban dunia menjadi keniscayaan kontribusi penting generasi Aceh. Urgensi Pendidikan Perdamaian untuk Perdamaian Berkelanjutan Pendidikan perdamaian telah mulai dilaksanakan sejak 1950-an, disajikan sebagai "Ilmu perdamaian," menentang "Ilmu perang" yang telah membawa begitu banyak kehancuran pada dekade sebelumnya (Harris dan Howlett, 2013). Tindakan individu berkembang menjadi gerakan akar rumput, dan studi perdamaian segera tumbuh di kalangan akademisi (Coombs, 2014).

Ini bermakna dewasa ini banyak kajian pendidikan perdamaian yang telah dilakukan oleh para akademisi dan aktivis perdamaian, diantaranya Steven Slade (2013) yang mengkaji peran lembaga non pemerintah dalam pendidikan perdamaian di Rwanda dan Afganistan, menyimpulkan bahwa pendidikan perdamaian memainkan peran penting dalam keseluruhan proses transformasi konflik dan pengetahuan teoritis dapat dan harus menjadi dasar dari kerja praktis. Selanjutnya ia menyatakan pendidikan perdamaian memiliki peran penting dalam mencegah siklus perang terulang kembali dan menetapkan tujuan perdamaian jangka panjang meskipun tidak dapat diukur dalam jangka waktu tertentu, yang bisa diatur, mudah dibentuk dan dicapai. Selanjutnya Geertje Agricola (2009) dalam kajiannya mengenai desain pendidikan resolusi konflik, menyebutkan bahwa pendidikan resolusi konflik dapat diterapkan melalui negosiasi, mediasi, kontroversi, dan pelatihan umum.

Kemampuan untuk membalikkan perspektif selama konflik dan ketrampilan pemecahan masalah harus menjadi elemen penting dari program resolusi konflik. Merancang pendidikan resolusi konflik yang efektif memerlukan pendekatan yang luas yang meliputi proses jangka panjang, berbagai bentuk resolusi konflik yang diterapkan secara bersamaan, serta kurikulum informal dan konteks yang tidak bertentangan dengan tujuan dari resolusi konflik.

Kemudia Esther Wawira (2013) yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pendidikan perdamaian di Tharaka Utara Kenya, menyatakan bahwa kepemimpinan sekolah, budaya, dan sumberdaya memberi pengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan program pendidikan perdamaian. Di Indonesia sendiri kajian mengenai pendidikan perdamaian juga sudah menarik perhatian para akademisi,

diantaranya kajian Taufik, dkk (2014) tentang Model Pendidikan Perdamaian Pada Sekolah Multi Etnis di Surakarta, menyatakan bahwa orientasi dominansi sosial **memiliki hubungan yang signifikan dengan** interaksi sosial dibandingkan dengan peran guru.

Orientasi dominansi sosial memberikan pengaruh negatif terhadap interaksi sosial siswa, artinya semakin tinggi skor orientasi dominansi sosial maka interaksi sosial individu akan semakin rendah, begitu pula sebaliknya semakin rendah orientasi dominansi **sosial maka akan semakin tinggi** interaksi sosial. Sedangkan Muslihah (2014) dalam kajiannya "Pesantren dan Pengembangan Pendidikan Perdamaian" **di Pesantren An-Nidzomiyah Labuan Pandeglang** Banten, menyebutkan bahwa tingkat pendidikan Islam perdamaian pada Pesantren tersebut berpengaruh positif terhadap deradikalisasi. Pendidikan Islam perdamaian yang diajarkan meliputi: humanisme, Islam rahmatan lil-alamin, fastabiqul khairat, toleransi, pluralisme, manajemen konflik dan budaya damai.

Selanjutnya Sukendar (2011) yang juga mengkaji pendidikan damai di pesantren, yaitu pada Pondok Pesantren Latansa Cangkring Karanganyar Demak. Ia menyatakan bahwa Pesantren Latansa memiliki kegiatan pembelajaran yang meliputi beberapa unsur pendidikan damai, yaitu; pengelolaan keragaman, keadilan gender, pengelolaan emosi (kesabaran), dan yang lainnya. Sistem pendidikan yang dilakukan pondok tersebut juga bisa dikategorikan sebagai pendidikan karakter damai, karena telah mampu membuat para santri, khususnya yang berasal dari Papua dan Maluku bisa terbebas dari trauma, tidak membawa dendam dalam hidup, dan mampu menjadi manusia yang mencintai perdamaian. Khususnya yang berkaitan dengan pendidikan perdamaian di Aceh, diantaranya; **penelitian yang dilakukan oleh** Saifuddin (2005) tentang interaksi sosial di lembaga pendidikan pada era perang.

Ia menyatakan bahwa perang telah berdampak buruk terhadap pendidikan, di mana perasaan traumatis dan ketakutan sejumlah para pendidik sangat tinggi dalam menjalankan aktivitas pengajaran. Mereka mengalami ancaman dari **kedua belah pihak yang** berkonflik, GAM dan TNI-Polri, sehingga menyebabkan para guru tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain itu, letusan senjata yang sering terjadi menyebabkan penduduk desa tidak berani keluar rumah untuk mencari nafkah, sehingga **perekonomian keluarga terganggu**. Akibatnya konsentrasi anak-anaknya yang **masih duduk di bangku sekolah** juga terganggu.

Keadaan ini telah mempengaruhi sikap para pelajar terhadap pemerintah, yang dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah Aceh secara bermartabat, dan memilih peperangan sebagai alternatif penyelesaiannya. Selanjutnya Saifuddin (2013) menyatakan bahwa perang yang terjadi di Aceh selama 30 tahun telah mengganggu kestabilan institusi-institusi sosial, termasuk institusi pendidikan. Akibatnya integrasi

sosial tertekan, sehingga mengakibatkan terganggunya interaksi di kalangan orang tua siswa, guru-guru dan para pelajar. Interaksi sosial dalam institusi pendidikan dipengaruhi oleh situasi anomik, altruistik dan fatalistik.

Kebencian, kecurigaan, dendam dan sebagainya. Namun perdamaian antara Pemerintah Indonesia dan **Gerakan Aceh Merdeka (GAM)** telah memberikan sumbangan positif dan menjadi faktor utama dalam mengubah pola interaksi dalam institusi pendidikan di Aceh. Orang tua siswa, guru-guru dan para pelajar mulai berinteraksi tanpa perasaan takut-takut dan kecurigaan. Perasaan dendam semakin berkurang di kalangan mereka. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap GAM mulai menurun, terutama setelah melihat prestasi kerja mantan anggota GAM di pemerintahan Aceh kurang memuaskan selama mereka berkuasa, sejak tahun 2006.

Selanjutnya Suadi (2015) yang mengkaji tentang Peran Pemerintah dalam Transformasi Konflik dan Pembentukan Perdamaian Positif Berkelanjutan di Aceh, menyebutkan bahwa Dinas Pendidikan Aceh belum membuat kebijakan untuk melaksanakan pendidikan perdamaian dalam pelajaran khusus. Namun pendidikan perdamaian telah dilakukan oleh lembaga masyarakat sipil di sejumlah sekolah secara non formal dan bersifat sementara. Selain itu, Dinas Kebudayaan Aceh telah memberikan pelatihan bagi guru-guru sekolah tentang pendidikan karakter, yang dipandang dapat menumbuhkan budaya perdamaian di sekolah.

Walaupun demikian, UNICEF (2002) dalam melakukan evaluasi terhadap pendidikan perdamaian yang mereka laksanakan sejak 2001 di Aceh, melaporkan bahwa para guru siap untuk menerapkan kurikulum Pendidikan Damai setelah mereka kembali dari pelatihan. Pendidikan ini dapat mengakibatkan perubahan nyata dalam perilaku, sikap dan keterampilan siswa. Bagi mereka mengajar pendidikan damai merupakan pengalaman yang mengubah hidup mereka, dan juga siswa mereka. Kepala sekolah mereka pun sangat mendukung program ini. Oleh sebab itu, mereka ingin melihat program pendidikan perdamaian diperluas untuk level lebih tinggi dan lebih dari satu semester.

Hal yang sama juga dikatakan oleh para siswa, mereka sangat antusias tentang Program Pendidikan Perdamaian, yang menyediakan bagi mereka banyak hal yang dapat mengubah hidup mereka, yaitu seperti; pengetahuan mengenai isu-isu perdamaian, peningkatan pemahaman tentang Islam dan budaya Aceh serta konflik dan perdamaian Aceh, peningkatan penghormatan terhadap guru, keluarga, dan satu sama lain, peningkatan kepercayaan diri dan kemampuan untuk berbicara di depan umum, lebih mampu bekerja dalam kelompok kolaboratif, peningkatan kemampuan untuk introspeksi dan mengakui tanggung jawab sendiri, perkembangan moral, peningkatan



keterampilan pemecahan masalah, peningkatan kemampuan untuk mengendalikan amarah, pengurangan prasangka, dan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan dan komunitas mereka. Dengan demikian mereka berharap kursus harus diajarkan untuk lebih dari satu semester dan di semua peringkat. Selain itu, mereka juga berharap pejabat pemerintah dan tentara hendaknya mengambil kursus pendidikan perdamaian.

Penjelasan ini telah diperkuat lagi oleh Wenger (2014) seperti yang telah diuraikan pada bagian latar belakang proposal ini, di mana guru dan siswa sangat mendambakan adanya pendidikan perdamaian di sekolah yang di dalamnya juga merangkumi sejarah Aceh, konflik dan perdamaian yang berlangsung di Aceh. Berdasarkan uraian di atas, pendidikan perdamaian terutama di wilayah bekas konflik masih sangat urgen untuk dilaksanakan, karena selama pendidikan perdamaian belum lembaga pendidikan formal belum menjadi kurikulum penting yang diformatkan dalam pelajaran tersendiri. Menurut Purjatian Azhar (2016) di Indonesia, peace education belum diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan, baik tingkat SD, SMP maupun SMA, sementara di bangku kuliah sendiri tidak semua kampus mengajarkan pendidikan perdamaian.

Padahal pendidikan dinilai memiliki peranan yang sangat vital dalam pembentukan karakter bangsa, apakah berbudaya kekerasan ataupun berbudaya damai. BAB II PERDAMAIAN DAN RAGAMNYA Definisi Perdamaian Perdamaian memiliki ragam makna dan bentuk, ia dapat dimaknai sebagai satu keadaan, nilai, cara dan tujuan. Untuk memahaminya, perlu mengetahui lebih banyak tentang konflik (Brewer, 2010), karena damai adalah antithesis dari konflik. Apabila konflik hanya dimaknai sebatas perang, maka damai pun dimaknai pada keadaan hilangnya perang.

Oleh sebab itu, menurut Outhwaite (2008) secara mudah, perdamaian ialah antitesis dari peperangan, sehingga tidak mengherankan jika berakhirnya satu perang (konflik kekerasan) dengan satu perjanjian perdamaian, oleh sebagian orang menggapkan itulah perdamaian. Namun definisi ini sekarang tidak relevan lagi untuk mewujudkan satu keadaan damai yang hakiki, karena kini damai dilihat pada tidak adanya kekerasan, baik kekerasan fisik, sosial budaya maupun kekerasan struktur. Untuk itu, Galtung (1967) telah mengategorikan damai kepada dua, yaitu damai negatif dan damai positif (dijelaskan pada bagian berikutnya).

Menurut Hicks (1985) bahwa perdamaian bukan semata-mata tidak adanya kekerasan terang-terangan (overt violence), tetapi juga mencakupi wujud keadilan sosial, ekonomi, dan politik (Fountain, 1999). Oleh karena itu, perdamaian mengandung arti lebih luas dari sekedar perang dan permusuhan (Miller, 2005). Perdamaian ialah suatu proses, memiliki banyak bentuk, perjuangan yang tidak pernah selesai untuk mentransformasi kekerasan (Fisher, et.al., 2001). perdamaian selalu berada dalam nilai-nilai kemanusiaan



yang tertinggi (Rummel, 1981). Adolf membagi perdamaian berdasarkan subjeknya dalam tiga jenis, yaitu; perdamaian perseorangan, perdamaian dalam kelompok, dan perdamaian antara kelompok-kelompok.

Munculnya negara dan bangsa, telah merubah perbincangan perdamaian individu kepada perdamaian sosial dan kolektif. Dalam hal ini, negara merupakan kendaraan (sarana) utama bagi mewujudkan perdamaian, dan pembentukan perdamaian tidak akan pernah berakhir, karena perdamaian bukan tujuan yang hendak dicapai, tetapi cara hidup (Mitroiu, 2009). Oleh karena itu, perdamaian adalah keadaan yang dinamis, melalui perdamaian manusia dapat hidup harmonis dan bekerja sama untuk membangun kebaikan kemanusiaan yang lebih luas (Kumar, 2012).

Galtung (1967) membagi perdamaian berdasarkan substansinya, dengan merujuk kepada jenis kekerasan yang berlaku (kekerasan budaya, struktur dan kekerasan langsung), yaitu; perdamaian negatif dan perdamaian positif. Beliau mendefinisikan perdamaian negatif sebagai keadaan yang tidak ada kekerasan kolektif yang terorganisir (absence of organized collective violence). Sedangkan perdamaian positif ialah keadaan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang secara relatif telah disepakati oleh masyarakat dunia, seperti adanya kerjasama, bebas daripada ketakutan, bebas daripada kekurangan, ekonomi tumbuh dan berkembang, tidak adanya eksploitasi, adanya persamaan, keadilan, bebas bertindak, pluralisme dan dinamisme.

Kemudian istilah perdamaian positif, oleh ahli sains konflik dan perdamaian dikembangkan lagi menjadi perdamaian berkelanjutan dengan menambahkan satu fokusnya, yaitu aspek ekologi. Oleh sebab itu, membahas perdamaian tidak terbatas pada pencapaian kesepakatan damai, tetapi melampauinya, sehingga berdampak terhadap pengembangan kategorisasi perdamaian dengan berbagai terma, misalnya perdamaian negatif, perdamaian positif, dan perdamaian berkelanjutan. Ketiga terma ini dapat disatukan untuk menjelaskan perdamaian yang paling ideal, yaitu "perdamaian positif berkelanjutan" (sustainable positive peace).

Ragam Perdamaian Perdamaian Negatif Pada umumnya perdamaian negatif dipahami sebagai keadaan tidak adanya konflik bersenjata (perang), seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun demikian, menurut Castro & Galace (2010) bahwa perdamaian negatif adalah keadaan tiadanya perang, kekerasan fisik atau kekerasan langsung, samada makro maupun mikro. Lebih lanjut, Lewer (1999) menjelaskan bahwa perdamaian negatif adalah tiada kekerasan dan penerimaan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, ketidakadilan dan kekurangan akses kepada sumber-sumber oleh masyarakat.

Lazimnya keadaan seperti ini adalah damai sebagai keadaan yang tertib. Senada dengan itu, Omar (2007) menyatakan bahwa perdamaian negatif hanya terpeliharanya undang-undang dan ketertiban, wujud stabilitas, keselamatan sosial dan tertib politik yang relatif. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kesepakatan damai hanya membawa kawasan perang kepada keadaan damai negatif dan belum adanya hubungan konstruktif dalam masyarakat walaupun stabilitas negara telah diwujudkan. Dalam keadaan seperti ini, kebutuhan dan keselamatan masyarakat belum dapat dipenuhi secara sepatutnya, sebagaimana idealnya yang diinginkan dalam ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM).

Perdamaian Positif Perdamaian positif adalah satu keadaan yang melampaui fase kesepakatan damai dan berakhirnya perang, ditandai dengan wujud keharmonisan sosial, penghormatan terbatasp supremasi hukum dan hak asasi manusia, dan adanya pembangunan sosial dan ekonomi. Perkara ini didukung oleh lembaga-lembaga politik yang mampu mengurus perubahan dan menyelesaikan sengketa tanpa menggunakan konflik kekerasan (Ukaid, 2010). Sedangkan Askandar (2006) menyatakan bahwa perdamaian positif adalah wujud kondisi aman dan damai di mana hak individu dan kelompok dihormati, adanya saluran-saluran yang sesuai untuk menyampaikan pendapat dan pandangan.

Kemudian keadilan dipertahankan dan diperjuangkan, serta adanya mekanisme, peraturan, prosedur, dan strategi untuk menguruskan dan menyelesaikan isu-isu konflik. Selanjutnya, Castro & Galace, (2010) menyatakan bahwa perdamaian positif adalah wujudnya perhubungan yang adil dan tidak eksploitatif, sama ada antara manusia dan ekologi. Ini bererti tiadanya kekerasan langsung, kekerasan struktur, kekerasan budaya dan kekerasan ekologi. Dengan lain kata ialah wujud keadaan sejahtera dan hubungan yang adil, tidak eksploitatif; hubungan sosial, ekonomi, politik dan ekologi.

Oleh itu, akar permasalahan yang menimbulkan konflik boleh dikurangkan, dan kebaikan serta kesejahteraan dapat direalisasikan bagi semua masyarakat (Francis, 2009). Untuk itu, perdamaian positif merupakan usaha menghilangkan kekerasan terbuka dengan perhatian utamanya adalah masalah ketidakadilan dan penindasan, dan keperluan kepada ketertiban sosial yang lebih adil untuk memenuhi keperluan-keperluan dan hak-hak asasi semua masyarakat.

Ia boleh dinilai melalui delapan pilar, yaitu; fungsi pemerintah yang baik, lingkungan bisnis yang sehat, distribusi sumber daya yang adil, penerimaan hak orang lain, relasi yang baik dengan tetangga, aliran informasi yang bebas, jenjang pendidikan tinggi dan tingkat korupsi rendah (Coleman, 2012). Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa aktivitas utama membangun perdamaian positif ialah menangani

kekerasan struktur dan budaya. Oleh sebab itu, perdamaian positif merupakan transformasi struktur yang berhubungan dengan sistem sosio-politik dan ekonomi yang dapat memupuk keadilan dan menjamin perdamaian berkelanjutan dengan sendirinya (Peacebuilding Initiative, 2008).

Dengan demikian, kekerasan struktur yang merupakan hasil daripada struktur sosial, dan politik yang represif serta ekonomi yang eksploitatif mesti dihilangkan (Galtung, 1996). Selanjutnya Fischer (2007) menjelaskan perdamaian positif secara terperinci lagi yaitu dengan membedakan perdamaian negatif dan perdamaian positif menerusi delapan komponen dari perdamaian dengan empat aspeknya; survival, development, PRedom and peace culture. Perincian tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut: Tabel 1: Perbedaan Perdamaian Negatif dan Perdamaian Positif

- \_Negative peace
- \_Positive peace
- \_Survival: absence of direct violence caused by military power.

- \_Absence of direct violence: ceasefires, disarmament, prevention of terrorism and state terrorism, nonviolence.
- \_Life-enhancing cooperation and prevention of direct violence: peace-building, conflict transformation, reconciliation and Reconstruction.

- \_Development: Absence of structural violence caused by economic power.

- \_Humanitarian aid, food aid, alleviation of poverty and misery.
- \_Building a life-sustaining economy at the local, national and global level in which everyone's basic needs are met.

- \_PRedom: Absence of structural violence caused by political power.
- \_Liberation from oppression, occupation, dictatorship.
- \_Good governance and participation, self-determination, human rights.

- \_Peace culture (identity): Absence of cultural violence caused by cultural power.

- \_Overcoming prejudice based on nationality, race, language, gender, age, class, religion, etc.; elimination of the glorification of war and violence in the media, literature, films, monuments, etc.
- \_Promotion of a culture of peace and mutual learning; global communication and dialogues; development of peaceful deep cultures and deep structures; peace education; peace journalism.

- \_Perdamaian Berkelanjutan Keberlanjutan (sustainability) adalah satu konsep yang inklusif; adanya tempat yang damai dan keamanan bagi semua manusia, damai habitat, damai pekerjaan, aman akses kepada makanan, minuman, penjagaan kesehatan, hak yang aman kepada sumber daya yang esensial bagi kehidupan yang baik dan penuh manfaat. Oleh sebab itu, orang menjadi manusia yang pantas, karena saling percaya bahwa keadilan boleh dipelihara dan dijamin bagi semua orang (Pronk, 2007) sama ada bagi generasi sekarang maupun generas masa depan.

Sejalan dengan itu, Lederach (1999) menyatakan bahwa sustainability dari

pembangunan perdamaian bukan saja peduli pada memulai gerakan, tetapi juga membentuk proses yang proaktif yang dapat mewujudkan spiral perdamaian dan pembangunan untuk mencegah konflik dan mempromosikan visi masa depan yang harmonis dan lagi damai. Untuk itu, usaha-usaha jangka pendek harus dilakukan dengan cara-cara yang dapat berimplikasi kepada usaha-usaha jangka panjang bagi pembentukan hubungan damai, yang merangkumi taraf hubungan kejiwaan, spiritual, sosial, ekonomi, politik, dan militari (Lederach, 1999).

Selanjutnya, menurut Pearce (1997) perdamaian berkelanjutan adalah memupuk dan mengukuhkan keupayaan lokal untuk berurusan dengan masa lalu bagi melibatkan diri mereka dengan masa kini, dan membentuk masa depan dengan cara yang tidak mengecualikan, menindas, atau membahagi. Manakala menurut Reyhler & Paffenolz (2001) perdamaian berkelanjutan dicirikan oleh keadaan tidak adanya kekerasan fisik, tidak adanya diskriminasi politik, ekonomi, dan budaya, tingginya legitimasi internal dan eksternal, mampu memelihara diri sendiri, dan cenderung mempertingkatkan transformasi konflik konstruktif.

Berdasarkan uraian di atas, perdamaian berkelanjutan pada esensinya adalah serupa ataupun sama dengan perdamaian positif, seperti dikatakan oleh Bond (2011) perdamaian yang berkelanjutan adalah di mana nilai-nilai perdamaian positif dipaparkan, memerlukan mencari solusi konflik yang terdapat dalam perdamaian negatif dengan tidak menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun – baik struktur, budaya, ekonomi, hukum maupun fisik - bagi menyelesaikan konflik. Lebih daripada itu, sebagian para ahli lainnya, menambahkan aspek ekologi ke atasnya.

Oleh itu, perdamaian berkelanjutan identik dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yang menekankan pada pengelolaan sumber daya alam yang menjamin kesediaannya bagi generasi ke depan. Franke dan Warnecke (2010) menjelaskan bahwa: "Conflict transformation and sustainable development both pursue the ideal end-state of a legitimately governed and economically viable peaceful society based on the rule of law". Kebalikan daripada, "...Scarcities of resources and environmental degradation combine with rapidly expanding populations to lead to the breakdown of local communities and to the ethnic and tribal violence that has become the main characteristic of the post-cold war era" (Daimond, 1997).

Definisi Kekerasan dan Ragamnya Kekerasan merupakan fenomena atau gejala sosial yang belum hilang dalam dunia pendidikan Indonesia walaupun Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan satu undang-undang khusus mengenai kekerasan dan perlindungan anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, direvisi – Nomor 35 tahun 2014). Dalam pasal 54 substansinya

adalah anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya, yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, teman-temannya dan atau pihak lainnya. Terjadinya kekerasan di lembaga pendidikan mencerminkan kurang paham guru tentang kekerasan dan kurang efektif pendidikan karakter. Guru cenderung meletakkan siswa sebagai obyek transfer ilmu, bukan sebagai subyek yang aktif dalam pembelajaran.

Mereka tidak dipandang sebagai pribadi-pribadi yang memiliki kekhasan yang patut dihargai dan dikembangkan sesuai potensi yang dimilikinya, sehingga perbedaan-perbedaan belum bisa dilihat sebagai rahmat, tetapi dipandang sebagai ancaman terhadap keharmonisan dan prestasi akademik. Dalam menjelaskan definisi kekerasan dan ragamnya dalam buku ini, penulis merujuk pada satu artikel Makarim (2014) "Memaknai Kekerasan" dipublikasi oleh ELSAM. Menurut penulis artikel ini ringkas, jelas, dan komprehensif. Makarim telah mengulasnya dari pada makna kata hingga teori dan praktiknya sebagai contoh bentuk-bentuk kekerasan. Oleh sebab itu, penjelasan kekerasan dalam bab ini hanya merujuk kepada artikelnya, yaitu sebagaimana berikut.

Intepretasi Makna Kekerasan Secara Bahasa Dalam bahasa Inggris, Cambridge Advanced Learner's Dictionary kata kekerasan diartikan sebagai berikut: Violence (noun), yang berarti, "1. actions or words which are intended to hurt people; 2. Extreme force;" Violation (adj), yang berarti, "1. using force to hurt or attack; 2. describes a situation or event in which people are hurt or killed; 3). Sudden and powerful;" dan Violation (noun) yang diartikan "an actions that breaks or acts against something, especially law, agreement, principle, or something that should be treated with respect.

Makna 'kekerasan' tersebut di atas ditekankan pada 'tindakan' (action), keputusan/kebijakan/aturan (act) dan 'ucapan' (word) disertai pengerahan 'kekuasaan' (force) yang dimaksudkan untuk menyakiti/membunuh, atau melawan/menentang hukum, perjanjian, prinsip atau sesuatu yang harus diperlakukan dengan hormat. Selanjutnya Merriam-webster Dictionary mendefenisikan 'kekerasan' (violence, noun) sebagai berikut: a: exertion of physical force so as to injure or abuse (as in warfare effecting illegal entry into a house) b: an instance of violent treatment or procedure; injury by or as if by distortion, infringement, or profanation :outrage a: intense, turbulent, or furious and often destructive action or force<the violence of the storm>b: vehement feeling or expression :fervor;also: an instance of such action or feeling c: a clashing or jarring quality:discordance undue alteration (as of wording or sense in editing a text) Defenisi tersebut menjelaskan penggunaan kata 'kekerasan' pada peristiwa seperti 'penggunaan kekuatan fisik untuk melukai (injure) atau menyakiti (abuse)', 'contoh perlakuan atau prosedur yang kejam (violence treatment or

procedure)', 'kekejaman (outrage) yang melukai' lantaran adanya penyimpangan/pemutar-balikan (distortion), pelanggaran (infringement) atau penajisan (profanation)', 'pengerahan kekuatan (force) yang sangat hebat (intense), bergolak (turbulent), penuh kemarahan (furious), dan seringkali merusak (destructive)', 'ungkapan atau perasaan yang sangat bergairah (fervor)', 'pertentangan (discordance)', dan 'perubahan yang tidak pantas (undue alteration).

Secara lebih ringkas Oxford Dictionaries mengartikan kekerasan (violence, noun) sebagai berikut: Behaviour involving physical force intended to hurt, damage, or kill someone or something; Sebagai istilah Hukum, kekerasan adalah the unlawful exercise of physical force or intimidation by the exhibition of such force; dan Strength of emotion or of a destructive natural force. Defenisi tersebut menggarisbawahi 'kekerasan' sebagai perilaku (behaviour) yang melibatkan kekuatan fisik (physical force) dengan tujuan 'melukai, merusak atau membunuh seseorang atau sesuatu' serta menekankannya sebagai "'pemunculan kekuatan di atas dalam rupa tindakan yang tidak sah (unlawful exercise), penggunaan kekuatan fisik (physical force) serta intimidasi (intimidation)'.

Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata 'kekerasan (kata benda) diartikan sebagai, "(1) perihal (yg bersifat, berciri) keras; (2) perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; (3) paksaan. Dalam konteks perlakuan dan tindakan, bahasa Indonesia memaknai kekerasan sebagai 'perbuatan' yang menyebabkan 'cedera' atau 'matinya 'orang lain', atau kerusakan 'fisik' dan 'barang', serta menyebut kata 'paksaan' sebagai padanannya.

Menurut Makarim, pemaknaan dalam bahasa Indonesia belumlah defenitif secara etimologis bila dibandingkan dengan bahasa Inggris, lantaran tidak kuatnya akar sejarah dalam kata 'kekerasan'. Sementara kata 'violence' dalam Merriam-webster Dictionary telah digunakan pada abad 14 M, memiliki konteks sejarah yang lebih kuat. Kata 'violence' [/va? (?l)?ns/] berasal dari bahasa Latin, violentus/violentia, yang berasal dari kata vi atau vis yang berarti kekuasaan atau berkuasa.

Violence dimaknai sebagai ekspresi fisik maupun verbal yang mencerminkan tindakan agresi dan penyerangan terhadap kebebasan atau martabat seseorang, oleh perorangan atau kelompok, yang didasarkan pada 'kewenangan'. Artinya, violence (kekerasan) adalah penggunaan kewenangan tanpa keabsahan atau tindakan sewenang-wenang. Interpretasi Teoritis Perspektif World Health Organization (WHO) Kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara sengaja, yang mengancam atau mengenai diri sendiri, orang lain, atau kelompok atau komunitas, yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera, kematian, gangguan psikologis,

gangguan perkembangan atau kerugian.

Dimasukkannya kata 'kekuasaan' (power) yang ditambahkan pada frasa 'penggunaan kekuatan fisik' (use of physical force) meluaskan sifat perbuatan kekerasan dan memperluas pengertian yang selama ini konvensional, sehingga dapat memasukkan perbuatan kekerasan sebagai efek dari relasi kekuasaan, termasuk pengancaman dan intimidasi. Penggunaan 'kekuasaan' juga dimaksudkan untuk memasukkan pelalaian/pengabaian atau pembiaran (neglect or acts of omission), sebagai tambahan atas kekerasan yang paling dominan berupa tindakan sengaja (acts of commission).

Pada tahun 1996 Dewan Kesehatan Dunia (World Health Assembly) mendeklarasikan resolusi WHA 4925 yang menyatakan kekerasan sebagai masalah kesehatan publik yang utama dan meminta WHO merumuskan tipologi kekerasan. WHO membagi kekerasan dalam tiga kategori besar berdasarkan karakteristik pelaku kekerasan, yaitu: 1). Kekerasan terhadap diri sendiri (self-directed violence); 2). Kekerasan antar-perseorangan (interpersonal violence); dan 3). Kekerasan kolektif (collective violence).

Kekerasan terhadap diri sendiri (self-directed violence) dibagi menjadi tindakan bunuh diri dan penganiayaan diri sendiri, yang di dalamnya termasuk pikiran tentang bunuh diri, percobaan bunuh diri (parasuicide) atau pelukaan diri dengan sengaja, dan tindakan bunuh diri; serta penganiayaan diri, termasuk mutilasi anggota tubuh sendiri. Sementara kekerasan antar-perseorangan (interpersonal violence) dibagi menjadi dua sub-kategori: yaitu 1). Kekerasan keluarga dan kekerasan pasangan intim yang biasanya terjadi di dalam rumah tangga atau tempat tinggal; dan 2).

Kekerasan komunitas, yang terjadi antar individu yang tidak berhubungan (keluarga atau intim), juga mungkin tidak saling mengenal dan umumnya terjadi di luar rumah. Sedangkan kekerasan kolektif (collective violence) dibagi menjadi kekerasan sosial, politik dan ekonomi. Berbeda dengan dua kategori di atas, kategori ini ditekankan pada kekerasan oleh kelompok besar atau Negara. Kekerasan kolektif dapat terjadi dengan tujuan agenda sosial tertentu, misalnya penyebaran kebencian oleh kelompok terorganisir, aksi terorisme, dan kekerasan massa.

Contoh kekerasan politik misalnya adalah perang, konflik bersenjata, kekerasan Negara atau sejenisnya yang dilakukan kelompok besar. Kekerasan ekonomi dilakukan dengan tujuan mengacaukan aktivitas ekonomi, menghalangi akses pada kebutuhan esensial atau menciptakan fragmentasi ekonomi. Teori Kekerasan Johan Galtung Johan Galtung adalah professor dalam kajian konflik dan perdamaian yang mendirikan International Peace Research Institute of Oslo (PRIO) di awal tahun 1960an.



Gagasan Galtung tentang kekerasan dimulai dengan kajian terhadap pemikiran Mahatma Gandhi sebagaimana tertuang dalam bukunya *Gandhis Politiske Etikk* (1988). Buku ini menjelaskan tiga jenis perjuangan non-kekerasan Gandhi: 1). Non-violence of strong: yaitu perlawanan tanpa kekerasan yang dilakukan dengan keyakinan dan kekuatan diri; 2). Non-violence of the weak: perlawanan yang dilakukan karena tidak ada senjata dan sumber daya untuk bertempur; dan 3). Non-violence of the coward: berupa penyerahan diri karena lemah dan takut. Bagi Gandhi, peperangan bukan sekedar melawan sesuatu, tetapi juga memperjuangkan sesuatu.

Satu pandangan Gandhi yang sangat mempengaruhi Galtung adalah perihal struktur dimana Gandhi menyatakan bahwa kekerasan dapat dihapuskan jika kita mengetahui penyebabnya; yang umumnya bukan orang-orang jahat tapi struktur yang salah. Inilah yang mendasari teori kekerasan struktural Galtung yang kemudian melahirkan teori agresi, imperealisme, komunikasi internasional, pola-pola diplomasi, bahkan teori perdamaian positif. Semuanya dalam perspektif struktural. Awalnya Galtung memberikan definisi amat luas terhadap apa yang dimaksud dengan kekerasan, yaitu: (sesuatu) terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya [violence is present when human beings are being influenced so that their actual somatic and mental realizations are below their potential realizations].

Definisi tersebut menekankan pengertian kekerasan sebagai akibat dari perbedaan antara yang potensial dan yang aktual, apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi. Kekerasan terjadi ketika meningkatnya jarak antara yang potensial dengan aktual. Sebagai contoh, jika seseorang meninggal karena TBC pada abad ke 18, sulit untuk menyatakannya sebagai kekerasan karena adanya keterbatasan pengobatan. Namun jika seseorang meninggal untuk kasus yang sama hari ini [dimana sumberdaya medis lengkap dan dapat diakses, sehingga kematian sebagai akibat langsung penyakit ini dapat dihindari] maka kekerasan telah terjadi.

Jika seseorang meninggal karena gempa bumi saat ini, maka itu bukanlah kekerasan. Namun bila suatu saat gempa bumi dapat diprediksi dan diatasi, maka korban peristiwa demikian adalah korban kekerasan. Intinya, kekerasan terjadi ketika yang potensial (kematian akibat tidak ada pengobatan disaat tersedianya fasilitas, kematian akibat gempa bumi padahal pemerintah mampu membangun system peringatan dini) lebih tinggi dari yang aktual (kesembuhan dari penyakit TBC, keselamatan dari ancaman gempa bumi), maka terjadilah kekerasan –ketika seharusnya sesuatu dapat dielakkan (avoidable) namun tidak dilakukan. Galtung menyatakan bahwa level potensial untuk merealisasikan adalah pengetahuan dan sumber daya.

Apabila pengetahuan dan/atau sumber daya dimonopoli oleh kelompok atau kelas atau digunakan untuk tujuan lainnya, maka tingkat yang aktual akan turun di bawah yang potensial, dan kekerasan hadir dalam sebuah sistem. Sebagai tambahan atas konsep kekerasan yang tidak langsung ini, Galtung juga menjelaskan bentuk kekerasan langsung, yaitu ketika tujuan untuk melakukan realisasi (seperti integritas fisik/psikologis seperti paramedis, infrastruktur fisik seperti rumah sakit, sekolah) tidak dilakukan namun dirusak.

Ketika terjadi peperangan, terjadi kekerasan langsung dimana pembunuhan atau pencideraan seseorang dipastikan menempatkan realisasi somatis aktual (actual somatic realization) di bawah realisasi somatis potensial (potential somatic realization). Namun dimungkinkan pula terjadi kekerasan tidak langsung, ketika pengetahuan dan sumber daya disalurkan jauh dari upaya konstruktif untuk mendekati yang aktual kepada yang potensial. Selanjutnya, Galtung membagi kekerasan dalam tiga kategori, yaitu Kekerasan Langsung (antara Pelaku-Korban), Kekerasan Struktural (yang bersumber dari struktur sosial [antar orang, masyarakat, kumpulan masyarakat (aliansi, daerah)]), dan [dibalik keduanya] Kekerasan Kultural (simbolis dalam agama, ideologi, bahasa, seni, pengetahuan, hukum, media, pendidikan; gunanya melegitimasi Kekerasan Langsung dan Kekerasan Struktural). Kekerasan Kultural dan Kekerasan Struktural menyebabkan Kekerasan Langsung.

Kekerasan Langsung juga menguatkan/memperburuk Kekerasan Struktural dan Kekerasan Kultural. Kekerasan Langsung berupa fisik atau verbal tampil sebagai perilaku yang tidak berubah, karena akarnya adalah struktur dan budaya. Dalam mengatasi kekerasan-kekerasan tersebut, Galtung menekankan kebutuhan akan konsep yang lebih luas daripada kekerasan [dan perdamaian], yaitu "Kekuasaan"; yang masuk dalam ranah kebudayaan, ekonomi, militer dan politik. Kekuasaan kebudayaan menggerakkan manusia untuk memilah apa yang benar dan apa yang salah; kekuasaan ekonomi mengenakan metode quid pro quo; kekuasaan militer menekankan komando [ya atau tidak]; dan kekuasaan politik melahirkan keputusan-keputusan.

Selanjutnya Galtung juga membuat kategori-kategori kekerasan Khusus untuk Kasus Kekerasan Struktural yang bersifat Ekstrem, yaitu: Ecocide: kekerasan ekstrem terhadap alam Suicide: kekerasan langsung dan mematikan terhadap diri Homicide: kekerasan langsung dan mematikan terhadap orang lain Genocide: kekerasan langsung dan mematikan terhadap seluruh rakyat Structurocide: penghancuran struktur/destrukturalisasi Culturocide: penghancuran budaya/dekulturalisasi Omnicide: semua kekerasan di atas Galtung menulis satu artikel khusus tentang Kekerasan Kultural yang meliputi ranah budaya dan simbolik karena Kekerasan Kultural menjadi justifikasi

dari Kekerasan Langsung dan Kekerasan Struktural.

Bintang, salib, bulan sabit, bendera, lagu kebangsaan, potret pemimpin besar, poster atau pidato agitasi adalah aspek-aspek budaya yang ditanamkan dalam pikiran. Kekerasan struktural membuat Kekerasan Langsung dan Kekerasan Struktural terlihat atau terasa benar –tidak salah, sebagaimana teori penggunaan kekuasaan dan legitimasi terhadapnya dalam ilmu politik, yang tertanam melalui proses internalisasi – menurut psikologi. Kekerasan Langsung adalah peristiwa; Kekerasan Struktural adalah proses; Kekerasan Kultural adalah yang permanen pada keduanya. Rangkaian kekerasan tersebut dapat dilihat dalam hubungan sebab-akibat [Kultural via Struktural via Langsung].

Salah satu ilustrasi Kekerasan Kultural yang diajukan Galtung berhubungan dengan agama. Tuhan bukan saja dianggap sebagai sesuatu yang Transenden (di luar) tetapi juga Imanen (di dalam). Dalam doktrin agama-agama Semit, Tuhan 'diyakini berpihak' pada agama/umat tertentu, sehingga dimungkinkan beberapa orang 'lebih dekat' pada-Nya atau 'lebih tinggi'. Demikian pula dikotomi simetris Manicheisme menempatkan perbandingan kebaikan-kejahatan secara ekstrim, Tuhan versus Setan, pro-Tuhan versus pro-Setan.

Konsepsi demikian [yang ekstrim] kemudian menciptakan Surga dan Neraka di muka bumi, dimana mereka 'yang Terpilih' = baik = mendapat bimbingan keselamatan Tuhan. Sebaliknya, mereka 'yang tidak terpilih' = jahat = menuju kutukan bersama Setan. Selanjutnya berdasarkan penelusuran Galtung, ada empat jenis kebutuhan yang berkaitan dengan perilaku kekerasan, yaitu: 1). Kebutuhan untuk hidup –survival needs (negasinya adalah kematian); 2). Kebutuhan atas kesejahteraan – well-being needs (negasinya adalah kesengsaraan); 3). Kebutuhan atas identitas –identity needs (negasinya adalah alienasi); dan kebutuhan akan kebebasan –PREdom needs (negasinya adalah represi, penindasan).

Berdasarkan uraian teori di atas, maka pertanyaan yang kemudian muncul adalah: jika KEKERASAN = Kekerasan Langsung + Kekerasan Struktural + Kekerasan Kultural, apa yang dapat dilakukan untuk menghentikannya? Menjawab pertanyaan ini Galtung menyatakan bahwa umumnya Kekerasan Langsung dapat ditelusuri balik pada Kekerasan Struktural vertikal, seperti eksploitasi, represi, untuk pembebasan atau mencegah pembebasan. Sebagai latar belakang terdapat Kekerasan Kultural yang melegitimasi Kekerasan Struktural dan Kekerasan Langsung, baik untuk mencegah atau mengelolanya.

Apa yang kemudian diramalkan adalah hak yang buruk: kekerasan membiakkan

kekerasan; sebagian besar melalui mekanisme simple berupa pembalasan dendam, dan sebagainya lain karena tindak kekerasan dilakukan untuk menghentikan rasa bersalah seseorang. Disinilah muncul ruang bagi aktor perdamaian untuk memproses penyelesaian tanpa kekerasan. Aktivitas aktor perdamaian bisa diidentifikasi melalui pembangunan perdamaian struktural dan kultural. Sementara aktor anti-kekerasan penting untuk mengidentifikasi konflik yang tidak diperdebatkan di dalam satu masyarakat, bukan untuk mengatasinya namun untuk mengenalinya –sebagai proses awal transformasi positif.

Kemudian baru dilakukan identifikasi terhadap eksploitasi, represi dan marginalisasi (vertical) serta kelompok/individu kelompok yang terlalu sulit untuk merasa nyaman atau terlalu jauh untuk berinteraksi (horizontal). Menghentikan kekerasan kultural lebih sulit, karena ia merupakan 'bagian tersembunyi dari gunung es'. Oleh karena itu, dalam proses penyelesaian, ada empat lapis 'kondisi' yang harus diidentifikasi: 1). Kepentingan nasional/ kelompok yang direpresentasikan (seperti untuk memperoleh wilayah kekuasaan yang lebih besar); 2). Kepentingan individu (seperti melakukan negosiasi dengan brilyan untuk tujuan karir); 3).

Situasi bawah sadar individual (seperti penyelesaian masalah inferioritas; dan 4). Situasi bawah sadar kolektif, seperti asumsi implisit tentang apa yang normal/natural. Bentuk-bentuk Kekerasan Berdasarkan penjelasan tersebut Makarim (2014) membagi kekerasan dalam tiga kategori, yaitu kekerasan struktural, kekerasan horizontal, dan Kekerasan sebagai "reaksi normal dalam situasi tidak normal". Kemudian dia dijelaskan dengan contoh yang lebih rinci, sebagaimana berikut: Kekerasan Struktural Kekerasan struktural dikenali dari dua ciri: 1).

Bersifat vertikal atas kebawah (yang kuat kepada yang lemah, yang berkuasa kepada yang dikuasai, yang besar kepada yang kecil); dan 2). Mengandung represi (dominasi, hegemoni, eksploitasi). Kekerasan semacam ini terjadi dalam konteks makro, dengan aktor-aktor besar (Negara, militer/aparat keamanan, non-negara, perusahaan trans-nasional, sindikasi, organisasi). Motivasi dasar dari kekerasan ini adalah dominasi (penundukan 'yang lain'), penguasaan (sumberdaya dalam berbagai bentuk), serta penegasian (yang benar adalah yang berkuasa, karenanya semua yang di luar yang berkuasa tidak benar = tidak boleh ada) domain dasar kekerasan ini adalah kepentingan dalam berbagai dimensi (politik, ekonomi, ideologi, agama, sosial, budaya, alam, wilayah, dst.).

Beberapa contoh kasus dari kekerasan struktural ini adalah: Serangan Indonesia ke Timorleste (1976), Serang AS ke Irak (2003), Serangan ABRI ke Jama'ah Warsidi Lampung (1985), Bom Bali (2001-2003), Etnic Cleansing (Yugoslavia, Rwanda), Perampasan tanah,

Pelarangan Ahmadiyah, Razia Becak/WTS/Waria, dst. Biasanya, solusi dari kekerasan semacam ini adalah: 1). Negosiasi/renegosiasi atas objek sengketa; 2). Distribusi/redistribusi sumber daya; 3). Mekanisme transisi seperti pembentukan komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; dan 4). Rekognisi/pengakuan, yang kemudian disertai kompensasi/rehabilitasi.

Pendekatan penyelesaian 1-3 merupakan pendekatan realis-politik, dengan mengabaikan aspek lain diluar kompromi dan konsensus. Sementara pendekatan penyelesaian ke 4 merupakan kompromi idealis, biasanya menjadi model bagi kasus-kasus berdimensi kejahatan berat kemanusiaan (gross violation of human rights), kejahatan genosida (genocide), kejahatan agresi (crime of aggression) dan kejahatan perang (war crime). Dalam banyak kasus, yang dipilih adalah penyelesaian dengan cara kekerasan, yaitu perang.

Keputusan ini 'berlindung' pada doktrin yang –seolah-olah—humanis dan heroik, yaitu 'civis pacem para bellum' [barang siapa menginginkan perdamaian maka harus bersiap untuk berperang]. Dampak terburuk dari kekerasan ini sebenarnya bukanlah pada 'korban', namun justru pada pelaku dan apa-apa yang melekat kepadanya (Jerman dan Jepang pada Perang Dunia Kedua, atau rezim otoriter di Rusia dan Eropa Timur). Kekerasan Horizontal Kekerasan Horizontal terjadi pada aktor yang 'relatif' setara dan tidak berdimensi vertikal, baik yang terjadi antar-individu (kerabat atau asing) antar-kelompok (keluarga atau bukan keluarga), atau individu versus kelompok vice versa.

Sebagaimana konflik struktural, motivasi dasar dari konflik ini adalah kepentingan untuk melakukan dominasi (penundukan), penguasaan (sumber daya), serta penegasian. Termasuk didalamnya adalah motivasi pengakuan eksistensi dalam lingkungan atau pada bidang tertentu. Kekerasan ini terjadi dalam bentuk 'serangan' individual/kelompok, umumnya dengan dasar perbedaan relasi (laki-laki-perempuan, orang tua-anak, atasan-bawahan, benar-salah), identitas (ideologi, agama, suku, ras, afiliasi), atau Keduanya.

Pembedaan relasi dan identitas disamping menjadi 'alasan pembenar' juga dipandang efektif untuk menjadi sarana mobilisasi, peningkatan militansi, materi doktrinasi maupun pemicu aksi. Domain kekerasan horizontal adalah kepentingan pengakuan eksistensi, kepemilikan, 'penegakan' hukum/nilai (adat, agama, negara) atau konsensus, diluar dari apa yang secara resmi mengikat dan sah (beberapa argumentasi 'alasan' agama tidak bisa menjadi pembenar 'kekerasan' dalam satu Negara yang sistem politiknya sekuler misalnya). Contoh kasus kekerasan semacam ini adalah pelanggaran pidana (kriminal), pelanggaran perdata, pelanggaran pemenuhan hak-hak (hak publik, hak pribadi, hak

karena ikatan tertentu).

Tindakan terhadap diri sendiri (bunuh diri dan pencideraan misalnya) juga merupakan bagian dari pelanggaran ini. Karenanya solusi efektif dari kekerasan Horizontal adalah penegakan Hukum, Reparasi hak-hak korban, Reinterpretasi atau penguatan hukum dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan kelemahan atau ketiadaan hukum, serta perumusan konsensus normatif baru. Dalam kasus kekerasan yang berlarut-larut, biasanya terjadi karena ketiadaan, ketidaktegasan, ketidakjelasan atau ketidakadilan dari proses hukum.

Kekerasan sebagai "reaksi normal dalam situasi tidak normal" Kekerasan semacam ini merupakan peristiwa yang tidak mendapat tempat khusus dan eksplisit dalam kajian-kajian di atas, padahal persoalan yang terjadi nyata dan massif. Pengalaman kekerasan di wilayah konflik ataupun kekerasan dengan konteks tertentu (pembunuhan dukun santet, pengadilan jalanan) sebagai contoh negatif, dan pembelaan diri dalam kasus perampasan aset atau perjuangan kemerdekaan adalah contoh positif. Dalam konteks ini, 'situasi tidak normal' yang dimaksud adalah situasi-situasi yang dianggap 'bukan seharusnya' seperti konflik, kemiskinan, keterasingan, dan ketertindasan.

Kekerasan yang kemudian terjadi bisa sebagai reaksi pelaku atas sistem (dinas polisi rahasia yang harus menjalankan tugas eksekusi lawan politik pemerintah, anak yang 'dipaksa' berperang) atau reaksi korban (serangan terhadap pelaku atau simbol-simbol represi, pemberontakan, atau kegilaan). Motivasi utama dari kekerasan ini adalah: 1). survival (bertahan hidup); 2). well-being (kesejahteraan); 3). identity (identitas); dan 4). PReedom (kemerdekaan/kebebasan). Biasanya ini berbentuk aksi 'serangan' sebagai reaksi atau perlawanan (atas ancaman aktual/laten atau prediksi ancaman) pada empat aspek di atas. Ini merupakan 'reaksi normal', sementara ancaman merupakan 'situasi tidak normal'.

Karenanya solusi untuk kekerasan semacam ini harus ditekankan pada rehabilitasi (penghilangan/pemulihan dari empat aspek ancaman di atas) serta rekognisi atas apa yang dianggap sebagai 'kepentingan' Individu/Komunitas (material), negara, agama, ideologi, dan pandangan (non-material). Contoh kasus dari kekerasan semacam ini adalah: Penjarahan Konvoi Pangan PBB di Ethiopia/Somalia, Aksi kamikaze pilot Jepang (1945), Bom Bunuh diri (Palestina), penolakan seorang Martir untuk berpihak pada penguasa sehingga dibunuh, ayah yang menembak orang yang hendak membunuh anaknya, dst.

### BAB III PEMBANGUNAN PERDAMAIAN

Konsep Pembangunan Perdamaian

Pembangunan perdamaian adalah merupakan aktivitas yang direncanakan secara top-down proses maupun bottom-up proses.

Pembahasan tersebut merujuk kepada paradigma liberal peace-democratic dan peace-PRE markets democracy. Mulanya ia bersifat top-down, dan intervensi aktor eksternal terhadap negara-negara konflik dipandang sebagai agen utama perubahan. Pada tahun 1992 pembangunan masih dipahami sebagai bentuk rekonstruksi pasca konflik, yang merangkumi aktivitas membangun kembali institusi dan infrastruktur negara yang rusak akibat perang dan persengketaan untuk menyokong struktur yang cenderung menguatkan dan memantapkan perdamaian bagi mengelakkan berulangnya konflik (Campell, 2011). Dalam hal ini, operasi pembangunan perdamaian oleh PBB di Namibia pada tahun 1978 telah dipahami sebagai satu bentuk pembangunan kembali pasca-konflik.

Konsep pembangunan perdamaian telah dipopularkan oleh Sekretaris Jenderal Bangsa-Bangsa Bersatu (UN), Boutros Boutros-Ghali menerusi laporannya "An Agenda for Peace" sejak tahun 1992. Menjelaskan aktivitasnya terbatas pada masa pasca penyelesaian konflik. Di mana peace building adalah sebagai usaha komprehensif bagi mengenal pasti dan menyokong berbagai struktur yang dapat memperkuat dan memelihara perdamaian supaya mencegah terulangnya konflik (Boutros, 1992). Akan tetapi sekarang ini konsep pembangunan perdamaian cakupannya lebih luas, merangkumi; aktivitas-aktivitas pra, masa dan pasca konflik.

Sebagaimana dijelaskan oleh Lederach (1999) bahwa pembangunan perdamaian lebih daripada pembinaan semula pasca kesepakatan damai, melibatkan berbagai aktivitas, pada masa sebelum maupun sesudah perjanjian formal. Pembangunan perdamaian adalah satu konsep yang menyeluruh, merangkumi, menjana, dan mengekalkan pelbagai proses, pendekatan, dan peringkat yang diperlukan untuk mengubah konflik ke arah hubungan yang lebih damai dan mampan. Oleh karena itu, pada tahun 1995, Sekretaris Jenderal UN, Boutros Boutros-Ghali dalam "Agenda bagi Perdamaian", walaupun berbicara berkaitan dengan situasi pasca konflik, tetapi ia telah mengenalpastikan pelbagai program pembangunan perdamaian, termasuk projek koperasi. Ia bukan saja menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga meningkatkan keyakinan yang sangat fundamental bagi perdamaian (Miller, 2005).

Untuk itu, rekonstruksi pasca perang terdiri dari dua tugas, yaitu; tugas negatif dan tugas positif. Tugas negatif; mengakhiri kekerasan berkeseluruhan dan mencegah konflik kembali berulang, dan tugas positif; membentuk perdamaian yang berkeseluruhan dan mandiri (Romsbotham, et.al., 2011). Dengan demikian menurut DAC tujuan pembangunan perdamaian adalah mencegah konflik berulang dan mempromosikan perdamaian yang berkekalan dan berkeseluruhan (Gravingholth, et, al., 2009).

Untuk itu, Judy Cheng-Hopkins, Assistant Secretary-General for Peacebuilding Support,



UN (2010) menyatakan bahwa pembangunan perdamaian sekarang ini adalah mencakup pencegahan konflik (Conflict preventing), pemeliharaan perdamaian (Peace keeping), pembuatan perdamaian (Peace making), bantuan kemanusiaan dan bantuan pembangunan (Humanitarian and development assistance). Ramsbotham dan Zartman (2011) menjelaskan bahwa pembangunan perdamaian adalah bekerja dengan masyarakat di negara-negara lemah yang disebabkan oleh konflik untuk mencegah kekerasan, menggalakkan keadilan dan mentransformasi konflik kepada peluang-peluang pembangunan. Oleh karena itu pembangunan perdamaian melibatkan kebijakan, program, dan usaha-usaha untuk memulihkan kestabilan dan efektivitas fungsi institusi dan struktur sosial, politik dan ekonomi.

Pada umumnya memiliki tujuan untuk mewujudkan dan memastikan syarat-syarat bagi damai negatif dan damai positif dalam usaha institusionalisasi keadilan dan kebebasan (Miller, 2005). Menurut Bush (2004) pembangunan perdamaian secara luas adalah mencakup dua proses yang dilaksanakan secara bersama-sama, yaitu; merekonstruksi struktur kekerasan dan merekonstruksi struktur perdamaian. Ini boleh bermakna inisiatif yang menyokong struktur dan proses yang berkelanjutan bagi memperkuat prospek co-eksistensi yang damai dan mengurangi kemungkinan wabah, kambuh, dan keterusan konflik kekerasan melalui proses jangka pendek (operasi kemanusiaan) dan proses jangka panjang (pembangunan politik, ekonomi, sosial). Dalam hal ini pembangunan perdamaian bukan pemaksaan solusi (imposition of solution), tetapi menciptakan masa/peluang melalui ruang politik, ekonomi, dan sosial.

Di mana dengan itu aktor lokal boleh mengidentifikasi, membangun dan memanfaatkan sumberdaya bagi membangun masyarakat yang damai, makmur dan adil. Perkara ini akan wujud dengan memperkuat dan menciptakan struktur dan proses yang demokratik, adil dan responsif terhadap keperluan semua penduduk, institusi yang melindungi dan meningkatkan hak politik dan tanggungjawab negara dan masyarakat sivil, dan memperkuat keselamatan insan menerusi promosi daripada ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, kehakiman dan praktik sosial.

Perbedaan terminologi pembangunan perdamaian tersebut, Lisa Schirch (2008) mengkategorikan pembinaan perdamaian kepada dua spectrum, yaitu; tumpuan pada pasca konflik dan tumpuan pada semua tingkatan konflik. Di mana Beliau menghuraikan aktiviti sebagai berikut: Tabel 2: Spectrum Pembangunan perdamaian Spectrums of Meaning in Peacebuilding Terminology \_ \_Focus on post-conflict time span \_Focus on all stages of conflict \_Narrow focus on specific kinds of Activities \_Wide focus on a range of activities including peacekeeping, human rights monitoring, mediation, development, education, governance, etc.

\_ Immediate focus on ending direct violence \_ Long-term focus on addressing root causes of violence, including structural injustices \_ Outcome-oriented focus on solutions \_ Process-oriented focus on transformation \_ Focus on the role of outside experts "intervening" in local conflicts \_ Focus on the role of insiders and increasing their capacity for building peace \_ Focus on high level national and international interventions \_ Focus on all levels of interventions, from the community, regional, and national levels \_ Focus on military peace operations \_ Focus on non-military approaches to building peace and security \_ Selanjutnya Notter & Diamond (1996) menyatakan bahwa pembangunan perdamaian adalah menciptakan keadaan nyata dan tidak nyata untuk merubah sistem konflik kepada sistem damai. Ia boleh dilakukan apabila konflik berlaku, sebelum dan selepas kekerasan muncul.

Untuk itu, mereka membahagikan pembangunan perdamaian kepada tiga aspek, yaitu; Political Peacebuilding, mencakupi tentang perjanjian, yang berhubung kait dengan pengaturan politik yang menyediakan semua konteks untuk memahami hubungan pelbagai parti/kelompok dan sumber dayanya. Membina infrastruktur undang-undang yang dapat mengatasi keperluan politik, dan mengurus had-had daripada sistem damai. Aktivitinya adalah negosiasi rasmi, diplomasi, misi menemukan fakta, dan lain lain. Structural Peacebuilding, membentuk struktur tingkat menengah, yang merangkumi pembentukan sistem perilaku, institusi, dan tindakan bersama untuk menyokong implementasi budaya damai.

Membangun infrastruktur dan sistem ekonomi, ketenteraan, sosial dan kebudayaan melalui aktiviti program pembangunan ekonomi, penguatan demokrasi, dan menyokong penubuhan NGO/OMS dalaman yang boleh memperkuat perdamaian. Social Peacebuilding, ialah porsi tingkat bawah dari proses pembangunan perdamaian. Ia merangkumi perhubungan, yang berhubung kait dengan perasaan, sikap, pendapat, kepercayaan, dan nilai-nilai serta kemahiran. Dijalankan menerusi proses dialog, aktiviti pembinaan masyarakat dan latihan.

Selanjutnya Reychler & Paffenolz (2001) menyatakan tujuan utama pembangunan perdamaian adalah untuk mentransformasikan konflik secara konstruktif dan menciptakan lingkungan damai secara berkelanjutan. Caranya adalah menyelesaikan komponen-komponen utama daripada konflik; mengatasi permasalahan yang mengancam kepentingan inti kelompok-kelompok, merubah strategi berpikir, dan merubah struktur masa dan cara berinteraksi. Ekoran itu, semua bentuk kekerasan (fisik, psikologi, stuktur dan budaya) dihilangkan dan semua akibat negatif (kerusakan) dari konflik (kemanusiaan, ekonomi, sosial, politik, ekologi, psikologi dan spiritual) dapat diperbaiki dan dipulihkan.

Oleh demikian, pembangunan perdamaian memerlukan penguatan atau pembentukan struktur dan proses yang demokratis, adil dan responsif terhadap keperluan dan kerisauan seluruh penduduk, daripada ahli masyarakat yang paling lemah hinggalah yang paling kuat (Knight dan Bush, 2004; 2008). Artinya, lembaga-lembaga harus melindungi dan memajukan hak-hak politik, tanggungjawab negara dan masyarakat sipil, dan mengukuhkan keamanan manusia dengan menggalakkan pembangunan ekonomi, hukum dan sosial yang pesat dan berkelanjutan (Bush, 2008).

Untuk itu, pembangunan perdamaian memerlukan kerja pada semua bidang, di semua peringkat dan dengan semua stakeholders bagi mencapai keadilan, konsolidasi dan perdamaian berkelanjutan dalam masyarakat yang konflik kekerasannya telah mengakar dan berlarut-larut dan telah berdampak buruk terhadap mereka, baik secara ekonomi, politik dan sosial (Senehi, et.al, 2010). Menurut Miall, et.al, (2000) hal tersebut dapat direalisasikan dengan cara mereformasikan konstitusi dan institusi, rekonstruksi dan rekonsiliasi sosial, dan pembangunan kembali politik, ekonomi, dan komunitas yang tercerai-berai.

Untuk itu, terdapat dua tugas utama pasca kesepakatan damai supaya perdamaian berkelanjutan, yaitu: Mencegah perang berulang kembali; mempromosikan politik perang ke dalam politik perdamaian dengan merubah struktur, dan menukarkan sumber-sumber kekerasan dengan sumber lainnya, semisal peluang politik dan keuntungan ekonomi. Membentuk perdamaian berkelanjutan; memperbaiki defisit militer/keselamatan, defisit politik/konstitusional, dan defisit ekonomi sosial, serta defisit kejiwaan sosial. Pembangunan Perdamaian Positif Berkelanjutan Merujuk kepada konsepsi **di atas dapat dikatakan bahwa** perdamaian positif berkelanjutan adalah satu keadaan di mana kekerasan langsung dan tidak langsung tidak ada, semua bentuk permusuhan hilang, dan terdapat hubungan harmoni dan koperatif yang menyokong wujud kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh komuniti; manusia dan alam, generasi sekarang dan generasi masa depan. Banyak hal yang perlu dirubah untuk mewujudkan keadaan semacam itu di kawasan bekas konflik.

Menurut Peck (1998) bahwa asas pembangunan perdamaian dan keselamatan yang berkelanjutan (sustainable) adalah berfungsi dengan baik sistem pemerintahan lokal, nasional, regional dan internasional yang responsif kepada keperluan asas manusia. Ini melibatkan; (1) institusionalisasi proses penyertaan semua masyarakat untuk memberikan **hak sipil dan politik** yang dilindungi oleh undang-undang dan pengadilan yang sah untuk memastikan bahwa semua rakyat dilayani sama rata dan adil serta hak asasi mereka dilindungi; (2) pembangunan ekonomi yang saksama dan peluang hak-hak ekonomi dan sosial disediakan; (3) pembangunan norma dan pluralisme yang menghormati budaya unik dan identitas semua kelompok; dan (4) adanya pendidikan

bagi kelompok dominan untuk meyakinkan mereka bahwa kepentingan-kepentingan keamanan jangka panjang masing-masing terdapat dalam pembangunan masyarakat yang adil.

Manakala Reyhler & Paffenolz (2001) menyatakan bahwa persyaratan utama bagi membentuk perdamaian berkelanjutan adalah ada empat elemen, yaitu: Komunikasi, konsultasi dan negosiasi yang efektif pada semua level dan antara stakeholders utama. Meningkatkan struktur damai, yaitu politik, konsolidasi demokrasi, sistem peradilan yang efektif, dipercaya dan memulihkan, sistem market yang bebas, sistem pendidikan, informasi dan komunikasi yang sensitif perdamaian, dan mengatasi masalah pelarian atau pengungsi dengan cara yang memuaskan. Iklim moral-politik yang integratif, yaitu adanya rasa kebersamaan atau kekitaan (*we-ness*), komitmen politik yang inklusif, dan adanya modal sosial.

Keamanan objektif dan subjektif, keselamatan sebenar dan dipersepsikan, seperti penghentian perang, kontrol dan pelucutan senjata, pembangunan kepercayaan dan keamanan. Sejalan dengan itu, Samuel (2005) menyatakan bahwa supaya perdamaian positif berkelanjutan dan berkekalan, pembangunan perdamaian pasca konflik memerlukan tiga serangkai transformasi, yaitu: Transformasi masyarakat, dari menggunakan kekerasan kepada cara-cara politik bagi menyelesaikan konflik; memerlukan negosiasi elit, dialog masyarakat luas dan rekonsiliasi.

Reformasi kerangka pemerintahan bagi menjamin sejauh mungkin pengaturan pemerintahan yang telah dinegosiasikan dapat mencegah konflik di masa depan, dan pemerintahan yang demokratik perlu diadopsi. Pembentukan lembaga-lembaga yang menguruskan pembangunan perdamaian secara berkelanjutan setelah lembaga misi perdamaian pergi. Lembaga-lembaga ini tidak hanya dipaksakan dari luar, tetapi harus menjadi lembaga-lembaga yang mampu dan berkomitmen untuk menjalankan fungsi utama mereka.

#### BAB IV PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN PERDAMAIAN Definisi Pendidikan

Perdamaian Pendidikan perdamaian tidak saja dilaksanakan melalui pendidikan formal tetapi juga dapat dilaksanakan melalui pendidikan non formal, bahkan secara informal melalui keluarga adalah sangat utama, khususnya berkaitan dengan pembentukan sikap dan nilai. Ini dapat dipahami melalui definisi yang dijelaskan oleh para pakar dan penggiat perdamaian. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) pendidikan perdamaian adalah proses mempromosikan pengetahuan, keahlian, sikap dan nilai yang dapat untuk membentuk perilaku yang memungkinkan seseorang mampu mencegah konflik dan kekerasan; menyelesaikan konflik secara damai; dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk perdamaian, baik pada diri sendiri, antar pribadi, antar kelompok

masyarakat, nasional maupun internasional. (Fountain,1999).

Konsep ini merupakan tindak lanjut dari visinya tentang pendidikan dasar yang berkualitas yang mencerminkan proses pendidikan dan pembelajaran yang mengarah kepada pembentukan modal manusia untuk pertumbuhan ekonomi serta modal sosial untuk toleransi, saling menghormati hak setiap individu untuk turut serta mewujudkan persamaan dalam kehidupan keluarga, komunitas dan ekonomi, dan melawan budaya kekerasan yang menjadi ancaman menghancurkan kehidupan keluarga dan komunitas di banyak negara (Fountain, 1999) Selanjutnya Castro dan Galace (2010) pendidikan perdamaian adalah pendidikan yang mempromosikan budaya perdamaian dengan memupuk basis pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai untuk mengubah pola pikir, sikap dan perilaku.

Ini merupakan usaha transformatif dengan membangun kesadaran dan pemahaman, mengembangkan kepedulian dan menantang tindakan pribadi dan sosial yang memungkinkan orang untuk hidup, berhubungan dan menciptakan kondisi serta sistem yang mengaktualisasikan antikekerasan, keadilan, peduli lingkungan dan nilai-nilai perdamaian lainnya. Selain itu, menurut Giroux (2007) pendidikan perdamaian adalah proses membantu orang mendapatkan hak pilihan moral dan politik dengan membantu mereka memahami hubungan antara teori dan praktek, analisis kritis dan akal sehat, dan pembelajaran serta perubahan sosial. Oleh sebab itu, pendidikan perdamaian bertujuan membentuk kesadaran manusia untuk komit dengan cara-cara damai.

Pendidikan perdamaian adalah belajar untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat kekerasan, mengajarkan keahlian kepada pelajar mengelola konflik dengan nirkekerasan dan menumbuhkan kemauan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Untuk itu, terdapat 5 postulat utama dari pendidikan damai, yaitu; pendidikan damai menjelaskan tentang akar kekerasan, mengajarkan alternatif terhadap kekerasan, menyesuaikan cara untuk mengatasi bentuk-bentuk kekerasan yang berbeda, memahami perdamaian sebagai proses yang bervariasi menurut konteksnya dan konflik terjadi dimana-mana (Harris, 2004) Sejalan dengan itu, Mukhopadhyay (2005) menyatakan pendidikan damai tidak bertujuan untuk menghentikan konflik semata, tetapi juga untuk menanamkan pengetahuan membangun dan menjaga perdamaian, menjelaskan cara mengidentifikasi hingga mengelola konflik secara damai, memberikan gambaran alternatif terjadinya kekerasan dan pengetahuan tentang isu-isu kritis dari pendidikan perdamaian yang mencakup menjaga perdamaian, menciptakan perdamaian dan membangun perdamaian. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan perdamaian bertujuan mewujudkan perdamaian positif berkelanjutan.

Dalam hal ini Galtung (1967) menyatakan bahwa perdamaian positif ialah suatu kondisi

di mana nilai-nilai yang relatif diakui dunia terwujud, seperti kerjasama, bebas dari ketakutan, bebas dari kekurangan, ekonomi tumbuh dan berkembang, tidak adanya eksploitasi, persamaan, keadilan, bebas bertindak, pluralisme dan dinamisme. Selain itu, konsep perdamaian positif yang dimaksudkan adalah mencakupi gagasan kosmologi sosial, budaya dan ekologi (Grewal (2003). Selanjutnya Castro & Galace, (2010) menyatakan bahwa perdamaian positif adalah terdapat perhubungan yang adil dan tidak eksploitatif, baik di antara manusia maupun antara manusia dan ekologi.

Uraian tersebut memberi makna bahwa perdamaian positif dapat terindikasi dari tidak adanya kekerasan langsung, kekerasan struktur, kekerasan budaya dan kekerasan ekologi. Justru yang ada adalah keadaan sejahtera dan hubungan yang adil, baik hubungan sosial, ekonomi, politik maupun ekologi. Oleh sebab itu, menurut Harris (2004) pendidikan perdamaian mesti dilaksanakan secara komprehensif, interdisipliner dan mencakup berbagai program dan inisiatif.

Ini dapat diklasifikasikan ke dalam lima mata pelajaran utama, yaitu; Pendidikan Lingkungan, Pendidikan Hak Asasi Manusia, Pendidikan Internasional, Pendidikan Pengembangan, dan Pendidikan Resolusi Konflik. Peran Pendidikan dalam Pembangunan Perdamaian Diantara definisi pendidikan yang dijelaskan oleh para pakar, satunya adalah bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang bertujuan dan mendewasakan anak didik yang meliputi kedewasaan intelektual, sosial, dan moral (Saidiharjo: 2004). Sejalan dengan itu, Hadjam dan Widiarso (2003) menjelaskan bahwa lembaga pendidikan mempunyai peran strategis dalam mendidik dan menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk memegang estafet generasi sebelumnya.

Keberadaan lembaga pendidikan sebagai bagian dari sistem sosial harus peka dan responsive terhadap harapan dan tuntutan masyarakat sekitarnya. Mengingat pentingnya peran pendidikan, pada tahun 2000 Majelis Umum PBB mengeluarkan mandat kepada UNESCO untuk menetapkan tahun 2000 sebagai tahun budaya damai internasional dan dekade tahun (2001-2010) sebagai dekade budaya damai dan tanpa kekerasan. Hal ini merupakan kelanjutan dari program yang dimulai semenjak tahun 1974 mengenai Education for International Understanding, Co-operation and Peace and Education relating to Human Rights and Fundamental Freedoms (ditetapkan di Paris), World Plan of Action on Education for Human Rights and Democracy (ditetapkan di Montreal tahun 1993), Declaration and Programme of Action of the World Conference on Human Rights (ditetapkan di Wina tahun 1993), Declaration and Integrated Framework of Action on Education for Peace, Human Rights and Democracy (ditetapkan di Paris tahun 1995), dan penetapan dekade the Plan of Action for the United Nations Decade for Human Rights Education (1995-2005).

Semenjak ditetapkan berbagai macam program tersebut, berbagai negara diarahkan untuk menekankan pendekatan holistik untuk pendidikan, yang menumpukan pada metode partisipatif. Program pendidikan yang dikembangkan, antara lain kedamaian dan anti kekerasan, hak asasi manusia, demokrasi, toleransi, pemahaman antar bangsa dan antar budaya serta pemahaman perbedaan budaya dan bahasa. Untuk merealisasikan hal tersebut, pendidikan perdamaian harus melibatkan tiga komponen, yaitu anak didik, pendidik (guru) dan orang tua peserta didik.

Ketiga komponen tersebut merupakan pelaku aktif proses penanaman nilai-nilai luhur dalam pendidikan perdamaian. Peran pendidik adalah sebagai pendidik nilai-nilai dan pengajar ilmu pengetahuan. Anak didik adalah generasi muda yang akan meneruskan keberlangsungan bangsa yang diharapkan berperan pada sosialisasi nilai-nilai budaya damai anti kekerasan pada rekan sebaya. Orang tua adalah mitra guru yang mampu mendorong, mendukung dan mengembangkan aktualisasi atau pelaksanaan budaya damai tanpa kekerasan (Hadjam dan Widiarso, 2003).

Dengan demikian, melalui pendidikan diharapkan dapat melahirkan manusia yang cerdas dan beradab guna terbangun satu bangsa yang berperadaban tinggi dan mulia. Untuk itu, secara umum materi pendidikan damai adalah upaya menanamkan sikap untuk menjadi warga negara yang baik, yang mampu mengatasi ketidakseimbangan yang terjadi antara harapannya dan kenyataan sebagai salah satu pemicu konflik yang sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini diperlukan pendidik untuk selalu meningkatkan pengetahuan tentang isu-isu sosial yang dapat dijadikan sebagai bahan materi pendidikan damai.

Materi-materinya tidak harus diberikan dalam mata pelajaran tersendiri bahkan akan lebih baik jika semua materi itu masuk dalam semua mata pelajaran yang diberikan dalam kurikulum, dan untuk mewujudkan perdamaian melalui pendidikan maka perlu diberikan pendidikan perdamaian di setiap level pendidikan, baik secara formal dan informal (Wulandari, 2010). Selanjutnya, Tschirgi (2011) menjelaskan bahwa sektor pendidikan merupakan komponen penting dalam upaya pembangunan perdamaian dan pemulihan awal sebuah negara yang mengalami konflik.

Oleh sebab itu, menjadi satu keharusan untuk terus memberikan pendidikan dalam keadaan darurat, dan untuk mengembalikan institusi pendidikan dengan cepat sebagai bagian dari strategi pemulihan dini. Menyadari hal tersebut, pada tahun 2000, di bentuk satu Jaringan Inter-Agency for Education in Emergencies (INEE) sebagai jaringan perwakilan global terbuka dari LSM, badan-badan PBB, lembaga donor, pemerintah, institusi akademis, sekolah dan populasi yang terkena dampak konflik untuk bekerja sama guna memastikan hak atas pendidikan berkualitas dan aman dalam keadaan



darurat dan pasca pemulihan krisis.

Atas dasar ini, dapat dikatakan sektor pendidikan perlu dijadikan sebagai bagian dari strategi penguatan perdamaian. Di sejumlah negara pasca-konflik, telah muncul satu kecenderungan menuju integrasi yang lebih baik antara kerangka pembangunan utama negara dalam penanggulangan kemiskinan dan strategi pembangunan perdamaianya, di mana pendidikan sangat penting bagi keduanya. Penjelasan di atas menggambarkan begitu pentingnya pendidikan untuk pembangunan perdamaian.

Lebih terperinci lagi menurut Ellisson (2012) terdapat lima rasionalisasi peran pendidikan untuk pembangunan perdamaian, yaitu; (1) Pelatihan keterampilan menyediakan jalan selain kekerasan; (2) Pendidikan melindungi anak-anak; (3) Pendidikan membantu membangun kembali normalitas; (4) Pendidikan membantu membuat fondasi yang hilang; (5) Pendidikan berkontribusi terhadap transformasi sosial. Lebih detailnya dijelaskan dalam tabel 3 berikut: Tabel 3: Rasionalitas Peran Pendidikan dalam Pembangunan Perdamaian / Model Pendidikan Perdamaian Banyak model pendidikan damai yang telah dikembangkan oleh para pakar perdamaian.

Namun demikian, menurut Bal-Tar dan Rosen (2009) untuk mencapai tujuannya, sistem sekolah harus dilakukan perubahan besar; pengaturan kurikulum baru, penulisan tujuan pendidikan baru, menyiapkan buku pelajaran sekolah, mengembangkan dan menciptakan iklim sekolah yang kondusif bagi pendidikan. Selanjutnya mensosialisasikan bahan ajar, melatih guru pendidikan perdamaian, dan sebagainya. Hal ini akan mewujudkan rekonsiliasi anatar generasi muda dan pada akhirnya cara-cara ini memfasilitasi pembangunan budaya damai.

Selain itu, suatu model pendidikan damai akan tercapai tujuannya sangat bergantung pada kondisi politik sosial dan lingkungan pendidikan. Bal-Tar, dkk. (2009) menyatakan dalam konteks masyarakat yang terlibat dalam konflik, pendidikan damai dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung materinya mencakup berpikir reflektif, konflik dan damai, proses damai, kehadiran rival, sejarah konflik, dan dampak serta emosi baru.

Sedangkan secara tidak langsung materinya adalah toleransi, simpati etnis, hak azasi manusia, dan skil resolusi konflik (negosiasi, mediasi, dan penyelesaian masalah secara kolaboratif). Sementara UNESCO (2005) telah menawarkan model integratif, di mana pendidikan damai diajarkan melalui pelbagai subjek formal, dari pelajaran sosial sampai eksak matematik. Selain itu, juga dapat dilaksanakan melalui kegiatan ekstra kurikulum. Tema pendidikan damai mencakup 10 tema, yaitu membangun damai dalam komunitas, berpikir kritis nirkekerasan, hormat pada martabat manusia, menemukan kedamaian jiwa

(inner peace), berpikir positif, peduli terhadap bumi, penyelesaian konflik, menjadi diri sendiri, belajar hidup bersama, dan kasih sayang serta tidak melakukan kerusakan.

BAB V PENDIDIKAN PERDAMAIAN DI SEKOLAH MENENGAH ACEH Konflik dan Pendidikan Aceh Konflik yang berkepanjangan telah mengakibatkan pendidikan di Aceh jauh tertinggal daripada daerah lain di Indonesia. Selama berlangsungnya peperangan di Aceh, bukan hanya bangunan sekolah yang menjadi sasaran, namun guru dan pelajar juga ikut terseret dalam perang yang brutal tersebut. Hal ini harus disadari oleh semua pihak di Aceh agar perdamaian yang telah dicapai dapat dipelihara supaya generasi Aceh **pada masa yang akan datang** dapat **belajar dalam situasi yang** kondusif.

Tokoh pendidikan atau cendekiawan besar turut menjadi korban perang, di antaranya adalah Rektor Institut **Agama Islam Negeri (IAIN)** Ar-Raniry dan Rektor **Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH)** keduanya meninggal dunia ditembak oleh orang tak dikenal di Aceh. Bukan hanya guru atau tenaga pendidik saja yang menjadi korban. Putera-puteri Aceh yang **masih duduk di bangku sekolah** juga menjadi korban (Yunus, 2013b). Kejadian yang menimpa dunia pendidikan di Aceh selama berlangsungnya konflik bersenjata merupakan kejadian yang menyedihkan, pendidikan sebagai investasi masa depan telah mengalami kehancuran dan pemulihanpun memerlukan waktu dan proses yang panjang.

Bukan sahaja membangun kembali tempat belajar yang sudah dibakar, tetapi memulihkan psikologis guru dan murid serta mengejar ketertinggalan Aceh dalam bidang pendidikan adalah pekerjaan yang sangat berat. Kalau pendidikan diibaratkan seperti tubuh, saat perang tubuh tersebut sedang dalam krisis kekebalan. Secara nyata dapat dilihat dengan jelas, betapa tanggungjawab para pihak yang berkepentingan untuk menghalang penghancuran pendidikan begitu lemah. Realitinya adalah pendidikan di Aceh menjadi sasaran pelampiasan kemarahan pihak-pihak yang berkepentingan dalam konflik. Pendidikan adalah korban utama selain rakyat. Rusaknya fasilitas pendidikan telah mengakibatkan terhentinya proses pembelajaran.

Hingga tahun 2004 diperkirakan sebanyak 546 sekolah hangus dibakar, ditambah lagi dengan persoalan siswa dan guru yang tidak dapat pergi ke sekolah karena situasi perang. Sungguh ini merupakan duka mendalam yang terpaksa ditanggung oleh dunia pendidikan di Aceh. Walaupun demikian, sebahagian siswa masih mengikuti proses pelajaran meskipun dalam keadaan serba kekurangan, darurat dan ancaman maut. Pada era perang ribuan pelajar tidak dapat mengikuti ujian akhir yang diselenggarakan secara nasional. Hal ini bukan masalah sederhana, perang di Aceh telah menyebabkan kerugian yang besar dan duka dalam bidang pendidikan.

Akibat terganggunya pendidikan di Aceh, satu generasi Aceh telah rapuh dan terombang-ambing. Hal ini akan menjadi suatu ancaman buruk yang akan melanda Aceh dalam jangka panjang dalam mengusung satu peradaban yang cemerlang. Merespon keadaan tersebut, setelah perang sipil Aceh berakhir, dengan ditandatangani perjanjian damai oleh Pihak **GAM dan Pemerintah Indonesia** di Helsinki pada Agustus 2005, Pemerintah Indonesia telah bertanggungjawab dan berpartisipasi dalam pemulihan pendidikan di Aceh. Sekolah-sekolah yang dulunya dibakar telah dibangun kembali dan direhabilitasi oleh pemerintah.

Bahkan Pemerintah Aceh sendiri telah menggarakan anggaran otonomi khusus untuk pembangunan pendidikan di Aceh, baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia. Peluang dan Tantangan Pendidikan Perdamaian di Aceh  
Perkembangan pendidikan dan sistem pendidikan di Aceh tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teritori dan otoritas politik Aceh dari masa ke masa akibat agresifitas kolonialis dan konflik yang berkepanjangan di Aceh. Artinya perkembangan pendidikan di Aceh berkaitan erat dengan perkembangan entitas identitas politiknya dari satu Kerajaan Islam Terbesar di Asia Tenggara menjadi satu Provinsi dalam NKRI yang bersatus Istimewa.

Sejumlah rentetan perang melawan kolonialis Belanda dan Jepang serta konflik pembebasan diri dari **Negara Kesatuan Republik Indonesia** (NKRI) yang berakhir damai **pada 15 Agustus 2005** telah berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan di Aceh. Begitu pula sebaliknya semangat juang rakyat Aceh terhadap kolonialis dan konflik Aceh yang berlangsung dalam masa yang berkepanjangan tentu tidak terlepas dari kontribusi sistem pendidikan yang dilaksanakan di Aceh. Hal ini dapat dikatakan bahwa konflik, damai dan pendidikan memiliki hubungan timbal-balik.

Sebagaimana juga dinyatakan oleh Danesh (2006) perdamaian merupakan satu persyaratan untuk pendidikan damai yang efektif, dan pendidikan damai akan menciptakan keadaan damai yang lebih tinggi. Dalam konteks Aceh sebagai bagian wilayah NKRI, secara normatif Aceh telah mendapat hak istimewa dari Pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan, namun tidak boleh bertentangan dengan dengan Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 16 ayat 2 © disebutkan bahwa Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan menyelenggarakan **pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at** Islam.

Kemudian lebih terperinci lagi dijelaskan pada pasal 215 (1) pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pada pasal 216 (1) setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai Islam, budaya, dan kemajemukan bangsa.

Selanjutnya dalam Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pada pasal 19 diantaranya dijelaskan bahwa Pemerintah Aceh berwenang mengimplementasikan kurikulum nasional pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selain itu Pemerintah Aceh juga memiliki kewenangan menyusun kurikulum Aceh yang islami untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Kemudian dalam Qanun Nomor 9 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada pasal 13 (b) disebutkan bahwa Pemerintah Aceh menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata, adil dan islami.

Uraian ini menggambarkan bahwa keistimewaan pendidikan di Aceh dapat diaktualisasikan melalui materi muatan lokal yang disesuaikan dengan perkembangan space penerapan Syariat Islam di Aceh. Berkaitan dengan pendidikan damai pasca konflik di Aceh tentu diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam melestarikan perjanjian perdamaian walaupun dalam MoU Helsinki tidak disebutkan kata "pendidikan" secara eksplisit. Namun pada bagian 1.1 Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh, pada poin (a) disebutkan Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama. Selanjutnya pada bagian 1.4

Peraturan Perundang-undangan, pada poin (b) disebutkan Legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jika merujuk Kovenan Internasional mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, maka dapat dipastikan bahwa MoU Helsinki telah merangkumi aspek pendidikan yang mesti dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.

Dalam kovenan tersebut dinyatakan pada pasal 13 (1) negara-negara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara

efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

Dalam upaya menyelaraskan dengan kovenan tersebut Pemerintah Aceh telah meletakkan dasar pendidikan di Aceh sebagaimana yang dijelaskan dalam UUPA dan Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Pendidikan seperti yang telah diuraikan di atas dengan menambah ciri keistimewaan pendidikan Aceh yang islami. Namun demikian, UUPA dan Qanun Aceh tersebut tidak menjelaskan tujuan pendidikannya untuk membangun perdamaian positif yang berkelanjutan atau mempromosikan budaya damai di Aceh secara langsung, sebagaimana yang dihendaki oleh para pakar perdamaian.

Bram Spruyt, et al (2014), Bajaj and Chiu (2009), dan Reardon (1988) menjelaskan bahwa pendidikan damai merangkumi kebijakan, perencanaan, pedagogik dan praktik pendidikan yang dapat menumbuhkan kesadaran, mengembangkan skill dan nilai-nilai perdamaian. Dengan demikian, pendidikan perdamaian menjadi media untuk membangun dunia yang lebih toleran, yang didasarkan pada saling menghormati, tidak ada kekerasan, adil dan keberlanjutan (sustainability) (Harris and Morrison, 2003). Menurut Castro and Galace (2010) pendidikan damai adalah mengolah pengetahuan, skill, sikap dan nilai guna mentransformasikan pola pikir, sikap, dan perilaku yang menimbulkan konflik kekerasan.

Hal ini dapat dilakukan dengan membangun kesadaran dan pemahaman, mengembangkan kepedulian dan menantang tindakan pribadi dan sosial yang akan memungkinkan orang untuk hidup, berhubungan dan menciptakan kondisi dan sistem yang dapat mengaktualisasikan non-kekerasan, keadilan, peduli lingkungan dan nilai-nilai perdamaian lainnya. Menurut UNESCO (2011) selama masa pasca konflik, banyak proses pembangunan perdamaian telah dijalankan, namun pendidikan tidak diperhitungkan. UNDP dan lembaga lainnya yang telah menjawab kebutuhan akan program yang sensitif konflik di semua institusi, namun tidak ada fokus pada pendidikan dan peran potensialnya.

Namun Unicef telah mendukung pengembangan kursus pendidikan percontohan untuk siswa sekolah menengah atas berdasarkan nilai budaya dan agama lokal, yang bertujuan untuk mempromosikan non-kekerasan dan resolusi konflik secara damai di kalangan pemuda dan menciptakan kesadaran tentang hak anak-anak. Banyak program yang serupa ini tidak dilanjutkan oleh Pemerintah Aceh karena kurangnya dana, dan Pemerintah gagal untuk mengintegrasikannya ke dalam proses reformasi kurikulum

holistik (Unicef, 2014). Menyadari hal tersebut sebagian LSM internasional, nasional dan lokal yang peduli pada pendidikan damai telah melaksanakan pendidikan damai di Aceh, baik melalui lembaga pendidikan non formal maupun lembaga pendidikan formal (sekolah-sekolah).

Misalnya Peace Generation, Aceh Peace Forum, dan UNICEF-AusAID. Bahkan UNICEF telah memfasilitasi penyusunan satu Buku Ajar Pendidikan Damai yang dilakukan oleh para akademisi UIN Ar-Raniry pada tahun 2001 dengan judul Kurikulum Pendidikan Damai. Kemudian direvisi pada tahun 2005 dengan judul "Kurikulum Aqidah Akhlak dalam Konteks Pendidikan Damai. Kedua buku ini ini mendapat sambutan dari Pemerintah Aceh via Dinas Pendidikan, dengan harapan kurikulum dapat dilaksanakan di sekolah menengah Aceh. Kepala Dinas Pendidikan dalam kata pengantarnya menyatakan "...sincerely hopes that peace education targeting general high schools (Sekolah Menengah Umum, SMU) in the province can contribute to realizing a lasting solution to the conflict hampering Aceh."

Kurikulum tersebut memang tidak ada alasan untuk ditolak dilaksanakan di Aceh, karena sangat relevan dengan konteks budaya Aceh, merepresentasikan pendidikan perdamaian dari perspektif Islam dan orang Aceh. Kurikulum ini mempromosikan perdamaian positif dan komprehensif yang mencakup 4 dimensi hubungan damai, yaitu dengan Tuhan Sang Pencipta, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan. Manual ini menekankan bahwa perdamaian bukanlah penaklukan situasi atau penerimaan pasif atas ketidakadilan, diskriminasi, dan perang, melainkan pengakuan atas masalah-masalah ini dan menanganinya secara damai.

Namun demikian, Pemerintah Aceh melalui Dinas terkait belum ada satu kebijakan atau keputusan yang jelas untuk dijadikan sebagai landasan pelaksanaan dan pengembangan satu konsep pendidikan perdamaian yang mesti dilaksanakan oleh pihak sekolah di seluruh Aceh. Hal ini terlihat dari beberapa informen yang diwawancarai, di antara mereka ada yang tidak paham tentang pendidikan perdamaian, bahkan ada di antara guru-guru sekolah yang memahami perdamaian sebatas perjanjian perdamaian. Seorang guru di SMA IDI misalnya mempertanyakan kepada peneliti "apa itu pendidikan perdamaian, saya baru mendengarnya sekarang".

Informen lainnya dari Dinas Pendidikan Aceh Timur menyatakan "Aceh sekarang sudah damai, jadi pendidikan perdamaian sudah kurang relevan dilaksanakan di sekolah. Apa lagi di Aceh Timur belum pernah terjadi tawuran antar siswa." Bahkan, ungkapan serupa juga didapat di Kota Banda Aceh, Ketua Humas SMA Negeri Banda Aceh menyebutkan "Kalau dulu ada mata pelajaran peace education program. Mungkin karena sudah damai jadi tidak diberikan lagi" (ACSTF, 2015). Ungkapan untaian kalimat tersebut

mengambarkan bahwa para pelaku dan penanggung jawab pendidikan di Aceh kurang memahami hakikat pendidikan damai yang mesti dilaksanakan di sekolah-sekolah.

Akibatnya rangkaian pelatihan pendidikan damai yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM /NGO) bagi guru-guru sekolah kurang memberi pengaruh terhadap perubahan pelaksanaan pendidikan di sekolah tempat mereka melaksanakan tugas. Sistem pendidikan yang dilaksanakan selalu merujuk kepada sistem pendidikan nasional dengan penafsiran yang sangat kaku. Seakan-akan sistem ini telah menutup rapat kreatifitas dan inovasi penanggung jawab pendidikan di Aceh, termasuk para guru untuk mengembangkan kurikulum atau materi pelajaran yang dibutuhkan dan sesuai karakteristik Aceh kekinian.

Menurut Ilham dan Fakhri selama ini kurikulum yang diberlakukan di sekolah-sekolah adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013 sebagaimana dilaksanakan di sekolah-sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah Aceh walaupun memiliki keistimewaan dalam bidang pendidikan belum memiliki kurikulum sendiri, yang mencerminkan kekhasan Aceh dari segala aspeknya, kecuali diajarkan Bahasa Aceh melalui Mata Pelajaran Muatan Lokal. Kurikulum Aceh sebenarnya sudah pernah diwacanakan oleh Pemerintah Aceh, dan sejak 2014 sudah dimulai proses penyusunannya, tetapi terputus/tertunda pada 2015 karena tidak ada anggaran untuk itu.

Pada 2016 mulai disusun kembali dan pada Oktober 2017 ditargetkan penyusunan kurikulum tersebut dapat diselesaikan dan bulan November dapat diseminasikan, sehingga pada tahun 2018 dapat dilaksanakan pada beberapa sekolah sebagai pilot project. Kurikulum ini dinamakan Kurikulum Aceh yang merangkumi pendidikan Islam, pendidikan damai dan kearifan lokal Aceh (FGD dengan Pegawai Dinas Pendidikan Aceh, 23 Agustus 2017 di Banda Aceh). Walaupun demikian, Dinas Pendidikan Aceh nampaknya mengharapkan kepada pihak sekolah untuk dapat mengintegrasikan pendidikan damai ke dalam kurikulum sekolah.

Hal ini dapat dipahami melalui satu ekspos berita media tentang lawatan guru-guru dari Thailand ke Aceh pada tanggal 15-17 November 2014. 34 guru Tadika (tingkat SD dan SMP) dari Patani, Thailand Selatan, berkunjung ke Aceh pada 15-17 November 2014. Lawatan mereka bertujuan untuk mempelajari bagaimana nilai-nilai Islam, kebudayaan Aceh, dan nilai-nilai perdamaian diintegrasikan dalam kurikulum sekolah. Menurut Kasi Kurikulum Disdik Aceh Zulbahri SPd MEd, kurikulum nasional dikelompokkan kepada dua bagian, yaitu kelompok A dan kelompok B.

Pada kelompok A meliputi sejumlah mata pelajaran wajib nasional seperti Pendidikan



Agama, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS. Sedangkan pada kelompok B, diberikan kewenangan kepada daerah untuk menentukan mata pelajarannya seperti pendidikan damai, kebencanaan, pendidikan Islami, sejarah Islam, keunggulan lokal, dan sejarah (ACSTF, 2014). Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa di kalangan elit pendidikan Aceh adanya ambiguitas pemahaman atau konsep mengenai pendidikan damai di Sekolah.

Secara de facto di lapangan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten tidak diberikan kesempatan untuk menjalankan pendidikan damai secara khusus. Mereka lebih dituntut untuk mensukseskan kurikulum nasional, dengan indikator tingkat kelulusan siswa pada ujian nasional tinggi. Akibatnya kurikulum 2013 yang menekankan pendidikan karakter pun kehilangan momentumnya dalam pembentukan karakter siswa. Kemampuan kognisi siswa masih tetap tumpuan utama sekolah dalam melaksanakan pendidikan.

Namun pada sisi lain, ketika ditanyakan oleh pihak luar Aceh yang ingin mempelajari pendidikan damai, dijelaskan seakan-akan sekolah di Aceh telah melaksanakan pendidikan damai secara langsung melalui satu mata pelajaran khusus. Kenapa pendidikan damai di Aceh terkesan "Dilihat boleh dipegang jangan". Artinya pada tataran diskusi dan wacana, pendidikan damai diakui baik, penting dan perlu dilaksanakan, tetapi pada tataran implementasi seperti tidak ada daya dan banyak hambatan yang tidak dapat ditanganinya.

Diantara penyebabnya adalah guru sebagai pemegang kuasa dalam pendidikan kurang wawasan mengenai struktur pendidikan Aceh (Zaman, 2016), sehingga mereka terjebak dalam struktur pendidikan nasional, yang dipahami telah menghambat kreatifitas mereka dalam mengembangkan materi kurikulum. Padahal struktur pendidikan pasca konflik harus berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan perdamaian dan kohesi sosial (Bush dan Saltarelli, 2000). Akibatnya pendidikan damai yang dilaksanakan di Aceh tidak berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia yang tidak mengalami konflik. Pendidikan damai dianggap sudah inklud dalam pendidikan agama, pendidikan Pancasila atau Kewarganegaraan.

Menurut Hidayatulloh (2019) integrasi perdamaian dan sistem pendidikan Indonesia hingga saat ini masih kurang, namun bagi Aceh pendidikan damai adalah perkara yang penting dilakukan sebagai bagian proses damai yang dapat mencegah konflik muncul kembali. Diantaranya yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengintegrasikan sistem pendidikan dengan Memorial Peradamaian yang telah dibuat oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat. Hal seperti ini telah dilakukan di Jepang dengan Nagasaki Atomic Bomb Museum and Nagasaki National Memorial Hall.

Pemerintah Nagasaki telah berhasil mengintegrasikan perdamaian dalam sistem pendidikan dengan melakukan beberapa program, seperti perjalanan sekolah tahunan ke Museum Bom Atom Nagasaki untuk mengadakan seminar dari orang-orang yang selamat bom atom. BAB VI PENDIDIKAN PERDAMAIAN PADA SEKOLAH MENENGAH DI ACEH TIMUR Materi Pendidikan Perdamaian dan Model Pembelajarannya Secara umum materi pendidikan damai yang diajarkan secara formal di sekolah menengah Aceh Timur adalah materi yang terdapat pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta mata pelajaran sosial lainnya seperti sosiologi.

Namun sebagian sekolah, materi kurikulum pendidikan perdamaian ditambah lagi dengan buku kurikulum pendidikan damai yang dikhususkan untuk Aceh. Buku manual ini merupakan kumpulan materi pendidikan damai yang disusun oleh akademisi UIN Ar-Raniry, yaitu; Dr. Asnah Husen, MA sebagai penanggung jawab, Dra. Anisah M. Daud, Drs, Hasan Yakob, Irwandi Zakaria, S. Ag, Mukhlisah, MA, Mussannurvan, S.HI, Dr. Nurjannah Ismail, MA. Judul buku yang dihasilkan adalah Aqidah Akhlak dalam Konteks Pendidikan Damai.

Secara umum materinya mencakupi Aqidah Akhlak dan nilai-nilai perdamaian, sehingga di beberapa sekolah buku tersebut menjadi pegangan para guru yang pernah ikut pelatihan pendidikan damai. Buku kurikulum/manual ini dapat dikatakan sebagai buku yang mengintegrasikan materi Aqidah Akhlak ke dalam pendidikan perdamaian. Penyusunan kurikulum tersebut disponsori oleh Unicef – AusAID, dan merupakan bagian dari buku ajar yang diberikan untuk siswa di sekolah-sekolah.

Buku Kurikulum Pendidikan Damai tersebut merupakan hasil revisi dari buku Kurikulum Pendidikan Damai yang disusun pada tahun 2002 ketika konflik Aceh sedang berkecamuk. Materi yang terdapat di dalam buku tersebut dibagikan kedalam enam bab yaitu: Introspeksi dan keikhlasan, cakupan materinya meliputi: aku mengaca diri, aku mengelola amarah, aku; maaf dan ketulusan, aku dan sikapku, mulutmu harimaumu. Hak dan Kewajiban, cakupan materinya meliputi: kami; hak dan Kewajiban, aku dan Pendidikan, kami dan pemerasan, negara; Tanggung Jawab kita. Pluralitas Ciptaan, cakupan materinya meliputi: Aku dan alam, kami hidup dalam keberagaman, kita: beda tapi sama.

Konflik dan Kekerasan, cakupan materinya meliputi: Aku dan konflik, kami: kesenjangan sosial, narkoba musuhku, mestikah kita tauran, kekerasan bukan jalan kami. Demokrasi dan keadilan, cakupan materinya meliputi: kita bernegosiasi, kami: kedamaian sosial, kita berdemokrasi, kami menghormati hukum, keadilan ekonomi dambaan kami. Jalan Menuju damai, cakupan materinya meliputi: Keluarga kami keluarga sakinah, kami

mendambakan solusi, solusi masalah kami, kami berempati, kami cinta damai.

Keseluruhan materi sengaja diintegrasikan agar tidak terjadi dualisme antara aqidah akhlak dan pendidikan perdamaian. Setiap materi memiliki benang merah yang saling terkait namun dirancang untuk dapat dipelajari secara terpisah setiap tatap muka. Susunan materi dilakukan dengan pertimbangan akademis dan psikologis. Namun demikian, pengintegrasian materi Aqidah Akhlak tidak sepenuhnya mengadopsi materi aqidah akhlak dari kurikulum Aqidah Akhlak yang disusun oleh kementerian Agama. Melampaui itu, pada kontennya materi yang disusun juga meliputi konteks keagamaan dan nilai-nilai keacehan.

Dengan demikian, jika didalami isi buku yang disusun bukan terbatas pada pengintegrasian Aqidah Akhlak dan pendidikan perdamaian yang umum berlaku pada materi Pendidikan Agama. Akan tetapi melampaui itu, isi materinya juga merangkumi kearifan lokal budaya Aceh. Sehingga setiap topik yang diajarkan selalu dikaitkan dengan hadih maja yaitu kata-kata bijak orang Aceh yang merupakan sastra lisan yang menjadi sumber nilai bagi masyarakat Aceh.

Hadih maja merupakan kalimat bijak yang disarikan dari pengalaman yang panjang, disajikan dalam bahasa yang indah, bersajak agar mudah diingat dan senang diucapkan. Dengannya masyarakat Aceh dapat menggambarkan identitas dan keunikan masyarakatnya. Walaupun diungkapkan dalam kalimat yang pendek, tetapi hadih maja mengandung makna filosofi yang dalam (Hakim, 2013). Hadih maja dicantumkan pada setiap bagian materi sebagai pendukung ayat al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan tema-tema yang dimaksudkan. Secara filosofis, Buku Kurikulum Pendidikan Damai tersebut dilandaskan pada nilai-nilai Islam yang berlaku universal. Misi Universal Islam adalah membawa rahmat bagi sekalian alam (al Anbiya: 107).

Rahmat yang dimaksudkan mengandung dua dimensi yaitu: Anugerah dari Allah dan ikhtiar dari manusia. Dua dimensi rahmat ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan keterkaitannya berada dalam rencana makro cosmic Allah tentang kehidupan, yang perlu dipahami dan dijaga agar terciptanya keseimbangan dan kedamaian. Untuk itu, konsep damai yang diusung meliputi empat dimensi yang saling terkait, yaitu damai vertikal (dengan Allah) damai dengan diri sendiri, damai dalam kehidupan sesama manusia dan damai dengan lingkungan alam.

Adapun topik materinya yaitu: Al-Qur'an cermin Hidupku, cakupan materinya meliputi: Aku menyukai Al-Quran, Al-Qur'an pedoman kami, Al-Qur'an dan pendekatan kemanusiaan, Al-Qur'an alam semesta, aku dan alam. Rasul Idolaku, cakupan materinya meliputi: Rasulku manusia pilihan, kami pelanjut pesan rasul, sifatku zuhud, kita menjaga

amanah, aku maaf dan ketulusan. Ilmu dan amal, cakupan materinya meliputi: mengapa tsunami, dampak tsunami dan solidaritas kita, adakah kasih sayang antara kita, mari menghormati sesama, kami berempati.

Amalan dan hari keadilan, cakupan materinya meliputi: amalan kita positif atau negatif, mari menggapai pahala, maut amat dekat, kiamat pasti datang, Syurga Yes Neraka No. Negatifitas Merugikan Bangsa, cakupan materinya meliputi: Fitnah mengancam kedamaian kita, bangsaku hancur karena KKN, aku menolak Hedonistik dan materialistik, kelirukah ta'awun kita. Kecakapan Hidup, cakupan materinya meliputi: Kami remaja terdidik, Ayo jadi orang bijak, kami generasi visioner, ayo menjadi pemimpin remaja, aku punya harga diri.

Hak dan Kewajiban, cakupan materinya meliputi: Kami; Hak dan kewajiban, Kita Hidup dalam keberagaman, Kita Beda tapi sama, Ada apa dengan media, cakupan materinya meliputi: mendidikkah media kita? Siaran favoritku di televisi, kekerasan televisi menyedihkanku. Permasalahan remaja kontemporer, cakupan materinya meliputi: Pergaulan bebas; No way, Pornografi menjatuhkan harga diri kita, Narkoba musuhku, Depresi bukan sahabatku. Introspeksi dan Konsep diri, cakupan materinya meliputi: aku mengaca diri, jangan takut dan cemas, aku mengelola amarah, kuatkan dirimu dalam kesedihan, aku dan sikapku.

Konflik dan damai, cakupan materinya meliputi: aku dan konflik, mulutmu harimaumu, kami mengelola konflik, kita berdemokrasi, kami cinta damai, agamaku agama damai. Materi-materi tersebut selain melibatkan tim penyusun juga melibatkan tim review yang terdiri dari berbagai macam lembaga pendidikan dan keislaman yaitu: Agustami, S. Pd (Guru SMAN 7 Banda Aceh) Drs, Arahman Hanafiah (Kasi Kurikulum Bidang MAPENDA Kanwil Depag, Provinsi Aceh). Dr. Azman Ismail, MA (Imam Besar Mesjid Raya Baiturrahman) H. Badruzzaman Ismail, SH, M. Hum (Ketua Majelis Adat Aceh) Dra, Chairan M. Nur, M.

Ag (Pengurus Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia) Prof. Darwis A. Sulaiman, MA., Ph. D (Ketua Majelis Pendidikan Aceh) Dr. Jailani AR, M. Pd (Direktur Pasca Sarjana FKIP Unsyiah) Drs. Gazali M. Syam (Kepala Kanwil Depag Prov. Aceh) Dra. Hamdiah A Latif, MA ( Dosen Fak. Tarbiyah). Moch. Fajarul Falah, MA ( Dosen Fak Tarbiyah, UIN Ar-Raniry) Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA ( Ketua MPU Aceh) Drs. Mustafa AB, MM (Kasi Kurikulum SMA Dinas Pendidikan Aceh) Dra. Rosmawardani (Hakim Pengadilan Agama Kota Banda Aceh) Materi – materi tersebut dibedakan kepada dua katagori yaitu materi pokok (MPK) dan materi pendalaman (MPN).

Sumber materinya digali dari al-Quran, sunnah Rasul, khaznah intelektual para ulama,

nilai sosiokultural masyarakat Aceh dan nilai-nilai universal yang berupa Hak Asasi Manusia dan Hak Anak. Sebagai contoh dari topik-topik tersebut di atas adalah Aku dan Konflik, merupakan bagian dari MPK dan Mulutmu Harimaumu merupakan materi MPN. Kedua materi tersebut diakhiri dengan wacana faktual dan atau fiksi di Aceh. Untuk semua materi, model pembelajarannya menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (pakem).

Selain materi pokok, pihak sekolah juga menyediakan referensi pendukung di perpustakaan untuk menambah wawasan guru dan siswa mengenai perdamaian, dan pendidikan perdamaian, baik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah maupun penerbit lainnya. Seperti buku "Damai itu Indah" Pendidikan karakter kumpulan Pengalaman Inspiratif, pedoman penciptaan suasana sekolah yang kondusif, konflik dunia ketiga dan keamanan dunia, politik dalam sebuah era anti politik, pendidikan untuk demokrasi, dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Untuk memotivasi siswa membaca referensi-referensi tambahan yang tersedia di perpustakaan sekolah, guru mensiasatinya dengan memberikan tugas, yang jawabannya terdapat pada buku-buku tertentu.

Dengan demikian siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan (tugas) dari guru dengan sendirinya harus membaca buku yang telah disebutkan oleh guru tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Zakaria Guru SMK N 1 Peureulak, yaitu: Untuk memotivasi siswa membaca buku-buku khususnya yang terkait dengan perdamaian saya memberikan tugas kepada siswa yang jawabannya memang ada dalam buku pegangan yang tersimpan dalam perpustakaan, dengan demikian siswa harus membaca buku tersebut baru dapat jawabannya. Cara ini terbukti efektif untuk meningkatkan minat baca di kalangan siswa (wawancara, Juli 2017).

Materi kurikulum pendidikan damai yang disusun sebagai materi untuk pelajaran Aqidah Akhlak pada mulanya diajarkan tersendiri sebagai satu mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh siswa. Namun, dalam perkembangannya guru mengajarkannya dengan mensisipkan ke dalam mata pelajaran lainnya, seperti Pelajaran Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarga-Negaraan (PPKN). Dalam hal ini, Zainab (Guru SMA Rantau Selamat Aceh Timur) menguraikan bahwa dari tahun 2002 sampai awal 2005 diajarkan kurikulum perdamaian secara tersendiri sebagai satu mata pelajaran dalam kurikulum formal.

Akan tetapi mulai tahun 2005 sampai saat sekarang, materi pendidikan perdamaian diajarkan dengan menyisipkan (mengintegrasikan) ke mata pelajaran agama. Pada saat ini kepala sekolah menganggap pelajaran pendidikan perdamaian tidak perlu lagi diajarkan secara tersendiri. Akan tetapi alasan pembatalan tidak diketahui secara jelas

oleh informan. Padahal pendidikan perdamaian yang diajarkan secara terpisah itu telah memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku siswa di sekolah.

Senada itu, Kepala SMA Rantau Selamat Aceh Timur juga menyatakan bahwa Pendidikan perdamaian akan lebih efektif jika diajarkan secara terpisah atau mata pelajaran pendidikan perdamaian dijadikan satu mata pelajaran dalam kurikulum. Sedangkan jika materinya diselipkan ke dalam mata pelajaran lain hanya bisa terserap 20-30 persen saja. Jika tidak ada guru yang berkompeten di sekolah untuk mengajarkannya, pihak sekolah dapat memanggil atau meminta guru-guru dayah/pesantren untuk mengajarkan pendidikan perdamaian (Wawancara dengan Zainal, 26 Juli 2017).

Selanjutnya, menurut guru SMA Rantau Selamat tersebut metode pembelajaran untuk mengajarkan pendidikan perdamaian dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu: metode ceramah di kelas, metode diskusi dan atau metode permainan, seperti melakukan permainan pesan berantai. Satu metode yang baik dan lebih efektif untuk pembelajaran pendidikan perdamaian adalah dengan cara pesan berantai. Namun ada juga metode pengajarannya yang tepat ketika proses pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas, yaitu dengan metode problem solving. Kalau di luar kelas metode aksi dan pesan berantai adalah lebih baik.

Namun demikian, menurut Zakaria (Guru SMK I Peureulak, Aceh Timur) memberikan pemahaman pendidikan perdamaian kepada siswa yang paling efektif adalah melalui pendekatan pendidikan agama. Melalui pendekatan agama siswa lebih mudah didekati, diajarkan dan dibina agar tidak terlibat dalam situasi konflik (Wawancara 27 Juli 2017). Berbeda dengan guru di SMA Rantau Selamat, Megawati (Guru SMK Fajar Harapan, Aceh Timur) menyebutkan bahwa pendidikan agama sudah mencakupi pendidikan perdamaian di dalamnya.

Selain itu, pendidikan perdamaian juga dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan kegiatan-kegiatan seni seperti Rohis (pengajian yasin bersama, pidato dan kajian Islami) (Wawancara, 26 Juli 2017). Selanjutnya, dalam penyelesaian masalah siswa di sekolah, pada masa konflik siswa yang terlibat konflik dengan kawannya atau gurunya atau tidak disiplin, penyelesaiannya tidak hanya melibatkan siswa sendiri, tetapi digunakan juga pendekatan dengan orang tuanya.

Dalam hal mendekati orang tua/wali anak (siswa) yang bermasalah, pihak sekolah melakukan dua cara, yaitu memanggil orang tua/wali siswa ke sekolah, dan pihak sekolah juga mendatangi ke rumah orang tua/wali siswa jika mereka tidak dapat memenuhi panggilan pihak sekolah (Wawancara dengan Zakaria, 27 Juli 2017) Zakaria

(Guru SMK I Peureulak, Aceh Timur) mendapat pelatihan pendidikan perdamaian pada tahun 2008 yang dilaksanakan oleh UNICEF. Setelah memperoleh pelatihan materi pendidikan perdamaian yang telah disusun oleh pihak penyelenggara diajarkan melalui mata pelajaran agama. Hal ini karena modul yang disusun telah dimasukkan dalam materi Aqidah Akhlak.

Untuk memudahkan pemahaman dan pengamalan oleh siswa metode pengajaran dilakukan dengan metode ceramah dan partisipasi aktif. Dengan teknik judul ditulis terlebih dahulu di papan tulis kemudian dikaitkan dengan ayat dan hadits selanjutnya diterangkan kepada siswa dan pada akhirnya siswa diminta tampil ke depan kelas dengan meperagakannya melalui aksi peran yang mengekspresikan materi yang diajarkan (wawancara 27 Juli 2017).

Menurut Zakaria, dalam materi mata pelajaran agama secara umum materi-materi yang terkandung dalam modul pendidikan perdamaian sudah terwakilkan, namun penjelasan secara khusus tentang perdamaian sangat diperlukan. Berdasarkan itu modul pendidikan perdamaian sangat penting bagi setiap guru yang diajarkan mata pelajaran agama khususnya bagi materi-materi Aqidah Akhlak. Dalam hal ini Tgk Zakaria menyebutkan modul pendidikan agama yang dibagikan oleh Unicef lengkap khusus untuk materi Akidah Akhlak.

Sementara Buku agama yang menjadi pegangan guru di sekolah memiliki empat aspek yaitu Fiqih, Tauhid, Tasawuf dan Aqidah akhlak namun isinya tidak terlalu mendalam. Untuk itu, guru agama di sekolah-sekolah semestinya harus menambah wawasan dengan pendidikan dayah, dan jangan merasa cukup dengan pendidikan agama yang diperoleh melalui perguruan tinggi selama kuliah. Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa para guru di Sekolah Menengah Atas di Aceh Timur memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami dan melaksanakan pendidikan damai di sekolah.

Namun demikian, hal ini sesuai dengan Bretherton, et al (2003) yang menyatakan pendidikan dapat diajarkan secara terpisah dan dapat pula diajarkan dengan disebarkan materinya ke pelajaran lainnya. "Peace education can be introduced as a separate subject, or spread across the curriculum, or be a whole-school approach. While a more holistic approach is to be preferred, the lack of a whole-school commitment should not stop individuals doing what they can towards making the school a more peaceful place.

Also, it is probably best to have a particular subject to start with so teachers and children can get a flavour of what specific skills, knowledge and experience are needed." Dampak Pendidikan Perdamaian Terhadap Interaksi Siswa Interaksi adalah suatu tindakan atau aksi yang terjadi sewaktu dua atau lebih objek mempengaruhi atau



memiliki efek satu sama lain. Objek yang saling mempengaruhi tersebut dapat berupa benda atau orang. Jika objek yang saling mempengaruhi itu orang, maka dapat dikatakan interaksi yang terjadi adalah interaksi sosial.

Dengan demikian Interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya. Interaksi sosial adalah bentuk umum dari proses sosial. Proses-proses sosial (sosial proses) diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama manusia, meliputi cara-cara berhubungan yang dilihat apabila perorangan dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem, serta bentuk-bentuk hubungan itu, dan perubahan. Interaksi siswa dengan siswa, siswa dengan guru dan siswa dengan masyarakat luas merupakan salah satu wujud interaksi sosial. Interaksi sosial menjadi syarat pokok terwujudnya aktivitas sosial.

Sebab interaksi sosial merupakan hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok maupun antara kelompok dengan kelompok. Interaksi bermula pada saat dua individu bertemu saling menegur, berjabat salam, saling berbicara atau bahkan diiringi dengan pertengkaran dan berkelahi. Suatu interaksi sosial dapat terjadi apabila ada kontak sosial dan komunikasi. Dari sinilah dapat tercipta suatu kerjasama (cooperation), persaingan (competition). Pertikaian (conflik) dan akomodasi (accomodation).

Secara ringkas bentuk-bentuk interaksi sosial dapat dijelaskan sebagai berikut :  
Kerjasama adalah bentuk interaksi sosial untuk mencapai suatu tujuan bersama, yaitu terdapatnya saling bantu membantu, tolong menolong yang biasanya hal ini dapat tercapai karena adanya pandangan umum yang sama atau komunikasi. Persaingan adalah bentuk perjuangan sosial yang terjadi antara dua belah pihak untuk mencapai keuntungan yang bersifat pribadi maupun kelompok. Bentuk persaingan ini antara lain (1) untuk memperoleh status tertentu dalam masyarakat, (2) persaingan dalam bidang kebudayaan, (3) persaingan karena perbedaan ras dan sebagainya.

Pertikaian merupakan interaksi masyarakat yang berusaha saling menjatuhkan, menghancurkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Hal ini disebabkan karena individu atau kelompok berusaha untuk mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan kekerasan. Di antara faktor penyebab pertikaian ini antara lain (1) perbedaan pendirian, (2) perbedaan kebudayaan, (3) perbedaan kepentingan.

Akomodasi menunjukkan suatu keadaan bahwa suatu pertikaian telah mendapat penyelesaiannya, sehingga suatu konflik menjadi tenang kembali meskipun mungkin

perbedaan-perbedaan itu tetap ada. Akomodasi membuka jalan tercapainya asimilasi (assimilation) yang ditandai dengan adanya usaha-usaha perorangan atau kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sosial dipengaruhi oleh berbagai macam faktor baik langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial terbagi dalam berbagai macam bentuk. Faktor-faktor ini bisa berwujud keinginan, kekaguman, dan juga perilaku meniru.

Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial tersebut yaitu: Imitasi, yaitu sebagai sebuah tiruan atau peniruan. Imitasi merupakan salah satu proses yang penting dalam interaksi sosial. Imitasi merupakan suatu kegiatan dalam meniru seseorang yang disukai atau menjadi idolanya baik tampilan fisik maupun tingkah lakunya. Sugesti, yaitu yang kita kenal sebagai tindakan mempengaruhi orang lain. Sugesti merupakan pandangan atau sikap seseorang yang kemudian diterima dan juga diikuti oleh orang lain. Sugesti ini biasanya dibawa oleh pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap orang lain, yang berwibawa dan dihormati, misalnya dokter maupun pejabat.

Simpaty, merupakan sikap tertarik pada pihak lain. Proses simpaty ini dapat berkembang apabila ada sikap saling pengertian diantara pihak-pihak yang bersangkutan. Identifikasi adalah proses meniru pihak lain, seperti imitasi. Perbedaan identifikasi dengan imitasi adalah bahwa identifikasi ini lebih mendalam daripada imitasi. Identifikasi adalah peniruan hingga pada tingkah laku dan juga cara berfikir seseorang agar sama persis dengan idolanya. Dalam proses identifikasi ini maka turut membentuk kepribadian seseorang. Identifikasi bisa terjadi karena disengaja maupun tanpa sengaja.

Empati adalah perasaan yang menempatkan diri kita seolah-olah berada di posisi seseorang atau kelompok tertentu yang sedang mengalami suatu perasaan tertentu. Pengertian dari empaty merupakan keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasikan dirinya dalam suatu keadaan perasaan ataupun pikiran yang sama persis dengan orang atau kelompok lain. Motivasi sering juga sebut sebagai semangat atau dorongan. Motivasi merupakan dorongan atau semangat yang diberikan kepada individu ke individu atau kelompok ke kelompok, maupun antara individu dengan kelompok.

Sikap kepada orang lain, yaitu sikap positif kepada orang lain akan sangat berpengaruh terhadap sikap orang lain kepada kita. Jadi apabila kita bersikap baik, maka respon yang akan kita dapatkan juga baik. Sebaliknya apabila kita bersikap buruk maka sikap orang kepada kita juga buruk. Semua ini merupakan kekuatan timbal balik. Bentuk-bentuk interaksi sosial siswa yang terbentuk di sekolah-sekolah terutama di Kabupaten Aceh Timur sebagaimana interaksi sosial secara umum juga dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu berupa sistem dari kegiatan belajar-mengajar di setiap sekolah. Sistem dari kegiatan belajar mengajar yang dimaksud adalah antara lain mata pelajaran dan materi-materi dari setiap pelajaran yang diajarkan dan diberlakukan di sekolah. Sistem tersebut dapat berupa metode pengajaran dari guru-guru, cara komunikasi, dan kontak sosial yang terjadi. Selain dari metode pembelajaran, pola interaksi siswa yang terbentuk disekolah-sekolah juga dipengaruhi oleh sistem penilaiannya.

Sistem penilaian, terutama untuk pengakuan terhadap prestasi siswa yang masih menerapkan sistem perangkingan dan pembagian dan pemberian status tertentu terhadap kelas yaitu seperti adanya kelas unggul dan lain-lain akan menghasilkan pola interaksi dalam bentuk disosiatif yaitu cenderung saling bersaing antar siswa. Dampak pendidikan perdamaian baik yang dilaksanakan secara langsung sebagai satu pelajaran dalam kurikulum sekolah maupun yang dilaksanakan secara tidak langsung melalui materi yang disisipkan pada pelajaran lain atau pendidikan non formal yang diperoleh diluar sekolah seperti tempat pengajian belum sepenuhnya memberikan hasil positif terhadap pola interaksi siswa.

Hasil observasi yang dilaksanakan dari tanggal 18 Juli 2018 sampai tanggal 30 Agustus 2018 pada beberapa sekolah, diketahui bahwa kontak dan komunikasi sosial guru dan siswa pada saat mengajar yaitu guru memang selalu memberikan salam dan pengantar pelajaran sebelum pembelajaran dimulai. Tahap pembuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan guru dalam awal kegiatan proses belajar mengajar siswa di kelas. Kegiatan ini menurut Zainuddin (2016) bertujuan untuk menciptakan pra kondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian siswa terfokus pada apa yang akan dipelajarinya sehingga akan memberikan efek positif bagi pemahaman materi yang diajarkan guru.

Hasil analisis angket, terungkap bahwa pada tahap ini hampir semua guru (90.9%) mengaku melakukan tahapan-tahapan pembuka dalam setiap memulai proses pembelajaran yang meliputi melakukan absensi kehadiran siswa, mencatat **siswa yang tidak hadir**, dan bertanya kepada siswa sampai dimana pembahasannya sebelumnya. Selain itu, dalam tahap pembuka ini juga, semua guru juga telah memberikan motivasi kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Seperti mendorong siswa untuk bertanya dan berdiskusi mengenai bahan pembelajaran yang belum dikuasainya.

Namun demikian, terdapat (55.5%) guru yang mengaku kadang-kadang tidak melakukan pengelolaan kelas dengan baik pada tahapan pembuka ini. Hal tersebut serupa dengan sisi persepsi siswa, bahwa ada sebagian guru yang selalu memulai proses pendahuluan di kelas, mendorong siswa untuk berperan secara aktif di kelas, melakukan

pengelolaan kelas dengan baik, merespons setiap pertanyaan yang diajukan siswa, dan memberikan penilaian terhadap tugas yang dikerjakan siswa.

Sementara sebagian lainnya jarang menyampaikan materi pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, memberikan model tes yang bervariasi dalam tugas sehari-hari dan memberikan tes remedial kepada siswa. Bahkan sebagian guru dalam pelaksanaan pembelajaran jarang memberikan senyuman, memandang siswa dengan penuh kehangatan ketika siswa melakukan tindakan yang baik saat pembelajaran berlangsung. Pada saat siswa melakukan sikap atau tindakan yang baik guru jarang memberikan apresiasi seperti menepuk pundak siswa, mengacungkan ibu jari, mengucapkan kata bagus, tepat sekali atau tepuk tangan.

Hal tersebut jarang dilakukan guru pada saat pembelajaran berlangsung. Selain itu, pembelajaran juga terkadang berjalan dengan kurang baik. Hal ini terlihat dari adanya siswa yang keluar masuk kelas, berbicara dengan siswa lain ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Untuk menunjang efektifitas proses belajar tentu diperlukan media-media pembelajaran, namun di beberapa sekolah masih ada guru yang tidak menggunakan media tambahan tersebut untuk membuat siswa bersemangat dalam belajar, hanya menggunakan papan tulis dan kapur tulis/spidol. Dengan demikian, membuat kondisi belajar menjadi kurang hidup, terlihat siswa kurang bersemangat ketika mengikuti pelajaran. Sementara, interaksi sosial antar siswa dengan siswa dalam pembelajaran sudah terjadi.

Hal ini nampak dari hubungan antar siswa dengan siswa dalam melakukan kontak sosial dan komunikasi sosial dalam pembelajaran berlangsung seperti saling bertanya antar siswa, dan mengeluarkan pendapat. Berlangsung interaksi sosial tersebut terjadi secara spontanitas atau tidak dalam bentuk yang sudah ditentukan guru seperti diskusi atau kerja kelompok. Interaksi yang dilakukan siswa seperti ini tentu memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak negatif akan muncul jika interaksi yang dilakukan saat pelajaran berlangsung siswa membicarakan persoalan-persoalan lain diluar topik atau materi pembelajarannya. Bentuk interaksi siswa juga dipengaruhi oleh lingkungan dimana sekolah tersebut berlokasi.

Di Aceh secara umum, faktor tersebut salah satunya yang memiliki pengaruh besar terhadap pola interaksi siswa yaitu konflik antar pihak seperti konflik antara GAM dan Pemerintah RI. Konflik antara GAM dan RI di Aceh telah mempengaruhi proses sosial dalam kehidupan masyarakat Aceh termasuk juga para siswa atau pelajar. Konflik tersebut telah mempengaruhi pola interaksi dilingkungan sekolah, baik antar siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Bentuk atau pola interaksi siswa pada saat itu cenderung mengarah kepada bentuk interaksi disosiatif.

Faktor yang mempengaruhi pola interaksi seperti itu adalah salah satunya disebabkan oleh faktor imitasi yaitu meniru perilaku dari tokoh yang mereka idolakan saat itu yaitu orang-orang GAM yang memiliki perilaku egosentris dan tidak sopan. Kondisi tersebut seperti dijelaskan oleh salah satu informan berikut: Pada saat itu siswa-siswa banyak yang membantah guru dan tidak mentaati terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah, seperti baru jam 10 pagi para siswa sudah pulang, lebih parah lagi ada siswa yang menulis kalimat-kalimat yang tidak sopan dan sangat provokatif serta bernada intimidasi seperti "Jawa Koh Takue (suku Jawa harus dipotong lehernya)" di papan tulis yang ada di depan kelas.

Perilaku negatif lain dari siswa saat itu adalah mereka menuntut untuk diluluskan walaupun mereka tidak disiplin seperti jarang atau tidak masuk kelas. Siswa pada saat itu juga meminta para guru untuk mengajar dengan menggunakan bahasa Aceh (Zainab, Guru SMA Rantau Selamat Aceh Timur, Wawancara, 19 Juli 2018). Secara umum, permasalahan interaksi siswa di sekolah adalah interaksi sosial antar siswa. Tingkah laku siswa dalam interaksi sosial yang ditampilkan di sekolah terhadap teman sebaya haruslah baik, seperti saling bekerja sama, saling menghargai, saling membantu, dan saling menghormati.

Namun tidak dapat dinafikan, di sekolah-sekolah biasanya masih terdapat siswa yang tidak dapat bekerja sama dalam kegiatan sekolah dengan teman sebayanya dengan baik, ada siswa yang kurang diterima di kelas dalam kelompok belajarnya, pemalu dalam mengutarakan pendapatnya, tampil ke depan umum atau kelas karena takut salah dan dicemoohkan oleh teman-temannya, siswa tidak mau membantu teman yang mengalami kesulitan dalam pemahaman materi pelajaran, ada siswa yang suka menyendiri dengan tidak mau bergabung bermain dengan teman sebayanya dan membentuk kelompok-kelompok kecil dalam pergaulannya di kelas.

Namun demikian, kondisi wilayah Aceh yang sudah kondusif dan damai serta adanya pendidikan perdamaian yang diterapkan pada sekolah pada saat ini telah merubah bentuk interaksi tersebut ke arah yang lebih baik. Sikap dan perilaku negatif dari siswa yang terjadi pada masa konflik, sekarang berangsur-angsur berkurang dan bahkan dapat dikatakan tidak ada lagi setelah pendidikan perdamaian diajarkan di sekolah (Zainab, Guru SMA Rantau Selamat Aceh Timur, Wawancara 29 Agustus 2018). Hal senada juga diungkapkan oleh guru di SMKN 1 Peureulak, pendidikan atau materi pendidikan perdamaian yang diperoleh siswa selama ini sudah berdampak pada berkurangnya permasalahan-permasalahan tersebut.

Sekolah-sekolah di Aceh Timur, interaksi siswa yang negatif seperti digambarkan di atas

hampir tidak ada. Hasil wawancara dengan Fatimah guru sekolah SMKN I Peureulak yang dilakukan pada tanggal 14 Mei 2018, menjelaskan bahwa "Secara umum siswa-siswa disekolah kami sudah menerapkan prinsip-prinsip pendidikan perdamaian khususnya perdamaian dengan sesama mereka dan juga dengan para guru. Mereka tidak pernah mengucilkan teman-teman mereka yang berbeda suku atau yang minoritas".

Menurut seorang guru MAN I Idi Rayeuk, pengaruh baik-tidaknya serta bentuk-bentuk interaksi yang terjadi di sekolah baik interaksi sosial siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan siswa disekolah lain serta siswa dengan lingkungan selain dipengaruhi oleh pelajaran pendidikan perdamaian yang diterapkan juga dipengaruhi oleh kondisi keamanan dan kenyamanan daerahnya. Pasca damai antara GAM dan pemerintah RI, interaksi siswa juga ikut membaik. Interaksi yang tadinya berbentuk disosiatif menjadi interaksi yang sosiatif. Muqaddar menyebutkan: Di sekolah kami, sejak dulu tidak ada konflik atau kekerasan yang terjadi dikalangan siswa.

Jikapun ada hanya masalah-masalah kecil yang tidak mengganggu atau merembet ke seluruh siswa yang lain. Untuk menyelesaikan masalah yang ada, biasanya ditangani oleh guru kelas terlebih dahulu, jika tidak selesai baru naik ke walikelas, dan jika tidak selesai juga baru dinaikkan ke kepala sekolah. Pemahaman nilai-nilai agama yang diajarkan untuk menjelaskan tentang keberagaman sangat efektif untuk meredam dan mencegah terjadi konflik-konflik antar siswa.

Selama ini siswa-siswa juga sangat toleran terhadap siswa lain yang berbeda suku, mereka tidak pernah mengucilkan dan membuli teman mereka tersebut. (Wawancara pada tanggal 12 Mei 2018). Pada era damai interaksi antar siswa, siswa dengan guru, guru dengan orang tua siswa telah mengalami perubahan ke arah lebih baik. Muqaddar (Guru Madrasah Aliyah Negeri Idi Rayeuk, Aceh Timur) menjelaskan seperti nyanyian perang sabil untuk membakar semangat perjuangan dan patriotisme sudah tidak terdengar lagi, para siswa sekarang tidak hafal lagi nyanyian hikayat perang sabil.

Mereka sekarang sudah mulai bangga menjadi warga negara Indonesia. Setelah lama hidup dalam situasi perang masyarakat merasa sangat jenuh dengan situasi perang tersebut. Kini masyarakat ingin menikmati kehidupan baru yang penuh dengan kedamaian. Menariknya persaingan sehat dalam pendidikan anak-anak telah mulai kelihatan. Anak-anak juga telah berfikir positif. Misalnya, jika terdapat salah satu keluarga dalam masyarakat yang menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi, usaha tersebut akan diikuti oleh tetangganya, (Wawancara, 11 Mei 2018).

Selanjutnya Muqaddar juga menyebutkan terdapat dua faktor penyebab perubahan

interaksi sosial dalam institusi pendidikan hari ini. Pertama, tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Pemahaman tersebut menyebabkan pendidikan menjadi institusi terhormat kerana masyarakat memerlukannya. Dampak positif turut dirasakan oleh guru, yaitu dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kedua, perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan sudah lebih baik.

Pemerintah telah memberikan kesejahteraan yang memadai kepada guru seperti memberikan gaji pokok, gaji ke tiga belas, tunjangan hari raya serta dana sertifikasi (Wawancara, 11 Mei 2018). Menurut teori Perubahan yang dikembangkan oleh Homans, interaksi sosial pada umumnya terjadi kerana perkiraan untung-rugi. Pihak yang berinteraksi pada umumnya sentiasa menghitung keuntungan ataupun kerugian pada dirinya dampak dari pada interaksinya dengan orang lain (Ritzer et.all, 2004).

Para guru, siswa, dan orang tua siswa melihat kejadian perang tidak mendatangkan keuntungan terhadap dunia pendidikan. Tiba masanya kini bangkit untuk menikmati kehidupan baru dan meningkatkan mutu pendidikan yang telah jauh tertinggal. Sosialisasi damai yang dijalankan oleh pemerintah kerjasama dengan pihak sekolah ternyata memberikan manfaat sangat besar dalam kehidupan para siswa Aceh pada hari ini. Kegiatan sosialisasi damai di sekolah biasanya dilaksanakan pada hari senin bersamaan dengan pelaksanaan upacara bendera.

Selain itu, program peace education dari dinas pendidikan dengan kerjasama UNICEF turut dilaksanakan di sekolah (Zulfawani, Guru Madrasah Aliyah Negeri I Idi Aceh Timur, wawancara 11 Mei 2018). Zulfawani menambahkan, pemerintah daerah bekerjasama dengan Kepolisian mengirim utusannya ke sekolah-sekolah untuk menjadi pembina upacara dan sekaligus menyampaikan amanat damai. Amanat damai berbentuk nasihat tersebut ternyata memberi implikasi sangat berguna dalam mengubah pola interaksi di lingkungan sekolah.

Akibatnya menurut Zulfawani, setelah perang berakhir keadaan Aceh dan interaksi sosial dalam institusi pendidikan berubah secara total. Penyebab utama perubahan positif tersebut adalah situasi damai itu sendiri. Kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan pada masa perang dulu sekarang sudah dapat dilaksanakan kembali. Misalnya, pada masa konflik, GAM mengharamkan guru dan siswa membaca Teks Pancasila, menghormat bendera Indonesia, dan bahkan mengharamkan melaksanakan upacara bendera di sekolah.

Namun setelah damai, banyak petinggi GAM menjadi pemimpin pemerintahan di Aceh, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, sehingga mereka harus melakoninya apa yang pernah diharamkan semasa perang. Setiap kegiatan upacara mereka bertindak



sebagai pembina upacara dan memberikan penghormatan kepada bendera merah putih yang dulunya mereka haramkan. Hal ini telah membuat mind set masyarakat berubah secara total dan tidak lagi percaya terhadap doktrin GAM. Dari pembahasan di atas, terlihat jelas bahwa pasca damai telah terjadi perubahan interaksi sosial dalam institusi pendidikan.

Diantara penyebabnya dapat dikategorikan kepada 6 (enam) faktor, yaitu: Situasi Aceh yang telah damai. Keadaan daerah yang aman dapat merangsang tumbuhnya faktor-faktor lain dalam mengubah pola interaksi dalam institusi pendidikan di Aceh. Hasil kajian mendapati bahwa informan menyokong pernyataan, perdamaian menjadi kunci utama berubahnya interaksi sosial dalam institusi pendidikan. Perhatian Negara terhadap pendidikan telah meningkat melalui perdamaian. Misalnya, pembangunan infrastruktur pendidikan sudah dapat dilaksanakan. Sedangkan sebelum damai hal ini tidak dapat dilaksanakan kerana takut terhadap berbagai ancaman.

Selain itu, dengan wujudnya perdamaian juga tumbuh kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Apresiasi pemerintah terhadap guru dan pelajar semakin baik. Masyarakat yang sudah lama hidup dalam konflik dapat membandingkan keadaan kehidupan masa dahulu dengan masa damai kini. Kenyataan ini dapat dikatakan perdamaian telah memainkan peranan yang amat penting dalam menyokong perubahan sosial di Aceh, dan selaras dengan konsep Homan dan sekaligus sedikit mengimprovasi teori perubahan yang dikembangkan oleh Homan.

Artinya perubahan interaksi sosial pada institusi pendidikan dapat disebabkan juga oleh situasi lingkungan. Sementara Homan telah melandaskan untung rugi sebagai acuan dasar dalam interaksi sosial. Wujud kesadaran para pihak akan pentingnya pendidikan (guru, siswa, masyarakat dan negara). Hal ini berarti bahwa semua pihak sudah dapat berpikir secara rasional dan meletakkan pendidikan di tempat yang sewajarnya. Jika hal ini dilihat dengan menggunakan teori perubahan maka proposisi rasionaliti (the rationality proposition) juga telah memainkan peranan amat penting dalam mewujudkan interaksi harmoni dalam institusi pendidikan.

Persepsi mengenai tinggi atau rendah peluang sukses ditentukan oleh keberhasilan pada masa lalu berbanding kini. Pada masa lalu, interaksi sosial terjadi secara tidak baik sehingga menyumbang kepada keadaan negatif. Interaksi demikian ini tidak menguntungkan berbagai pihak. Orang yang ingin sukses akan berfikir secara rasional apakah tindakannya dapat dilakukan atau tidak. Rasionalitas diletakkan sebagai pertimbangan dalam menentukan setiap keputusan. Pada era damai perhatian negara terhadap pendidikan di Aceh semakin baik. Hal ini dibuktikan dengan besarnya anggaran dana yang dialokasikan oleh pemerintah dalam sektor pendidikan. Semua

pihak turut merasakan manfaatnya.

Sekolah yang dibakar pada era perang dapat dibangun kembali melalui dana tersebut. Pihak pelajar juga menerima manfaat besar melalui keprihatinan pemerintah (negara) dalam sektor pendidikan. Siswa kurang mampu dan korban konflik mendapat bantuan pendidikan dari pemerintah yang diberikan setiap tahun. Ketika pelajar telah diberikan berbagai kemudahan, orang tua siswa yang taraf ekonominya rendah sangat menghargai bantuan tersebut. Keluarga yang taraf ekonominya tinggi dan anak mereka berprestasi di sekolah juga mendapat manfaat. Anak mereka dapat mengurus biasiswa berprestasi.

Jika hal ini dianalisis dengan menggunakan teori perubahan, maka proposisi nilai (The value proposition) telah menyumbang ke arah perubahan interaksi dalam institusi pendidikan. Hal ini kerana dengan diberikan hadiah (uang sertifikasi, wang minum, biasiswa berprestasi, biasiswa kurang mampu, dan lainnya) kepada guru dan pelajar telah mengubah pandangan semua pihak terhadap pemerintah (negara). Perang Aceh dengan pemerintah Indonesia berlangsung selama hampir 30 tahun (1976-2005), keadaan ini membuat masyarakat Aceh jenuh hidup dalam konflik berpanjangan. Tidak ada keuntungan diperoleh melalui konflik yang lama tersebut.

Hanya kerugian dialami dalam semua bidang. Homans menyusun proposisi kerugian - kejemuhan (the deprivation – satiation proposition) sebagai berikut: Makin besar keuntungan yang diterima seseorang sebagai hasil tindakannya, makin besar kemungkinan ia melaksanakan tindakan itu. Model interaksi masa konflik telah ditinggalkan digantikan dengan model interaksi yang baru yaitu interaksi era damai. Keuntungan yang diterima dari perubahan interaksi dalam institusi pendidikan pada masa damai semakin besar.

Sehubungan dengan itu orang ingin terus mempertahankan model interaksi masa damai kerana telah terbukti keuntungannya. Sosialisasi damai yang dilakukan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak sekolah dan lembaga swasta yang ternyata memberi dampak positif dalam mewujudkan interaksi sosial ke arah positif. Amanat perdamaian yang dilakukan oleh pihak sekolah melalui upacara dan nasihat berguna memberi pengaruh nyata dalam mewujudkan perubahan interaksi di bawah institusi pendidikan. Individu dalam masyarakat ingin membina kehidupan baru.

Perdamaian telah menciptakan stabilitas keamanan di Aceh. Institusi-institusi sosial telah bangkit dari kehancuran akibat perang. Masyarakat sudah jenuh hidup dalam konflik dan ingin menikmati kehidupan baru yang lebih baik. Guru, pelajar dan orang tua pelajar telah memiliki persepsi sama dalam mewujudkan kehidupan berkualitas untuk

kehidupan baru yang lebih baik di masa akan datang. Keenam-enam faktor telah dijelaskan sebagai penyebab terjadinya perubahan interaksi sosial dalam institusi pendidikan.

Kehidupan era perang yang penuh dengan kecurigaan, kebencian, menghindari satu sama lain, brutal dan violent dapat berubah pada era damai menjadi sebuah interaksi positif. Interaksi positif adalah seperti saling percaya satu sama lain, interaksi bersantun, dan cinta damai. Perubahan interaksi dalam institusi pendidikan dicapai setelah melalui masa yang sangat panjang dan tantangan yang sangat hebat. Kehidupan harmoni dapat wujud kerana jaringan sosial dalam institusi pendidikan (guru, pelajar, masyarakat, negara) telah mengubah pola interaksi mereka.

Hal ini tidak mengabaikan aspek perdamaian yang lahir setelah pencapaian kata sepakat damai antara pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki Finlandia. Evaluasi Implementasi Pendidikan Perdamaian pada Sekolah Menengah Atas di Aceh Timur Pendidikan perdamaian bertujuan menghilangkan kekerasan dalam segala bentuk, kekerasan fisik, kekerasan struktural dan kekerasan budaya. Sehingga terwujud budaya damai, baik di lembaga pendidikan maupun dalam masyarakat secara umum. Namun demikian, kekerasan merupakan salah satu permasalahan yang masih sering terjadi di kalangan masyarakat, terutama kaum perempuan dan anak-anak.

Kekerasan terhadap anak umumnya sering terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan tempat bermain. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhannya secara memadai. Sebaliknya mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapaun atau pihak manapun. Di lingkungan sekolah, tindak kekerasan terhadap peserta didik dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu tindak kekerasan oleh pendidik pada peserta didik dan tindak kekerasan antar peserta didik (bullying).

Kekerasan oleh pendidik pada peserta didik biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu: Kurangnya pengetahuan pendidik bahwa kekerasan itu tidak efektif untuk memotivasi peserta didik agar merubah perilaku. Adanya tekanan kerja pendidik yang harus dipenuhi oleh pendidik seperti kurikulum, materi, dan prestasi yang harus dicapai, sementara kendala yang dihadapi cukup besar. Pola yang dianut pendidik adalah mengedepankan faktor kepatuhan dan ketaatan pada peserta didik dan pengajaran satu arah (dari pendidik ke peserta didik). Mutatan kurikulum yang menekankan pada kemampuan kognitif dan cenderung mengabaikan kemampuan afektif.

Dari faktor-faktor penyebab di atas, tekanan kerja dan pola yang dianut pendidik merupakan faktor yang dominan terjadinya tindak kekerasan terhadap peserta didik. Tekanan kerja dapat membuat stress pendidik, sehingga pendidik tidak dapat mengendalikan emosinya ketika menghadapi peserta didik yang bermasalah. Pola yang dianut pendidik yang hanya mengedepankan faktor kepatuhan dicerminkan dalam bentuk pendisiplinan yang kurang tepat yaitu dalam bentuk tindak kekerasan verbal maupun non-verbal. Kekerasan antar peserta didik (Bullying) banyak sekali faktor penyebabnya.

Umumnya, siswa melakukann bullying karena merasa tertekan, terancam, terhina, dendam dan sebagainya. Faktor dari keadaan lingkungan yang membentuk kepribadian anak menjadi agresif dan kurang mampu mengendalikan emosi misalnya lingkungan rumah/keluarga yang tidak harmonis yaitu sering terjadi pertengkaran antara suami istri yang dilakukan di depan anak-anak, atau sering terjadi tindak kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, anak yang terlalu dikekang atau serba dilarang atau anak yang diakukan permisif juga menjadi penyebab terjadinya bullying di sekolah.

Selain lingkungan rumah, lingkungan sekitar juga sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku bullying ini, misalnya anak yang hidup pada lingkungan orang yang sering berkelahi atau bermusuhan, berlaku tidak sesuai dengan norma yang ada, maka anak akan mudah meniru perilaku lingkungan itu dan merasa tidak bersalah. Lingkungan sekolah juga bisa menjadi faktor penyebab anak melakukan bullying, misalnya guru yang berbuat kasar kepada siswa, guru yang kurang memperhatikan kondisi anak baik dalam sosial ekonomi maupun dalam prestasi anak atau perilaku sehari hari anak di kelas atau di luar kelas bagaimana dia bergaul dengan teman-temannya. Teman yang sering meledek dan mengolok-olok, menghina, mengejek dan sebagainya.

Hasil kajian lembaga pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam kurun waktu 2016-2017, Aceh Timur merupakan daerah dengan tingkat kekerasan terhadap anak yang tergolong rendah dibandingkan dengan daerah lainnya sebagaimana terlihat pada gambar 4.1 berikut ini: /Sumber: Publikasi P2TP2A, 2017  
Gambar 4.1: Grafik Data Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2016-2017 di Aceh. Kasus kekerasan terhadap anak umumnya dalam bentuk kekerasan pelecehan seksual. Saiful Bahri dan Fajriani (2015) menyatakan bahwa tingkat kekerasan pelecehan seksual di Aceh dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan. Akan tetapi hasil kajian menunjukkan bahwa di Aceh Timur kasus tersebut justru mengalami peningkatan.

Kabupaten Aceh Timur merupakan daerah yang tingkat kekerasan seksual termasuk dalam katagori tinggi. Rincian lebih jelas mengenai tingkat kekerasan seksual di Aceh

tersebut dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini: / Sumber: Saiful Bahri dan Fajriani, 2015 Grafik 4.2: Grafik Data Kasus Pelecehan Seksual di Aceh Tahun 2013-2014. Korban pelecehan seksual sebagian besar merupakan pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah. Pelaku pelecehan umumnya merupakan orang-orang yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan korban, seperti; paman, tetangga, teman, guru dan lainnya.

Kenyataan tersebut mengesankan pendidikan yang berlangsung belum sepenuhnya berbasis pendidikan damai, atau pendidikan damai kurang efektif dalam pembentukan karakter bangsa yang cinta damai. Pendidikan perdamaian secara khusus bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mengeksplorasi konsep kedamaian, cara mengatasi berbagai kendala dalam menciptakan kedamaian baik secara individu ataupun dalam masyarakat, serta berupaya memecahkan konflik yang terjadi melalui cara-cara yang non-kekerasan, dan studi yang komprehensif mengenai cara dan pendekatan yang harus ditempuh untuk membina alternatif masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Pendidikan perdamaian merupakan komponen penting dalam praktik pendidikan. Pendidikan perdamaian pada dasarnya adalah suatu proses pemerolehan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk merubah perilaku peserta didik dari anak-anak sampai dewasa agar senantiasa menghindari terjadinya konflik dan kekerasan pada lingkungannya, dan kemudian mampu untuk meredam konflik secara damai, dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi upaya terciptanya kedamaian, baik secara intrapersonal, interpersonal, intergrup, pada tingkat nasional maupun internasional.

Dengan demikian pendidikan perdamaian adalah pendidikan yang mengajarkan anti-kekerasan, nilai-nilai kerukunan dan kebersamaan, kepercayaan (trust), keadilan, dan kerja sama seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, materi Pendidikan Perdamaian harus dikembangkan dalam bentuk materi yang mengarahkan pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik melalui metode yang dinamis agar terarah dalam pengajaran di lingkungan sekolah. Pengembangan materi tersebut diantaranya merujuk kepada tujuan pendidikan perdamaian sebagaimana dinyatakan oleh UNESCO atau menurut pendapat para ahli dengan mengarahkan pada aspek kognitif, afektif, dan keterampilan.

UNESCO menjabarkan materi pendidikan perdamaian dalam aspek kognitif meliputi mawas diri, pengakuan tentang prasangka, konflik dan perang, damai tanpa kekerasan, lingkungan dan ekologi, nuklir dan senjata, keadilan dan kekuasaan, teori resolusi, pencegahan dan analisis konflik, budaya, ras, gender, agama isu HAM, sikap tanggung

jawab, pengaruh globalisasi masalah buruh, kemiskinan dan ekonomi, hukum internasional dan mahkamah keadilan, PBB, dan jual beli obat terlarang. Aspek afektif meliputi kesadaran ekologi, penghormatan diri, sikap toleransi, hormat terhadap martabat manusia dan perbedaan, saling memahami antar-budaya, kepekaan jenis kelamin, sikap peduli dan empati, sikap rekonsiliasi dan tanpa kekerasan, tanggung jawab sosial, solidaritas, resolusi berwawasan global.

Aspek keterampilan meliputi komunikasi, kegiatan reflektif dan pendengaran aktif, kerja sama, empati, berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah, apresiasi nilai dan estetika, kemampuan menengahi sengketa, negosiasi dan resolusi konflik, sikap sabar dan pengendalian diri, kepemimpinan ideal dan memiliki visi. Atas dasar itu, pendidikan perdamaian di Aceh, dan khususnya di Aceh Timur perlu direstrukturasi agar tujuan pendidikan perdamaian dapat dicapai, sehingga kekerasan tidak menjadi momok bagi perkembangan generasi yang berperadaban.

Pemerintah daerah perlu ikut serta dalam memberikan fasilitas pendidikan yang layak untuk pendidikan perdamaian agar tujuan pendidikan perdamaian dapat tercapai secara maksimal. Pihak eksternal seperti UNICEF, UNDP, bahkan LSM lainnya telah berupaya untuk membantu Pemerintah Daerah/Kota dalam memprogramkan pendidikan damai, program ini pada nyatanya tidak dapat terimplementasi secara optimal dan bahkan mengalami stagnasi. Permasalahan-permasalahan yang menghambat implementasi program pendidikan damai secara optimal di berbagai daerah termasuk Aceh, yaitu hal yang bersifat teknis dan substantif.

Secara teknis, beberapa aspek yang menghambat seperti training guru, implementasi kebijakan, kurikulum, koordinasi serta monitoring dan evaluasi. Secara substantif, pemerintah lokal sendiri belum sepenuhnya berkomitmen untuk mewujudkan perdamaian jangka panjang, sehingga tidak terlalu menganggap program ini sebagai suatu kebutuhan. Kedua hal inilah yang kemudian menjadi penghambat berkembangnya program pendidikan damai secara umum.

Oleh sebab itu, pemerintah, stakeholders, maupun pihak-pihak terkait lainnya harus meningkatkan kualitas perencanaan program ini, agar dapat terimplementasi dengan baik dan juga yang tidak kalah pentingnya bagaimana mereka dapat berkomitmen untuk mewujudkan perdamaian berkelanjutan di Aceh khususnya Aceh Timur.. Permasalahan lainnya adalah bagaimana pendidikan perdamaian itu dilaksanakan atau diimplementasikan. Pendidikan perdamaian sebenarnya dapat dilakukan melalui: (1) pendidikan informal yaitu diimplementasikan dalam kehidupan praktis sehari-hari di dalam keluarga, di masyarakat dengan proses habituasi, dan keteladanan atau dengan caranya masing-masing; (2) Pendidikan perdamaian juga dapat diajarkan melalui

pendidikan formal di setiap jenjang pendidikan dengan memperhatikan tingkat berpikir dan materi pembelajaran yang beragam.

Di sekolah-sekolah, pendidikan perdamaian dapat disajikan sebagai mata pelajaran sendiri atau di implementasikan melalui pengintegrasian materi pendidikan perdamaian dalam pelajaran lain (misalnya pelajaran agama, PPKn dsb) dan melalui isu-isu dengan mengangkatnya sebagai topik diskusi atau sebagai Kurikulum extra Kurikuler sekolah. Jika pendidikan perdamaian diposisikan sebagai suatu mata pelajaran yang terpisah, maka akan mengakibatkan peserta didik merasa terbebani dengan bertambahnya mata pelajaran, begitu juga dengan kurikulum sekolah yang tidak lagi memberikan ruang untuk menambah mata pelajaran diluar yang sudah ditentukan dalam kurikulum nasional yang berlaku sekarang ini (Kurikulum 2013).

Oleh karena itu, pendidikan perdamaian lebih baik diintegrasikan pada mata pelajaran lain seperti pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Meskipun sebenarnya tidak hanya Pendidikan Agama Islam dan PPKN yang dapat diisi dengan pendidikan perdamaian, akan tetapi relevansi antara materi pendidikan perdamaian sangat cocok dengan pelajaran tersebut terutama pada ranah afektif. Alasan tersebut juga diperkuat oleh pendapat Yuyun (guru SMA N 1 Rantau Selamat), Implementasi pendidikan perdamaian yang diterapkan selama ini dengan menggabungkan materi kedalam beberapa mata pelajaran khususnya pelajaran agama dan ppkn sudah baik, namun jika di buat mata pelajaran terpisah lebih bagus lagi. Masalahnya sekarang dengan kurikulum 13, sulit untuk memasukkan mata pelajaran tersebut karena kurikulum yang ada sudah sangat penuh. Bahkan untuk pelajaran muatan lokal saja sudah dihapus.(Wawancara pada tanggal 11 Mei 2018) Fatimah dan Nurul Aswad (Guru SMK N I Peureulak) juga berpendapat bahwa: Secara umum siswa-siswa di sekolah kami sudah menerapkan prinsip-prinsip pendidikan perdamaian khususnya perdamaian dengan sesama mereka dan juga dengan para guru. Mereka tidak pernah mengucilkan teman-teman mereka yang berbeda suku atau yang minoritas. Akan tetapi jika perdamaian dengan lingkungan seperti dalam hal menjaga tanaman-tanaman mereka masih sangat kurang.

Jika mereka tidak dipaksa atau disuruh untuk menyiram tanaman misalnya, mereka tidak akan melakukannya. Jadi, walaupun pendidikan perdamaian tidak menjadi pelajaran tersendiri, tentu perlu memasukkan materi khusus terkait pendidikan perdamaian dalam pelajaran lain terutama dalam pelajaran PPKN dan Pendidikan Agama Islam (Wawancara, pada tanggal 14 Mei 2018) Mengimplementasikan pendidikan perdamaian melalui pelajaran PPKN misalnya, perlu memperhatikan beberapa hal.

Tiga komponen dalam pendidikan biasanya mencakup knowledge (pengetahuan) dalam



pelajaran PPKN, salah satu komponennya adalah pengetahuan tentang sejarah, Pancasila, aspek yuridis Pancasila dan aspek filosofis Pancasila. Dengan menggumuli pengetahuan itu diharapkan siswa memiliki/menguasai pengetahuan itu. Kemudian komponen kedua yaitu skills (ketrampilan) misalnya diperkenalkan dengan berbagai permasalahan bangsa dan diperkenalkan dengan ketrampilan berpikir kritis, kreatif, sehingga siswa mampu trampil) berpikir kritis atau berpikir kreatif untuk memecahkan masalah kehidupan berbangsa.

Komponen yang ketiga ialah virtue (nilai-nilai, karakter) yang dapat dibiasakan dalam proses pembelajaran seperti karakter hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, kejujuran, menghargai sesama (respect) dan kebhinekaan, toleransi dll. Mengintegrasikan Pendidikan Perdamaian melalui Pendidikan PPKN, minimal ada dua permasalahan yang perlu dipertimbangkan yaitu: (1) Masalah memilih isi materi dan mengintegrasikannya. Dalam hal ini, sejauhmana guru mampu memilih aspek dan unsur Pendidikan Perdamaian yang relevan dengan isi dan topik mata pelajaran serta bagaimana menemukan unsur-unsur dalam PPKN yang diajarkan sehingga pembelajaran bermakna bagi peserta didik kaitannya dengan pendidikan Perdamaian; (2) Masalah dalam proses membangun pemahaman.

Di bagian ini yang perlu diperhatikan yaitu "bagaimana guru dapat menggunakan frame of reference dalam pendidikan perdamaian yang bisa dikembangkan sebagai perspektif ilmiah untuk mendekati persoalan/isu berbangsa dan bernegara, serta memilih aspek (teori, metode, prinsip, strategi) dalam pendidikan perdamaian untuk membantu siswa memahami persoalan (isu) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengintegrasian pendidikan perdamaian ke dalam mata pelajaran lain dapat dilakukan melalui persiapan pengajaran dengan cara menyiapkan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, sumber belajar seperti buku, koran, berita TV.

Pengintegrasian pendidikan perdamaian juga dapat melalui metode pembelajaran, media dan evaluasi dilakukan dengan cara memberikan kebebasan pada siswa bekerjasama, berpendapat, berpikir kritis, berkeaktifan lewat diskusi kartu soal, tanya jawab, mind mapping, problem solving, keberanian memanfaatkan media, menilai tugas kelompok dan keaktifan dalam diskusi. Implementasi pendidikan perdamaian yang terjadi saat ini di sekolah-sekolah di Kabupaten Aceh Timur, bahkan juga Aceh yaitu melalui pengintegrasian ke dalam mata pelajaran lain.

Pengintegrasian umumnya dilakukan dengan mata pelajaran PPKN dan Pendidikan Agama Islam. Pelaksanaan pengintegrasian pendidikan perdamaian dilakukan melalui penyisipan materi pendidikan damai baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kemampuan guru yang mengajarkan pelajaran PPKN atau Pendidikan

Agama Islam. Beberapa guru mengembangkan suasana kelas dengan cara terbuka melalui kegiatan membaca Al-quran dan doa bersama.

Menurut beberapa guru yang diwawancarai mengatakan bahwa metode pengintegrasian seperti itu sudah cukup optimal menyentuh perilaku damai secara komprehensif. Memilih pelajaran PPKN dalam implementasi pendidikan perdamaian dikarenakan kecocokan ruang lingkup dengan tujuan pembelajaran pendidikan perdamaian. Ruang lingkup PPKN meliputi: persatuan bangsa, nilai dan norma, hak asasi manusia (HAM), kebutuhan hidup, kekuasaan dan politik, masyarakat demokratis, pancasila dan konstitusi negara, dan globalisasi (Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006).

Kecocokan lainnya adalah materi yang terkandung dalam PPKN sudah memuat nilai-nilai perdamaian. Hal tersebut sangat memudahkan dalam penyisipan materi perdamaian dalam PPKN, ini sesuai dengan pendapat salah satu guru PPKN. Walaupun tidak ada materi khusus tentang pendidikan perdamaian di pelajaran PPKN, namun beberapa materi yang ada sudah bisa menjadikan siswa memahami pentingnya nilai-nilai perdamaian dalam keseharian mereka. Untuk sekarang ini hanya saja perlu kreatifitas dari guru untuk menyelesaikan jika terdapat perselisihan antar siswa. Menurut pemikiran saya, pemahaman agama yang mereka dapat di lingkungan mereka dapat mendorong terciptanya perdamaian dalam berinteraksi.

Jika memang ada pelajaran pendidikan perdamaian secara khusus tentu merupakan hal yang sangat bagus untuk menciptakan perdamaian secara berkelanjutan dimasa-masa mendatang. (Rastina, guru PPKN, SMK N I Peureulak, wawancara 14 Mei 2018) Selain itu, penggunaan metode pembelajaran PPKn yang teliti juga dapat memfasilitasi perkembangan kemampuan berpikir siswa. Hal ini ditandai dengan penggunaan metode PPKn yang mendorong anak untuk aktif bertanya, mengemukakan gagasan, atau mengujikan suatu materi, melakukan diskusi, dialog dan debat pendapat tentang masalah-masalah kewarganegaraan, termasuk kedalam pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek. Metode seperti ini dapat mengembangkan daya kritis berpikir siswa dan mempraktekkan kedalam kehidupan dunia nyata siswa (Juanda, 2013).

Hal tersebut dapat dimaknai bahwa efektifitas implementasi pendidikan perdamaian dalam merubah pola interaksi sosial masyarakat, khususnya siswa-siswa sekolah untuk membentuk perilaku dan watak mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dalam kehidupan sosial dan bersosialisasi sangat dipengaruhi oleh pendekatan, model, dan metode pembelajaran serta peran guru sebagai pendidik. Seorang guru diharapkan dapat menggunakan sebuah model pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan,

strategi atau metode pembelajaran yang efektif dan bervariasi. Dalam pembelajaran harus memperhatikan minat dan kemampuan peserta didik.

Pembelajaran perlu dilakukan dengan sedikit ceramah dan metode-metode yang berpusat pada guru, serta lebih menekankan pada interaksi peserta didik. Penggunaan metode yang bervariasi akan sangat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Berikut dikemukakan beberapa metode pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru, diantaranya yaitu: 1) metode demonstrasi, 2) metode inkuiri, 3) metode penemuan, 4) metode eksperimen, 5) metode pemecahan masalah, 6) metode karyawisata, 7) metode perolehan konsep, 8) metode penugasan, 9) metode ceramah, 10) metode tanya jawab, dan 11) metode diskusi. Zainab menjelaskan metode pengajaran yang dia terapkan untuk mengajar pendidikan perdamaian di sekolah yaitu belajar melalui peran aksi di luar kelas.

Untuk di dalam kelas menggunakan metode pemecahan masalah oleh siswa, sementara metode ceramah dalam pendidikan perdamaian kurang tepat untuk dipraktikkan. Karena guru dituntut mejadi fasilitator dan motifator sehingga keakraban guru dengan murid baik di kelas maupun di luar kelas dapat terbangun. Dalam mengajarkan pendidikan perdamaian melalui pendidikan agama sering dibacakan hadist-hadist atau ayat Al-quran yang berkaitan dengan perdamaian (Guru SMA Rantau Selamat Aceh Timur, Wawancara 28 Agustus 2018) Selanjutnya dalam proses pembelajaran, guru juga harus berperan sebagai fasilitator. Hal ini memiliki arti penting dalam terwujudnya kerukunan dan kedamaian di kalangan peserta didiknya.

Beberapa prinsip untuk mengajarkan perdamaian pada peserta didik yang perlu diterapkan yaitu: 1) Jadilah seorang guru yang penuh dengan kreatifitas. Terima dan akomodasi talenta/bakat-bakat dari setiap siswa. Doronglah daya imajinasi mereka dan cobalah untuk selalu siap sedia dalam mengantisipasi segala respon ataupun pertanyaan, bahkan yang terburuk sekalipun di ruang kelas; 2) Lakukanlah dengan suatu maksud yang jelas, pikirkan dan renungkan sebelum melakukan dan selama dalam proses melakukan setiap bagian dari program pengajaran perdamaian ini; 3) Gunakan simbol-simbol dengan tujuan yang jelas.

Simbol-simbol membuat hal-hal yang abstrak menjadi jelas dan mudah untuk dimengerti; 4) Seimbangkan pilihan dan struktur. Mengajar Perdamaian tidaklah berarti bahwa para guru atau orang dewasa membiarkan anak-anak membuat seluruh keputusan sendiri. Mengajar perdamaian lebih berarti bahwa para pemimpin (guru dan orang dewasa) menyusun sebuah struktur dan lingkungan yang mampu memberikan ruang bagi anak-anak didik untuk memilih; 5) Perkaya lingkungan belajar dengan jalan memberikan pilihan-pilihan. Para guru bisa mencoba membuat ruang kelas lebih atraktif

dan nyaman terhindar dari segala bentuk gangguan; 6) Berikan perhatian khusus dan apresiasi terhadap setiap perbedaan.

Hargai perbedaan kultur (cultural diversity) dan setiap keunikan karakter/pribadi dari anak-anak didik kita; 7) Membangun semangat kerjasama dan saling bantu-membantu. Semangat kerjasama ini haruslah diajarkan secara berkesinambungan. Jangan melakukan aktifitas-aktifitas yang mendorong adanya semangat kompetisi, dan; 8) Gunakanlah kata-kata yang bersifat membangun. Dorong anak-anak didik/siswa agar memiliki suatu visi yang jelas di masa depan. Implementasi Pendidikan Damai selain melalui kurikulum mata pelajaran inti juga dapat dilakukan dalam bentuk Kurikulum extra Kurikuler.

Ini pernah dicoba pada SMA di Kabupaten Aceh Besar dan daerah-daerah lain di Aceh, dengan program tersebut diharapkan siswa SMA bisa menjadi agen perdamaian di masa yang akan datang. Dalam pelaksanaannya, para guru melakukan persiapan dan penguasaan materi sebelum melakukan proses pembelajaran. Materi yang dipelajari adalah silabus yang telah ditrainingkan oleh PPD kepada para guru di masing-masing sekolah. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode atau pendekatan yang bervariasi yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa dan keadaan kelas.

Evaluasi pelaksanaan program pendidikan damai itu tidak terpaku hanya pada pelaksanaan ujian tulis akan tetapi porsi yang lebih besar pada perubahan sikap siswa sehari-hari dan keaktifan mereka dalam mengikuti pelajaran di kelas. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan karena kurikulum tersebut bukanlah kurikulum nasional yang selalu dipantau penerapannya secara nasional serta di-upgrade kemampuan gurunya. Minimnya pelaksanaan training yang diterima oleh para guru menjadi kendala tersendiri dalam menjamin terlaksananya pembelajaran program ini secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara implementasi nilai-nilai pendidikan perdamaian yang diimplementasikan melalui pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah di Kabupaten Aceh Timur sudah berjalan 90%, baik nilai toleransi, nilai kesetaraan ataupun nilai keadilan. Hanya saja masih ada juga guru yang belum menerapkan nilai kesetaraan, biasanya guru yang berasal dari lulusan perguruan tinggi yang lebih bagus, mungkin karena dia merasa dia guru yang lebih baik ataupun menganggap yang profesional. Penerapan nilai-nilai pendidikan perdamaian oleh siswa hampir 95% sudah diterapkan di sekolah. Kalaupun ada yang tidak menerapkan pun itu termasuk kategori anak yang nakal disekolah. Seperti contoh menghargai guru yang bukan daerahnya.

Keberhasilan tersebut dikarenakan nilai-nilai persaudaraan dan sikap live together yang ditanamkan dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah dan instansi/lembaga keagamaan menghasilkan proses pemahaman makna pentingnya perdamaian secara langsung dapat diserap oleh anak didik. Implementasi pendidikan perdamaian juga memiliki beberapa kendala yaitu seperti terbatasnya jam yang diberikan oleh kurikulum terhadap pelajaran pendidikan agama di sekolah-sekolah. Seorang guru agama mustahil memenuhi tugas pencapaian pendidikan agama yang identik menciptakan siswa yang bertaqwa dan berakhlak karimah dengan keterbatasan jam pelajaran.

Tetapi usulan untuk menambah jam pelajaran agamapun sangatlah tidak realistis, juga tidak efektif jika tidak disertai strategi pembelajaran yang tepat. Strategi pembelajaran agama saat ini lebih terfokus pada pembelajaran konseptual, maksudnya peserta didik lebih banyak menerima informasi – informasi daripada prakteknya. Kecenderungan pendidikan agama dalam lingkungan sekolah hanya menekankan pada aspek pengukuran nilai watak yang terbingkai dalam pikiran dan otak setiap anak didik, sementara aspek batiniah yang mencakup kepekaan terhadap lingkungan, sikap empati, dan kepedulian sosial kurang diperhatikan. Akibatnya, nilai-nilai religi yang diajarkan ditempatkan di luar pribadinya, tidak terjamah, dan tidak terpersonifikasikan dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

Kecenderungan lain dari pelaksanaan pengajaran pendidikan agama adalah bahwa seorang anak dianggap telah berhasil mengikuti pendidikan agama bilamana telah menguasai sejumlah bahan pelajaran dan mampu menjawab soal-soal jawaban, bukan atas dasar sejauhmana anak telah menghayati nilai keagamaan yang terrefleksi dalam sikap dan menjelma pada perilaku kehidupan, seperti disiplin dalam beribadah, berkepribadian luhur, sopan santun, saling menghormati dan menghargai, suka menolang, jujur, sabar, dan tidak apatis terhadap keyakinan agama lain. Sikap tersebut seperti yang diperlihatkan oleh siswa-siswa di sekolah-sekolah di Kabupaten Aceh Timur.

Guru sekolah MAN I Idi Rayeuk mengatakan, dalam aspek sikap disiplin siswa, pada umumnya, siswa sekolah tersebut memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, baik dalam kehadiran, pergaulan, maupun dalam belajar. Di sekolah ini tidak terdapat kasus-kasus kenakalan remaja yang berat, seperti perkelahian berat, dan narkoba. Penyimpangan perilaku yang menjurus kepada perbuatan indisipliner dan melanggar aturan yang telah ditetapkan sebenarnya juga ditemukan, namun tidaklah terlalu parah dan masih bisa dilakukan kegiatan konseling sebagai upaya penyadaran diri kepada siswa untuk tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Sementara untuk menjamin mutu pendidikan, di MAN Idi Rayeuk, sekolah memberikan sanksi yang tegas bagi siswa yang sering melanggar ketentuan atau peraturan sekolah.

Pemberian sanksi lebih ditekankan kepada sanksi yang mendidik siswa yang melanggar tata tertib dan ditangani guru atau wali kelasnya, sementara guru Bimbingan Konseling (BK) menindaklanjuti penanganan anak yang bermasalah. Dalam pemantauan kedisiplinan siswa, pihak sekolah menunjukkan beberapa petugas piket yang terdiri dari beberapa orang guru untuk memantau dan mengkoordinir pelaksanaan tata tertib di MAN Idi Rayeuk. Dari observasi dan wawancara yang dilakukan dengan salah seorang guru, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa MAN Idi Rayeuk telah punya sikap disiplin dalam belajar, dalam kehidupan sehari-hari dan disiplin hidup sehat, sehingga aktualisasi tingkat kedisiplinan siswa dikategorikan berada pada kategori tinggi. Sebagai catatan, karena masih ada sebagian belum disiplin, perlu upaya madrasah untuk menumbuhkan rasa kedisiplinan ini, sehingga semua siswa mencapai sikap disiplin yang diharapkan.

Selanjutnya model penyelesaian konflik internal siswa dilakukan dengan pendekatan pribadi oleh semua guru mulai guru mata pelajaran, guru pembimbing akademik/walikelas, wakil kepala sekolah, tenaga kependidikan dan dilanjutkan oleh kepala sekolah. BAB VII DESAIN MODEL PENDIDIKAN PERDAMAIAN: SATU PENGALAMAN DI SEKOLAH MENENGAH ACEH TIMUR Pendidikan Perdamaian untuk Sekolah Menengah di Aceh Aceh yang dikenal sebagai daerah konflik, perlu sebuah upaya untuk memutuskan mata rantai penyebab timbulnya konflik tersebut. UNICEF sejak tahun 2001 sebelum kesepakatan damai antara GAM dan Pemerintah Indonesia ditandatangani telah mengambil perannya dalam melaksanakan pendidikan perdamaian di Aceh.

Sejumlah Sekolah Menengah Atas di wilayah Aceh telah didampingi untuk melaksanakan pendidikan perdamaian, termasuk Aceh Timur (Ashton, 2002). Namun formula pendidikan perdamaian yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Aceh belum jelas bentuk kurikulumnya walaupun Gubernur Aceh sering menyampaikan di media massa agar perdamaian Aceh dimasukkan dalam kurikulum di sekolah. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Aceh, bahwa pendidikan perdamaian sudah pernah diwacanakan dan dibahas, tetapi hingga kini belum ada satu keputusan dan mekanisme pelaksanaan yang jelas.

Sebagian guru berpendapat bahwa pendidikan agama dan aqidah akhlak sudah merangkumi pendidikan perdamaian di dalamnya, sehingga tidak perlu menambahkan kurikulum yang memberatkan beban siswa. Selain itu, pendidikan perdamaian dapat diajarkan melalui pelajaran muatan lokal, seperti pelajaran Sejarah Kebudayaan Aceh, tetapi hal ini tergantung pada pemahaman dan pertimbangan kepala sekolahnya. Sekolah memiliki otonomi untuk menentukan tema pelajaran muatan lokal. Oleh sebab

itu, pendidikan perdamaian belum menjadi program utama Dinas Pendidikan Aceh. Program utamanya adalah Pelaksanaan Kurikulum Nasional tahun 2013 dan peningkatan mutu pendidikan.

Akan tetapi, pendidikan perdamaian tetap diwacanakan, karena sudah menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Aceh. Wenger (2014) mengatakan bahwa pendidikan perdamaian yang merangkumi sejarah Aceh dan konflik yang baru diselaikan sangat didambakan oleh para guru dan siswa Sekolah Mengengah di Aceh, karena selama ini pendidikan sejarah yang diajarkan lebih didominasi oleh sejarah Jawa, karena kurikulum pendidikan di Aceh harus mengikut kepada kurikulum dan sistem pendidikan nasional Indonesia.

Oleh sebab itu, Dinas Kebudayaan dan Perawisata Aceh pada tahun 2012 telah melakukan pelatihan pembinaan kapasitas guru, masyarakat dan remaja mengenai pendidikan dan budaya perdamaian di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Khususnya bagi guru sekolah telah dilaksanakan pelatihan penanaman nilai budaya, karakter dan budi pekerti bangsa. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan para guru dalam usaha menanamkan kepada anak didik nilai-nilai; keagamaan, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, berdaya saing, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai tanggungjawab. Diharapkan nilai-nilai ini dapat diintegrasikan oleh para guru dalam setiap mata pelajaran, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah (Dinas Kebudayaan dan Perawisata Aceh, 2012).

Secara umum, pendidikan perdamaian dapat diimplementasikan melalui dua cara, yaitu secara terpisah atau khusus dan secara integrasi. Secara khusus, yaitu dengan menambahkan mata pelajaran khusus pendidikan perdamaian dalam kurikulum sekolah, dan secara integrasi, pendidikan perdamaian dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran tertentu, seperti Pendidikan Kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, pendidikan akidah akhlak serta pelajaran pendidikan agama Islam.

Mungkin juga diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, seperti pendidikan lingkungan yang diintegrasikan ke dalam Ilmu Pengetahuan Alam, dengan demikian tidak menambah mata pelajaran bagi siswa (Suadi, 2015). Lebih jauh lagi sebenarnya pendidikan perdamaian dapat dilaksanakan melalui semua mata pelajaran, yaitu dengan cara pengarusutamaan pendidikan perdamaian. Dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah pembelajaran pendidikan perdamaian pada setiap mata pelajaran bukanlah substansi materinya saja, akan tetapi pada proses pembelajarannya yang dapat membentuk karakter peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan dan pendidikan perdamaian.



Desain Model Pendidikan Perdamaian di Aceh Timur Berdasarkan uraian model pembelajaran pelajaran pendidikan perdamaian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat tiga model pendidikan damai yang dipraktikkan di Kabupaten Aceh Timur, yaitu model pembelajaran tersendiri, model terintegrasi, dan model ekstrakurikuler. Model ekstrakurikuler adalah model pendidikan damai yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kelompok yang mendorong siswa melakukan kerjasama dan kebersamaan, sehingga membiasakan mereka berperan aktif dalam kelompok.

Dengan demikian para siswa memiliki keahlian dalam berkomunikasi dan penyelesaian masalah. Hal ini dapat berlangsung melalui kegiatan-kegiatan kelompok atau bersama, seperti pramuka, even olah raga, gotong royong, dan kegiatan keagamaan (seperti membaca surah yasin setiap hari Jum'at, dan lain-lain). Sementara dua model lainnya merupakan model yang desain melalui kurikulum mata pelajaran.

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: Model Integrasi kedalam Mata Pelajaran Tertentu Model Parsial atau Terpisah dari Pelajaran Lainnya Berdasarkan penjelasan gambar tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan perdamaian dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran wajib inti kelompok A dan B. Namun dalam pelaksanaannya, pendidikan damai secara umum diintegrasikan ke dalam pelajaran Agama dan PPKn serta mata pelajaran IPS. Sementara pelajaran lainnya seperti matematika dan IPA serta Bahasa terlepas dari pendidikan damai.

Padahal jika para guru memiliki pemahaman yang baik mengenai pendidikan damai, mata pelajaran tersebut juga dapat dimasukkan isu dan konsep pendidikan damai, jika tidak memungkinkan melalui materinya pendidikan damai dapat dijalankan lewat metode pembelajarannya, yaitu metode pembelajaran kelompok dan partisipatif. Di Jamaica misalnya, pendidikan perdamaian telah diintegrasikan ke dalam pelajaran matematika, dan hasilnya menunjukkan bahwa mengintegrasikan pendidikan perdamaian ke dalam kurikulum matematika berdampak positif terhadap prestasi siswa dalam matematika, dan meningkatkan pengetahuan perdamaian serta keterampilan resolusi konflik (Thompsons dan Joong, 2018). Kemudian di Sydney telah diintegrasikan pendidikan damai ke dalam bahasa.

Dengan mengintegrasikan ide-ide dan pendekatan pendidikan perdamaian ke dalam kelas bahasa, mereka memiliki kesempatan untuk berkontribusi terhadap pemahaman siswa tentang perdamaian dan keadilan (Blanchard, 1998). BAB VIII EFEKTIFITAS MODEL PENDIDIKAN PERDAMAIAN INTEGRATIF DI SEKOLAH MENENGAH ACEH TIMUR Integrasi Pendidikan Perdamaian dalam Pendidikan Agama Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajaran pendidikan perdamaian yang diperlakukan secara khusus melalui pelajaran Agama Islam memberi pengaruh yang signifikan terhadap

pemahaman siswa mengenai perdamaian. Hal ini dapat dilihat pada tabel penjelasan Uji T yang dianalisa dengan menggunakan SPSS.

Hasil SPSS Uji T Paired Sampel Test Siswa SMA Ruang 1 Agama Tabel 1 Paired Samples Statistics \_\_ Mean \_N \_Std. Deviation \_Std. Error Mean \_\_ Pair 1 \_FRE-TEST \_73,2353 \_34 \_6,38207 \_1,09452 \_\_ POST-TEST \_87,9412 \_34 \_8,44928 \_1,44904 \_\_ Pada tabel 1, terlihat bahwa pada nilai rata-rata terlihat berbeda, yaitu 73,23 pada fre-test dan 87,94 pada post-test, dengan jumlah seluruh data (N) masing-masing ada 34 data dan standar deviasi 6,38 pada fre-test dan 8,45 pada post-test, dan standar error data sebanyak 1,094 pada fre-test dan 1,449 pada post-test. Tabel 2. Paired Samples Correlations \_\_ \_N \_Correlation \_Sig.

\_\_ Pair 1 \_FRE-TEST & POST-TEST \_34 \_071 \_690 \_\_ Tabel 2 menunjukkan bahwa data fre-test dengan data post-test memiliki korelasi sebanyak 0,071 dengan signifikansi 0,690 dengan jumlah data ada 34 pasang. Tabel 3. Paired Samples Test \_\_ Paired Differences \_t \_df \_Sig. (2-tailed) \_\_ Mean \_Std. Deviation \_Std. Error Mean \_95% Confidence Interval of the Difference \_ Lower \_Upper \_ Pair 1 \_FRE-TEST - POST-TEST \_-14,70588 \_10,22039 \_1,75278 \_-18,27194 \_-11,13982 \_-8,390 \_33 \_000 \_\_ Pada tabel 3 terlihat bahwa hasil penghitungan menggunakan spss20 menunjukkan rata-rata fre-test dan post-test yaitu -14,706 dengan standar deviasi 10,220 dan standar error rata-rata sebanyak 1,752. Batas bawah terdapat pada -18,272 dan batas atas pada -11,140 dengan nilai  $t = -8,390$  dan derajat kebebasan sebanyak 33 dan hasil uji signifikansi  $0,000 < 0,05$ , menunjukkan bahwa ada beda rata-rata yang signifikan antara sebelum pembelajaran dengan sesudah pembelajaran.

Hasil SPSS Uji T Paired Sampel Test Siswa SMA Ruang 2 Agama Table 1 Paired Samples Statistics \_\_ Mean \_N \_Std. Deviation \_Std. Error Mean \_\_ Pair 1 \_FRE-TEST \_43,6667 \_30 \_10,98065 \_2,00478 \_\_ POST-TEST \_57,6667 \_30 \_10,72648 \_1,95838 \_\_ Pada tabel 1, dapat di lihat bahwa nilai rata-rata jelas terlihat berbeda, yaitu 43,66 pada fre-tes, sedangkan 57,66 pada post-test, dengan jumlah seluruh data (N) masing-masing ada 30 data dan standar deviasi 10,98 pada fre-test dan 10,72 pada post-test, dan standar error data sebanyak 2,00 pada fre-test dan 1,95 pada post-test. Tabel 2 Paired Samples Correlations \_\_ \_N \_Correlation \_Sig.

\_\_ Pair 1 \_FRE-TEST & POST-TEST \_30 \_397 \_030 \_\_ Pada tabel 2 ini menunjukkan bahwa data fre-test dengan data post-test memiliki korelasi sebanyak 0,397 dengan signifikansi 0,30 dengan jumlah data ada 30 siswa. Tabel 3 Paired Samples Test \_\_ Paired Differences \_t \_df \_Sig. (2-tailed) \_\_ Mean \_Std. Deviation \_Std. Error Mean \_95% Confidence Interval of the Difference \_ Lower \_Upper \_ Pair 1 \_FRE-TEST- POST-TEST \_-14,00000 \_11,91927 \_2,17615 \_-18,45073 \_-9,54927 \_-6,433 \_29

\_,000 \_ Pada tabel 3 ini terlihat bahwa hasil penghitungan Paired Samples Test menggunakan SPSS 26 menunjukkan rata-rata fre-test dan post-test yaitu -14,00 dengan standar deviasi 11,91 dan standar error rata-rata sebanyak 2,17.

Batas bawah terdapat pada -18,45 dan batas atas pada -9,54 dengan nilai  $t = -6,43$  dan derajat kebebasan sebanyak 29 dan hasil uji signifikansi  $0,000 < 0,05$ , menunjukkan bahwa ada beda rata-rata yang signifikan antara sebelum pembelajaran dengan sesudah pembelajaran. Hasil SPSS Uji T Paired Sampel Test Siswa MAN Ruang 1 Agama

Pair 1	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
_FRE-TEST	33,6667	30	12,17214	2,22232
_POST-TEST	58,6667	30	10,08014	1,84037

Table 1 di atas, dapat di lihat bahwa nilai rata-rata jelas penampakan hasil yang sangat berbeda, yaitu 33,66 pada fre-tes, sedangkan 58,66 pada post-test, dengan jumlah seluruh data (N) masing-masing ada 30 data dan standar deviasi 12,17 pada fre-test dan 10,08 pada post-test, dan standar error data sebanyak 2,22 pada fre-test dan 1,84 pada post-test.

Table 2 Paired Samples Correlations

Pair 1	N	Correlation	Sig.
_FRE-TEST & POST-TEST	30	,435	,016

Pada tabel 2 ini menunjukkan bahwa data fre-test dengan data post-test memiliki korelasi sebanyak 0,435 dengan signifikansi 0,016 dengan jumlah data ada 30 siswa. Tabel 3 Paired Samples Test

Paired Differences	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean	Std. Deviation	Std. Error
_FRE-TEST - POST-TEST	-25,00000	29	,000	-25,00000	11,96259	2,18406

(2-tailed) Mean Std. Deviation Std.

Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference

Pair 1	Lower	Upper
_FRE-TEST - POST-TEST	-29,46690	-20,53310

Pada tabel 3 ini terlihat bahwa hasil penghitungan Paired Samples Test menggunakan spss26 menunjukkan rata-rata fre-test dan post-test yaitu -25,00 dengan standar deviasi 11,96 dan standar error rata-rata sebanyak 2,18. Batas bawah terdapat pada -29,46 dan batas atas pada -20,53 dengan nilai  $t = -11,44$  dan derajat kebebasan sebanyak 29 dan hasil uji signifikansi  $0,000 < 0,05$ , menunjukkan bahwa ada beda rata-rata yang signifikan antara sebelum pembelajaran dengan sesudah pembelajaran. Hasil SPSS Uji T Paired Sampel Test Siswa MAN Ruang 2 Agama Paired Samples Statistics

Pair 1	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error
_FRE-TEST	44,1379	29	10,86187	2,01700
_POST-TEST	56,5517	29	14,94654	2,77550

Pada tabel 1 di atas, dapat di lihat bahwa nilai rata-rata jelas penampakan hasil yang sangat berbeda, yaitu 44,13 pada fre-tes, sedangkan 56,55 pada post-test, dengan jumlah seluruh data (N) masing-masing ada 29 data dan standar deviasi 10,86 pada fre-test dan 14,94 pada post-test, dan standar error data sebanyak 2,01 pada fre-test dan 2,77 pada post-test. Paired Samples Correlations

Pair 1	N	Correlation	Sig.
_FRE-TEST & POST-TEST	29	,435	,016

\_\_Pair 1 \_FRE-TEST & POST-TEST \_29 \_553 \_002 \_\_ Pada tabel 2 ini menunjukkan bahwa data fre-test dengan data post-test memiliki korelasi sebanyak 0,533 dengan signifikansi 0,002 dengan jumlah data ada 29 siswa. Paired Samples Test \_\_ Paired Differences \_t \_df \_Sig. (2-tailed) \_\_ \_Mean \_Std. Deviation \_Std. Error Mean \_95% Confidence Interval of the Difference \_\_\_\_\_Lower \_Upper \_\_\_\_\_Pair 1 \_FRE-TEST - POST-TEST \_-12,41379 \_12,72095 \_2,36222 \_-17,25259 \_-7,57500 \_-5,255 \_28 \_000 \_\_ Pada tabel 3 ini terlihat bahwa hasil penghitungan Paired Samples Test menggunakan spss26 menunjukkan rata-rata fre-test dan post-test yaitu -12,41 dengan standar deviasi 12,72 dan standar eror rata-rata sebanyak 2,36.

Batas bawah terdapat pada -17,25 dan batas atas pada -7,57 dengan nilai  $t = -5,255$  dan derajat kebebasan sebanyak 28 dan hasil uji signifikansi  $0,000 < 0,05$ , menunjukkan bahwa ada beda rata-rata yang signifikan antara sebelum pembelajaran dengan sesudah pembelajaran. Hasil SPSS Uji T Paired Sampel Test Siswa SMK Ruang 1 Agama Paired Samples Statistics \_\_ \_Mean \_N \_Std. Deviation \_Std. Error Mean \_\_Pair 1 \_FRE-TEST \_40,0000 \_29 \_13,62770 \_2,53060 \_\_ \_POST-TEST \_58,9655 \_29 \_10,46928 \_1,94410 \_\_ Pada tabel 1 di atas, dapat di lihat bahwa nilai rata-rata jelas penampakan hasil yang sangat berbeda, yaitu 40,00 pada fre-tes, sedangkan 58,96 pada post-test, dengan jumlah seluruh data (N) masing-masing ada 29 data dan standar deviasi 13,62 pada fre-test dan 10,46 pada post-test, dan standar eror data sebanyak 2,53 pada fre-test dan 1,94 pada post-test.

Paired Samples Correlations \_\_ \_N \_Correlation \_Sig. \_\_Pair 1 \_FRE-TEST & POST-TEST \_29 \_350 \_062 \_\_ Pada tabel 2 ini menunjukkan bahwa data fre-test dengan data post-test memiliki korelasi sebanyak 0,350 dengan signifikansi 0,062 dengan jumlah data ada 29 siswa. Paired Samples Test \_\_ Paired Differences \_t \_df \_Sig. (2-tailed) \_\_ \_Mean \_Std. Deviation \_Std.

Error Mean \_95% Confidence Interval of the Difference \_\_\_\_\_Lower \_Upper \_\_\_\_\_Pair 1 \_FRE-TEST - POST-TEST \_-18,96552 \_13,97570 \_2,59522 \_-24,28159 \_-13,64945 \_-7,308 \_28 \_000 \_\_ Pada tabel 3 ini terlihat bahwa hasil penghitungan Paired Samples Test menggunakan spss26 menunjukkan rata-rata fre-test dan post-test yaitu -18,96 dengan standar deviasi 13,97 dan standar eror rata-rata sebanyak 2,59. Batas bawah terdapat pada -24,28 dan batas atas pada -13,64 dengan nilai  $t = -7,30$  dan derajat kebebasan sebanyak 28 dan hasil uji signifikansi  $0,000 < 0,05$ , menunjukkan bahwa ada beda rata-rata yang signifikan antara sebelum pembelajaran dengan sesudah pembelajaran. Hasil SPSS Uji T Paired Sampel Test Untuk Rata-Rata Tiap Kelas Bidang Agama Paired Samples Statistics \_\_ \_Mean \_N \_Std. Deviation \_Std.

Error Mean \_Pair 1\_RATA-RATA FRE-TEST\_46,9440\_5\_15,28463\_6,83549 \_\_  
\_RATA-RATA POST-TEST\_63,9600\_5\_13,43872\_6,00998 \_\_ Pada tabel 1, dapat di lihat bahwa nilai rata-rata antara PRE test dengan post tes pada table Paired Samples Statistics di atas jelas terlihat sangat berbeda, yaitu 46,94 pada fre-tes, sedangkan pada post-test 63,96, dengan jumlah seluruh data (N) masing-masing ada 5 kelas atau ruang, data dan standar deviasi 15,28 pada fre-test dan 13,43 pada post-test, dan standar error data sebanyak 6,83 pada fre-test dan 6,00 pada post-test. Paired Samples Correlations \_\_N\_Correlation\_Sig.

\_\_Pair 1\_RATA-RATA FRE-TEST & RATA-RATA POST-TEST\_5\_0,945\_0,015 \_\_ Pada tabel 2 ini menunjukkan bahwa data Paired Samples Correlations fre-test dengan data post-test memiliki korelasi sebanyak 0,945 dengan signifikansi 0,015 dengan jumlah data ada 5 ruang atau kelas. Paired Samples Test \_\_Paired Differences\_t\_df\_Sig. (2-tailed) \_\_Mean\_Std. Deviation\_Std. Error Mean\_95% Confidence Interval of the Difference \_\_Lower\_Upper \_\_Pair 1\_RATA-RATA FRE-TEST - RATA-RATA POST-TEST\_-17,01600\_5,08030\_2,27198\_-23,32402\_-10,70798\_-7,490\_4\_0,002 \_\_ Pada tabel 3 ini terlihat bahwa hasil penghitungan nilai rata rata Paired Samples Test menggunakan spss26 menunjukkan nilai rata-rata fre-test dan post-test yaitu -17,01 dengan standar deviasi 5,08 dan standar error rata-rata sebanyak 2,27.

Batas bawah terdapat pada -23,32 dan batas atas pada -10,70 dengan nilai  $t = -7,49$  dan derajat kebebasan sebanyak 4 kelas dan hasil uji signifikansi  $0,002 < 0,05$ , menunjukkan bahwa ada beda rata-rata yang signifikan antara sebelum pembelajaran dengan sesudah pembelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil antara PRE test dengan posttest signifikan. Integrasikan Pendidikan Perdamaian dalam Pendidikan Kewarganegaraan Hasil penelitian pada PPKn menunjukkan bahwa pengajaran pendidikan perdamaian yang diperlakukan secara khusus, hasilnya serupa dengan melalui pelajaran Agama Islam.

Ia juga memberi pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman siswa mengenai perdamaian. Hal ini dapat dilihat pada tabel penjelasan Uji T yang dianalisa dengan menggunakan SPSS. Hasil SPSS Uji T Paired Sampel Test Siswa SMA Ruang 1 PPKn Tabel 1. Paired Samples Statistics \_\_Mean\_N\_Std. Deviation\_Std. Error Mean \_\_Pair 1\_FRE-TEST\_51,8519\_27\_12,41495\_2,38926 \_\_POST-TEST\_65,1852\_27\_14,77273\_2,84301 \_\_ Pada tabel 1, terlihat bahwa pada nilai rata-rata terlihat berbeda, yaitu 51,85 pada fre-test dan 65,18 pada post-test, dengan jumlah seluruh data (N) masing-masing ada 27 data dan standar deviasi 12,41 pada fre-test dan 14,77 pada post-test, dan standar error data sebanyak 2,389 pada fre-test dan 2,843 pada post-test. Tabel 2. Paired Samples Correlations \_\_N\_Correlation\_Sig.

\_Pair 1 \_FRE-TEST & POST-TEST \_27 \_0,575 \_0,002 \_Tabel 2 menunjukkan bahwa data fre-test dengan data post-test memiliki korelasi sebanyak 0,575 dengan signifikansi 0,002 dengan jumlah data ada 27 siswa. Tabel 3. Paired Samples Test  
 Paired Differences t Df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper  
 Pair 1  
 FRE-TEST - POST-TEST -13,33333 12,70978 2,44600 -18,36115 -8,30551 -5,45126  
 0,000  
 Pada tabel 3 terlihat bahwa hasil penghitungan menggunakan spss26 menunjukkan rata-rata fre-test dan post-test yaitu -13,33 dengan standar deviasi 12,710 dan standar eror rata-rata sebanyak 2,446. Batas bawah terdapat pada -18,361 dan batas atas pada -8.305 dengan nilai  $t = -5,451$  dan derajat kebebasan sebanyak 26 dan hasil uji signifikansi  $0,000 < 0,05$ , menunjukkan bahwa ada beda rata-rata yang signifikan antara sebelum pembelajaran dengan sesudah pembelajaran.

Hasil SPSS Uji T Paired Sampel Test Siswa SMA Ruang 2 PPKn Table 1 Paired Samples Statistics  
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean  
 Pair 1 FRE-TEST 68,6207 29 8,33415 1,54761  
 POST-TEST 84,4828 29 7,36120 1,36694  
 Pada tabel 1, dapat di lihat bahwa nilai rata-rata jelas terlihat berbeda, yaitu 68,62 pada fre-tes, sedangkan 84,48 pada post-test, dengan jumlah seluruh data (N) masing-masing ada 29 data dan standar deviasi 8,33 pada fre-test dan 7,36 pada post-test, dan standar eror data sebanyak 1,54 pada fre-test dan 1,36 pada post-test. Tabel 2 Paired Samples Correlations  
 N Correlation Sig.

\_Pair 1 \_FRE-TEST & POST-TEST \_29 \_0,279 \_0,143 \_ Pada tabel 2 ini menunjukkan bahwa data fre-test dengan data post-test memiliki korelasi sebanyak 0,279 dengan signifikansi 0,143 dengan jumlah data ada 29 siswa. Tabel 3 Paired Samples Test  
 Paired Differences t Df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper  
 Pair 1  
 FRE-TEST - POST-TEST -15,86207 9,45563 1,75587 -19,45880 -12,26534 -9,03428  
 0,000  
 Pada tabel 3 ini terlihat bahwa hasil penghitungan Paired Samples Test menggunakan spss26 menunjukkan rata-rata fre-test dan post-test yaitu -15,86 dengan standar deviasi 9,45 dan standar eror rata-rata sebanyak 1,755. Batas bawah terdapat pada -19,45 dan batas atas pada -12,26 dengan nilai  $t = -9.03$  dan derajat kebebasan sebanyak 28 dan hasil uji signifikansi  $0,000 < 0,05$ , menunjukkan bahwa ada beda rata-rata yang signifikan antara sebelum pembelajaran dengan sesudah pembelajaran.

Hasil SPSS Uji T Paired Sampel Test Siswa MAN Ruang 1 PPKn Table 1 Paired Samples Statistics  
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean  
 Pair 1 FRE-TEST 65,3333 30 10,08014 1,84037  
 POST-TEST 82,0000 30 9,24755 1,68836  
 Pada tabel 1, dapat di lihat bahwa nilai rata-rata pada Paired Samples Statistics jelas terlihat sangat berbeda, yaitu 65,33 pada fre-tes, sedangkan 82,00 pada post-test, dengan jumlah



seluruh data (N) masing-masing ada 30 data dan standar deviasi 10,08 pada fre-test dan 9,24 pada post-test, dan standar error data sebanyak 1,84 pada fre-test dan 1,68 pada post-test.

Tabel 2 Paired Samples Correlations \_\_N\_Correlation\_Sig. \_\_Pair 1\_FRE-TEST & POST-TEST\_30\_0,437\_0,016 \_\_ Pada tabel 2 ini menunjukkan bahwa data Paired Samples Correlations fre-test dengan data post-test memiliki korelasi sebanyak 0,437 dengan signifikansi 0,16 dengan jumlah data ada 30 siswa. Tabel 3 Paired Samples Test \_\_Paired Differences\_t\_df\_Sig. (2-tailed) \_\_Mean\_Std. Deviation\_Std.

Error Mean\_95% Confidence Interval of the Difference \_\_\_\_\_Lower\_Upper \_\_\_\_\_  
\_Pair 1\_FRE-TEST - POST-TEST\_-16,66667\_10,28334\_1,87747\_-20,50653\_-12,82680  
\_-8,877\_29\_0,000 \_\_ Pada tabel 3 ini terlihat bahwa hasil penghitungan Paired Samples Test menggunakan spss26 menunjukkan rata-rata fre-test dan post-test yaitu -16,66 dengan standar deviasi 10,28 dan standar error rata-rata sebanyak 1,87. Batas bawah terdapat pada -20,50 dan batas atas pada -12,82 dengan nilai  $t = -8.77$  dan derajat kebebasan sebanyak 29 dan hasil uji signifikansi  $0,000 < 0,05$ , menunjukkan bahwa ada beda rata-rata yang signifikan antara sebelum pembelajaran dengan sesudah pembelajaran.

Hasil SPSS Uji T Paired Sampel Test Siswa MAN Ruang 2 PPKn Tabel 1 Paired Samples Statistics \_\_Mean\_N\_Std. Deviation\_Std. Error Mean \_\_Pair 1\_FRE-TEST\_30,7143\_14\_12,06666\_3,22495 \_\_POST-TEST\_42,1429\_14\_18,47184\_4,93681 \_\_ Pada tabel 1, dapat di lihat bahwa nilai rata-rata pada Paired Samples Statistics jelas terlihat sangat berbeda, yaitu 30,71 pada fre-test, sedangkan 42,14 pada post-test, dengan jumlah seluruh data (N) masing-masing ada 14 data dan standar deviasi 12,06 pada fre-test dan 18,47 pada post-test, dan standar error data sebanyak 3,22 pada fre-test dan 4,93 pada post-test.

Table 2 Paired Samples Correlations \_\_N\_Correlation\_Sig. \_\_Pair 1\_FRE-TEST & POST-TEST\_14\_0,372\_0,190 \_\_ Pada tabel 2 ini menunjukkan bahwa data Paired Samples Correlations fre-test dengan data post-test memiliki korelasi sebanyak 0,372 dengan signifikansi 0,190 dengan jumlah data ada 14 siswa Tabel 3 Paired Samples Test \_\_Paired Differences\_t\_df\_Sig. (2-tailed) \_\_Mean\_Std. Deviation\_Std.

Error Mean\_95% Confidence Interval of the Difference \_\_\_\_\_Lower\_Upper \_\_\_\_\_  
\_Pair 1\_PRE-TEST - POST-TEST\_-11,42857\_17,91310\_4,78748\_-21,77129\_-1,08586  
\_-2,387\_13\_0,033 \_\_ Pada tabel 3 ini terlihat bahwa hasil penghitungan Paired Samples Test menggunakan spss26 menunjukkan rata-rata fre-test dan post-test yaitu -11,42 dengan standar deviasi 17,91 dan standar error rata-rata sebanyak 4,78. Batas bawah



terdapat pada -21,77 dan batas atas pada -1,085 dengan nilai  $t = -2.38$  dan derajat kebebasan sebanyak 14 dan hasil uji signifikansi  $0,033 < 0,05$ , menunjukkan bahwa ada beda rata-rata yang signifikan antara sebelum pembelajaran dengan sesudah pembelajaran.

Hasil SPSS Uji T Paired Sampel Test Siswa SMK Ruang 1 PPKn Tabel 1 Paired Samples Statistics \_\_ Mean \_N \_Std. Deviation \_Std. Error Mean \_\_ Pair 1 \_FRE-TEST \_44,1935 \_31 \_8,47514 \_1,52218 \_\_ POST-TEST \_52,5806 \_31 \_8,93224 \_1,60428 \_\_ Pada tabel 1, dapat di lihat bahwa nilai rata-rata pada Paired Samples Statistics jelas terlihat sangat berbeda, yaitu 44,19 pada fre-tes, sedangkan 52,58 pada post-test, dengan jumlah seluruh data (N) masing-masing ada 31 data dan standar deviasi 8,47 pada fre-test dan 8,93 pada post-test, dan standar error data sebanyak 1.52 pada fre-test dan 1,60 pada post-test.

Tabel 2 Paired Samples Correlations \_\_ \_N \_Correlation \_Sig. \_\_ Pair 1 \_FRE-TEST & POST-TEST \_31 \_205 \_270 \_\_ Pada tabel 2 ini menunjukkan bahwa data Paired Samples Correlations fre-test dengan data post-test memiliki korelasi sebanyak 0,205 dengan signifikansi 0,270 dengan jumlah data ada 31 siswa Tabel 3 Paired Samples Test \_\_ \_Paired Differences \_t \_Df \_Sig. (2-tailed) \_\_ \_Mean \_Std. Deviation \_Std.

Error Mean \_95% Confidence Interval of the Difference \_\_\_\_\_ Lower Upper \_\_\_\_\_  
\_Pair 1 \_FRE-TEST - POST-TEST \_-8,38710 \_10,98386 \_1,97276 \_-12,41601 \_-4,35818  
\_-4,251 \_30 \_000 \_\_ Pada tabel 3 ini terlihat bahwa hasil penghitungan Paired Samples Test menggunakan spss26 menunjukkan rata-rata fre-test dan post-test yaitu -8.38 dengan standar deviasi 10,98 dan standar error rata-rata sebanyak 1,97. Batas bawah terdapat pada -12,41 dan batas atas pada -4,35 dengan nilai  $t = -4,25$  dan derajat kebebasan sebanyak 30 dan hasil uji signifikansi  $0,000 < 0,05$ , menunjukkan bahwa ada beda rata-rata yang signifikan antara sebelum pembelajaran dengan sesudah pembelajaran. Hasil SPSS Uji T Paired Sampel Test Untuk Rata-Rata Tiap Kelas PPKn Pada bagian ini peneliti menguji nilai rata rata pre test dengan post test menggunakan SPSS 26 Tabel 1 Paired Samples Statistics \_\_ \_Mean \_N \_Std. Deviation \_Std.

Error Mean \_\_ Pair 1 \_RATA PRE-TEST \_52,1400 \_5 \_15,55714 \_6,95736 \_\_ \_RATA  
POST-TEST \_65,2780 \_5 \_18,33682 \_8,20048 \_\_ Pada tabel 1, dapat di lihat bahwa nilai rata-rata antara PRE test dengan post tes pada table Paired Samples Statistics di atas jelas terlihat sangat berbeda, yaitu 52,14 pada fre-tes, sedangkan pada post-test 65,27, dengan jumlah seluruh data (N) masing-masing ada 5 kelas atau ruang, data dan standar deviasi 15,55 pada fre-test dan 18,33 pada post-test, dan standar error data sebanyak 6,95 pada fre-test dan 8,20 pada post-test. Tabel 2 Paired Samples Correlations \_\_ \_N \_Correlation \_Sig.

\_\_Pair 1 \_RATA FRE-TEST & RATA POST-TEST \_5 \_994 \_001 \_\_ Pada tabel 2 ini menunjukkan bahwa data Paired Samples Correlations fre-test dengan data post-test memiliki korelasi sebanyak 0,994 dengan signifikansi 0,001 dengan jumlah data ada 5 ruang atau kelas. Tabel 3 Paired Samples Test \_\_ Paired Differences \_t \_df \_Sig. (2-tailed) \_\_ Mean \_Std. Deviation \_Std. Error Mean \_95% Confidence Interval of the Difference \_\_\_\_\_ Lower Upper \_\_\_\_\_ Pair 1 \_RATA PRE TEST RATA POST-TEST \_-13,13800 \_3,36845 \_1,50642 \_-17,32049 \_-8,95551 \_-8,721 \_4 \_001 \_\_ Pada tabel 3 ini terlihat bahwa hasil penghitungan nilai rata-rata Paired Samples Test menggunakan spss26 menunjukkan nilai rata-rata fre-test dan post-test yaitu -13,13 dengan standar deviasi 3,36 dan standar eror rata-rata sebanyak 1,50.

Batas bawah terdapat pada -17,32 dan batas atas pada -8,95 dengan nilai  $t = -8,72$  dan derajat kebebasan sebanyak 4 kelas dan hasil uji signifikansi  $0,001 < 0,05$ , menunjukkan bahwa ada beda rata-rata yang signifikan antara sebelum pembelajaran dengan sesudah pembelajaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil antara pre test dengan posttest signifikan. Kesimpulan dan Rekomendasi Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebagian sekolah sebelum perjanjian perdamaian telah melaksanakan pendidikan damai secara khusus, dengan materi Buku Kurikulum Pendidikan Damai dan Akidah Akhlak dalam Perspektif Pendidikan Damai.

Namun pasca konflik model pendidikan damai yang dilaksanakan di sekolah menengah atas di Aceh Timur dapat dikategorikan kepada model pendidikan damai integratif — materi pendidikan damai diintegrasikan ke dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan PPKn, dan materi pendidikan damai yang diajarkan bersumber dari buku ajar Agama dan PPKn. Namun sebagian guru agama di beberapa sekolah sumber materinya juga diambil dari buku kurikulum Akidah Akhlak dalam Perspektif Pendidikan Damai. Selain itu, pendidikan perdamaian juga telah diajarkan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler.

Namun demikian, mayoritas guru menilai integrasi pendidikan perdamaian ke dalam pendidikan agama dan PPKn adalah salah satu langkah yang tepat untuk penguatan perdamaian melalui institusi pendidikan di Aceh, dan Pendidikan perdamaian dinilai memainkan peranan penting dalam melestarikan perjanjian perdamaian. Akan tetapi lebih baik lagi jika pendidikan perdamaian dapat diajarkan dalam mata pelajaran khusus. Oleh sebab itu, walaupun Pemerintah Aceh sampai saat ini belum mengembangkan konsep baku mengenai pendidikan perdamaian yang akan dilaksanakan oleh pihak sekolah di seluruh Provinsi Aceh, tetapi para guru telah mengambil perannya dalam melaksanakan pendidikan damai di Sekolah melalui sebagian materi pelajaran inti. Hasil model pengajaran pendidikan perdamaian secara

integrative dengan perlakuan khusus menunjukkan adanya perubahan pemahaman siswa tentang pendidikan perdamaian secara signifikan.

Pemerintah Aceh saat ini lebih fokus pada pendidikan Islami, dengan berupaya memasukkan Bahasa Arab, Aqidah Akhlak, Fiqih dan Alquran Hadist pada sekolah-sekolah umum melalui kurikulum. Untuk itu, diharapkan untuk mempertimbangkan menggunakan Buku Akidah Akhlak dalam Konteks Pendidikan Damai sebagai salah satu rujukan dalam mengembangkan kurikulum Islami, karena buku ini telah mendapat apresiasi dari para pejabat pemerintah Aceh sebelumnya yang bertanggungjawab terhadap pendidikan di Aceh. Selain itu, diharapkan kepada Pemerintah Aceh untuk menjadikan Buku Ajar Aqidah Akhlak dalam Konteks Pendidikan Damai sebagai referensi wajib bagi guru-guru Agama dalam mengajarkan Aqidah Akhlak di sekolah.

Lebih baik lagi adalah Pemerintah Aceh dapat menjadikan materi Pendidikan Damai Integratif yang difasilitasi UNICEF sebagai bagian dari struktur kurikulum pendidikan di Aceh.

#### INTERNET SOURCES:

- 
- <1% - <https://thabaart.blogspot.com/2017/12/pembelajaran-multiliterasi.html>
  - <1% - [https://geoenviron.blogspot.com/2013/04/masyarakat-multicultural-dan\\_1110.html](https://geoenviron.blogspot.com/2013/04/masyarakat-multicultural-dan_1110.html)
  - <1% - <https://www.perpusnas.go.id/directory.php?lang=id&id=Hari%20Penting>
  - <1% - <https://hanisitnurjanah.blogspot.com/2015/02/konflik-politik.html>
  - <1% - [https://www.researchgate.net/publication/324594910\\_GENDER\\_DAN\\_POLITIK\\_Keterwakilan\\_Perempuan\\_Dalam\\_Politik](https://www.researchgate.net/publication/324594910_GENDER_DAN_POLITIK_Keterwakilan_Perempuan_Dalam_Politik)
  - <1% - <https://danielpinem.wordpress.com/pemikiran-indonesia-juli-2007-2/>
  - <1% - <https://dodinotesaja.blogspot.com/2013/06/>
  - <1% - <https://smpnegeri1cipongkor.blogspot.com/2016/10/kurikulum-smp-negeri-1-cipongkor-tahun.html>
  - <1% - <https://izzaucon.blogspot.com/2014/06/pendidikan-berbasis-keunggulan-lokal.html>
  - <1% - [https://issuu.com/e-rakyataceh/docs/29\\_agustus\\_2017](https://issuu.com/e-rakyataceh/docs/29_agustus_2017)
  - <1% - <https://towarani1407.blogspot.com/2012/06/upaya-meningkatkan-wasbang-generasi.html>
  - <1% - <https://infopendidikansite.wordpress.com/tag/pendidikan/>

<1% - <http://jurnalwacana.psikologi.fk.uns.ac.id/index.php/wacana/article/view/56/56>  
<1% - <https://www.dosenpendidikan.co.id/dukungan-sosial/>  
<1% - <https://catatanhidupridhallahalaik94.blogspot.com/2019/>  
<1% -  
[https://mafiadoc.com/etika-profesi-public-relations\\_598f21ed1723ddd269e54a8f.html](https://mafiadoc.com/etika-profesi-public-relations_598f21ed1723ddd269e54a8f.html)  
<1% - [https://issuu.com/koranpagiwawasan/docs/wawasan\\_20140415](https://issuu.com/koranpagiwawasan/docs/wawasan_20140415)  
<1% - [https://issuu.com/katahatiaceh.issuu.com/docs/merangkai\\_kata\\_damai\\_lo](https://issuu.com/katahatiaceh.issuu.com/docs/merangkai_kata_damai_lo)  
<1% - <https://www.sabda.org/misi/book/export/html/98>  
1% - <http://repository.unimal.ac.id/1966/1/jurnal%20akreditasi.pdf>  
<1% - <https://letbrain-answer.blogspot.com/feeds/posts/default>  
<1% - <https://arekrantau.wordpress.com/>  
<1% -  
<https://id.scribd.com/doc/313164726/Naskah-Akademik-Tentang-Kuhp-Dengan-Lampiran>  
<1% -  
<https://theramblercameroon.com/opinion/proposal-paper-on-the-short-and-long-term-peace-strategies-anglophone-crisis-ii/>  
<1% -  
[https://www.researchgate.net/publication/248980397\\_Developing\\_agency\\_through\\_peacebuilding\\_in\\_the\\_midst\\_of\\_intractable\\_conflict\\_The\\_case\\_of\\_Israel\\_and\\_Palestine](https://www.researchgate.net/publication/248980397_Developing_agency_through_peacebuilding_in_the_midst_of_intractable_conflict_The_case_of_Israel_and_Palestine)  
<1% -  
<http://baa.unas.ac.id/download/buku%20panduan/Buku-Modul-Kuliah-Kewarganegaraan.pdf>  
<1% - <https://trianawuri.blogspot.com/feeds/posts/default>  
<1% -  
<https://www.deepdyve.com/lp/emerald-publishing/pulse-of-the-planet-leadership-models-in-the-gloval-village-tWshDr2ung>  
<1% - <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2014/uu35-2014bt.pdf>  
<1% -  
<https://www.solider.id/baca/5732-pendidikan-inklusi-jadi-mimpi-kasus-perundungan-terus-menghampiri>  
9% - <https://makaarim.wordpress.com/2012/07/18/memaknai-kekerasan/>  
<1% -  
<https://misterrakib.blogspot.com/2014/01/istri-durhakahantu-kekerasan-isteri.html>  
<1% - <http://kamusbahasaindonesia.org/kekerasan>  
<1% -  
<https://dhinninuraeni.blogspot.com/2012/01/kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>  
<1% -  
<https://www.cram.com/essay/The-Violence-Peace-And-Peace-Research/F3PLCJPLG6EE5>  
<1% - <http://digilib.uinsby.ac.id/7465/5/Bab%202.pdf>

<1% -

<https://warofweekly.blogspot.com/2011/04/serangan-israel-ke-libanon-pelanggaran.html>

<1% - <https://makaarim.wordpress.com/2012/07/page/7/>

<1% - <http://wiscomp.org/pubn/wiscomp-peace-prints/2-1/Lisa%20Schirch.pdf>

<1% - [https://issuu.com/faizalsidik/docs/seni\\_\\_estetik\\_dan\\_sistem\\_seni\\_d-ker](https://issuu.com/faizalsidik/docs/seni__estetik_dan_sistem_seni_d-ker)

<1% - <https://bagawanabiyasa.wordpress.com/author/bagawanabiyasa/page/3/>

<1% -

[http://download.portalgaruda.org/article.php?article=338245&val=5807&title=UPAYA%20TRANSFORMASI%20KONFLIK%20OLEH%20SEARCH%20FOR%20COMMON%20GROUND%20ORGANIZATION%20DALAM%20KONFLIK%20DONGO%20\(2010-2013\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=338245&val=5807&title=UPAYA%20TRANSFORMASI%20KONFLIK%20OLEH%20SEARCH%20FOR%20COMMON%20GROUND%20ORGANIZATION%20DALAM%20KONFLIK%20DONGO%20(2010-2013))

<1% - <https://sitigundar.blogspot.com/2012/03/kesehatan-mental-perkembangan.html>

<1% -

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/3598/Penelitian%20Linguistik17032012.doc?sequence=3>

<1% - <http://pasca.um.ac.id/conferences/index.php/snbk/article/download/228/215>

1% - [http://widhiarso.staff.ugm.ac.id/files/budaya\\_damai\\_anti\\_kekerasan.pdf](http://widhiarso.staff.ugm.ac.id/files/budaya_damai_anti_kekerasan.pdf)

<1% -

<https://indrycanthiq84.wordpress.com/pendidikan/komponen-komponen-pembelajaran-konsep-dasar-peserta-didik-pendidik-tujuan-dan-bahanmateri/>

<1% -

<https://id.123dok.com/document/y8gl46wz-implementasi-pendidikan-humanis-di-smanegeri-6-yogyakarta.html>

<1% -

<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/lain-lain/sigit-dwi-kusrahmadi-drs-msi/PK%20MKU%202008%201.doc>

<1% - <https://terasfakta.blogspot.com/feeds/posts/default>

<1% - [https://issuu.com/waspada/docs/waspada\\_\\_rabu\\_2\\_september\\_2009](https://issuu.com/waspada/docs/waspada__rabu_2_september_2009)

<1% -

<https://gaudensiusberibe.blogspot.com/2010/07/tentang-gam-gerakan-aceh-merdeka.html>

<1% -

<https://id.123dok.com/document/zgwe2gvy-materi-kuliah-umum-repositori-universitas-andalas-1.html>

<1% - <https://masudumar.wordpress.com/category/pkn/>

<1% - <https://id.123dok.com/document/y8gjoorz-modul-teknik-bangunan-1-24.html>

<1% -

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/2210/1/hasil%20penelitian%20integrasi.pdf>

<1% -

<https://belajarberpendidik.blogspot.com/2016/11/dasar-tujuan-fungsi-dan-prinsip.html>

<1% -

<https://puncaksidiangkat.blogspot.com/2011/01/panduan-teknis-pengembangan-kurikulum.html>

<1% -

[https://id.wikisource.org/wiki/Nota\\_Kesepahaman\\_antara\\_Pemerintah\\_RI\\_%26\\_GAM](https://id.wikisource.org/wiki/Nota_Kesepahaman_antara_Pemerintah_RI_%26_GAM)

<1% -

<https://acehdalamsejarah.blogspot.com/2011/07/nota-kesepahaman-antara-pemerintah-ri.html>

<1% - [https://pusham.uui.ac.id/upl/article/id\\_ekosob1ifdal.pdf](https://pusham.uui.ac.id/upl/article/id_ekosob1ifdal.pdf)

<1% -

[https://id.wikisource.org/wiki/Kovenan\\_Internasional\\_tentang\\_Hak\\_Ekonomi,\\_Sosial\\_dan\\_Budaya](https://id.wikisource.org/wiki/Kovenan_Internasional_tentang_Hak_Ekonomi,_Sosial_dan_Budaya)

<1% - <https://humaniora.web.id/psikopedia/artikel/category/psikologi-terapan/>

<1% - <https://ajisetiawanst.blogspot.com/>

<1% - [https://issuu.com/waspada/docs/waspada\\_\\_Kamis\\_21\\_April\\_2011](https://issuu.com/waspada/docs/waspada__Kamis_21_April_2011)

<1% - <https://muhamadqbl.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=updated>

<1% - <https://www.acstf.org/2014/11/34-guru-patani-belajar-pola-pendidikan-aceh/>

<1% -

<https://www.kelaspintar.id/blog/inspirasi/7-mata-pelajaran-sd-di-kurikulum-2013-605/>

<1% - <https://misterjenggo.blogspot.com/2010/02/pendidikan-kewarganegaraan.html>

<1% - [https://issuu.com/media.andalas/docs/epaper\\_kpkpos\\_385\\_edisi\\_senin\\_28\\_de](https://issuu.com/media.andalas/docs/epaper_kpkpos_385_edisi_senin_28_de)

<1% - <https://threexie.blogspot.com/2015/>

<1% - <https://www.portaledukasi.org/berkas/adm/guru/PPKN.pdf>

<1% -

<https://winkhamaisya.blogspot.com/2012/09/menciptakan-lingkungan-belajar-yang.html>

|

<1% - <https://busmaniar29.wordpress.com/2012/03/>

<1% -

[https://mafiadoc.com/1-pelaksanaan-pendidikan-agama-islam-program-digilib\\_5a30b7231723dd7260eca736.html](https://mafiadoc.com/1-pelaksanaan-pendidikan-agama-islam-program-digilib_5a30b7231723dd7260eca736.html)

<1% -

<https://www.linkedin.com/pulse/life-skills-soft-makes-you-better-vivekanand-nalla-lion-2500->

<1% -

<https://pdfs.semanticscholar.org/5e56/00624aa80abd5c78997cb1cbaa40f50c0638.pdf>

<1% -

<https://wahyumiftahulhuda.blogspot.com/2014/04/interaksi-manusia-dan-komputer.html>

<1% -

<https://konsruksialatukur.blogspot.com/2015/08/konstruksi-alat-ukur-interaksi-sosial.ht>

ml

1% -

<https://kumpulanilmukesahatan.blogspot.com/2015/05/pengertian-interaksi-dan-interaksi.html>

<1% -

<https://jurusankomunikasi.blogspot.com/2009/04/proses-sosial-dan-interaksi-sosial.html>

<1% - <https://fahrulrizaltinjowan.wordpress.com/page/2/>

<1% - <https://pakdosen.co.id/disosiatif-adalah/>

<1% - <https://cherlimedika.blogspot.com/2014/03/>

1% - <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/faktor-yang-mempengaruhi-interaksi-sosial>

<1% - <https://brainly.co.id/tugas/23087200>

<1% - <https://id.scribd.com/doc/60828736/3SILABUSSMPIPS>

<1% -

<https://adiprasetya156.blogspot.com/2014/09/makalah-faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>

<1% - <https://maliassyah.blogspot.com/2011/>

<1% -

<https://multilateraleducation.blogspot.com/2016/02/skripsi-ppkn-persepsi-siswa-terhadap.html>

<1% - <https://rantaiguru.blogspot.com/feeds/posts/default>

<1% -

<https://neyshaafahza.blogspot.com/2015/06/kesulitan-belajar-faktor-dan-cara.html>

<1% -

[https://mafiadoc.com/peningkatan-minat-dan-prestasi-belajar-siswa-terhadap-mata\\_5a20fe8f1723dd9bb568b824.html](https://mafiadoc.com/peningkatan-minat-dan-prestasi-belajar-siswa-terhadap-mata_5a20fe8f1723dd9bb568b824.html)

<1% -

<https://variayaka.wordpress.com/2016/07/30/peran-guru-dalam-pendidikan-multikultural/>

<1% -

<https://wirasojiro.blogspot.com/2014/03/karya-tulis-ilmiah-lengkap-meningkatkan.html>

<1% - [http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file\\_artikel/2019/14.1.01.01.0017.pdf](http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2019/14.1.01.01.0017.pdf)

<1% - <https://downloadjurnal.blogspot.com/feeds/posts/default>

<1% - <https://www.scribd.com/document/384802788/Buku-Siswa-Kelas-11-PPKn-rtf>

<1% - <https://diy.kemenag.go.id/berita.html?page=23>

<1% -

<https://bayugatra12.blogspot.com/2014/12/cerpen-amir-dan-merah-putih-di.html>

<1% -

<https://tutipujilestari25.blogspot.com/2017/04/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>

ml



<1% - <https://mz-pendidikan.blogspot.com/2010/09/teori-pendidikan.html>  
<1% - [https://issuu.com/representasiefektif/docs/pendidikan\\_yang\\_memerdekakan](https://issuu.com/representasiefektif/docs/pendidikan_yang_memerdekakan)  
<1% - <https://sichesse.blogspot.com/2012/04/review-teori-george-c-homan-teori.html>  
<1% - <https://ferrystoner.blogspot.com/2013/03/makalah-interaksi-sosial.html>  
<1% - <https://acehsatu.com/efek-konflik-terhadap-dunia-pendidikan/>  
<1% - <https://bared18.wordpress.com/2008/08/12/penelitian-tentang-kekerasan-anak/>  
<1% -  
<https://gbtbkfamily.blogspot.com/2012/10/studi-kasus-pelanggaran-kode-etik.html>  
<1% -  
<https://blog.igi.or.id/keteladanan-membangun-karakter-antikekerasan-dalam-dunia-pendidikan.html>  
<1% - <https://ayundandaomy.blogspot.com/2013/>  
<1% -  
<https://batumartaclicker.blogspot.com/2017/05/makalah-bullying-di-kalangan-pelajar.html>  
<1% - <https://pt.scribd.com/document/85781081/Bullying-Dalam-Pendidikan>  
<1% -  
<https://rimatsu.blogspot.com/2012/03/dampak-bullying-bagi-kesehatan-mental.html>  
<1% -  
[http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_PEND.\\_LUAR\\_BIASA/195707121984032-EHAN/BULLYING\\_DALAM\\_PENDIDIKAN.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195707121984032-EHAN/BULLYING_DALAM_PENDIDIKAN.pdf)  
<1% - [https://issuu.com/inilahkoran2/docs/25\\_jul\\_2015](https://issuu.com/inilahkoran2/docs/25_jul_2015)  
<1% - [https://issuu.com/harianberitametro/docs/combine\\_01a4734217db9a](https://issuu.com/harianberitametro/docs/combine_01a4734217db9a)  
<1% -  
<https://mrrakib.files.wordpress.com/2011/09/proposal-s3-hukum-islam-yg-baru.docx>  
<1% -  
<https://wisma5atas11.blogspot.com/2016/12/makalah-mencegah-terjadinya-kekerasan.html>  
<1% - <https://nibung-paloh.blogspot.com/2012/03/religious-peacebuilding.html>  
<1% - <https://filsatpendidikan.blogspot.com/>  
<1% - <https://khuzainullah.blogspot.com/2014/09/bab-i-pendahuluan-a.html>  
<1% -  
[http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=56149](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=56149)  
<1% -  
<https://votreesprit.wordpress.com/2011/07/11/pendidikan-pancasila-freemasonry-dan-pergolakan-umat-islam-rancunya-pelajaran-ppkn/>  
<1% -  
<https://id.scribd.com/doc/231396668/Silabus-Pelatihan-PAI-SMA-SMK-Kurikulum-2013>  
<1% -

<https://www.jamarismelayu.com/2014/09/pembelajaran-tematik-terpadu-tingkat.html>  
<1% -  
<https://informasi2-pendidikan.blogspot.com/2011/05/pkn-konsep-belajar-pkn-sd.html>  
<1% - <https://core.ac.uk/download/pdf/11062571.pdf>  
<1% -  
<https://www.anekapendidikan.com/2018/12/rangkuman-pembelajaran-ips-sd-smp-sma-perguruan-tinggi-lengkap.html>  
<1% -  
<https://muhammadazzikra15.blogspot.com/2016/10/metode-pembelajaran-pkn-berpengaruh.html>  
<1% -  
<https://lppse-dikdas.blogspot.com/2011/11/peran-guru-dalam-pendidikan-karakter.html>  
<1% -  
<https://rinarahmatika55.blogspot.com/2015/11/menciptakan-pembelajaran-yang-efektif.html>  
<1% -  
<https://www.kompasiana.com/rahmad10rudianto/54f8e9e6a33311ea168b4a93/implementasi-metode-pembelajaran-every-one-is-a-teacher-here-untuk-meningkatkan-critical-thinking-siswa-kelas-vi-pokok-materi-konduktor-dan-isolator-di-sdn-triwung-lor-2>  
<1% - <https://yunjumiati.wordpress.com/author/jumiati04/>  
<1% -  
<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Sekar%20Purbarini%20Kawuryan,%20S.IP.,%20M.Pd./mengajarkan%20perdamaian%20pada%20anak.doc>  
<1% - <http://kontakbpp.mystrikingly.com/>  
<1% - <https://core.ac.uk/download/pdf/141856311.pdf>  
<1% -  
<https://d-pendidikan.blogspot.com/2014/11/makalah-sbm-metode-dan-pendekatan-dalam.html>  
1% - <http://digilib.uinsby.ac.id/20507/8/Bab%205.pdf>  
<1% - <http://digilib.uinsby.ac.id/20507/4/Bab%201.pdf>  
<1% - <https://bagenin.wordpress.com/2015/11/page/3/>  
<1% - <https://hadziqmusthav.blogspot.com/>  
<1% - <https://id.123dok.com/document/q05dwjvy-post-70.html>  
<1% - <http://repository.uinsu.ac.id/2061/1/Tesis%20Fariz.pdf>  
<1% -  
<https://lingkungansekitarsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2011/05/lingkungan-sekitar-sebagai-sumber.html>  
<1% -  
[https://mafiadoc.com/buku-modul-kuliah-pendidikan-kewarganegaraan-baa-unas\\_59ce](https://mafiadoc.com/buku-modul-kuliah-pendidikan-kewarganegaraan-baa-unas_59ce)

1e3f1723dd6ec1008e71.html

<1% -

[https://mafiadoc.com/download-full-stkip-siliwangi-bandung\\_5a1a45711723dde22f22842e.html](https://mafiadoc.com/download-full-stkip-siliwangi-bandung_5a1a45711723dde22f22842e.html)

<1% -

[https://mafiadoc.com/2-pai-smp-kurikulum-2013-media-pendidikan-islam-di-sekolah\\_5a10bed61723dd146b117541.html](https://mafiadoc.com/2-pai-smp-kurikulum-2013-media-pendidikan-islam-di-sekolah_5a10bed61723dd146b117541.html)

<1% -

<https://id.123dok.com/document/y4xw5p9z-analisis-pengaruh-persepsi-masyarakat-citra-perusahaan-dan-pendapatan-terhadap-keputusan-menabung-di-bank-syariah-studi-kasus-pada-bank-bri-syariah-kantor-cabang-semarang.html>

<1% -

[https://mafiadoc.com/pengaruh-model-pembelajaran-cooperative-learning-\\_5a2f3b891723dd6edf1a10f8.html](https://mafiadoc.com/pengaruh-model-pembelajaran-cooperative-learning-_5a2f3b891723dd6edf1a10f8.html)

<1% -

<https://yudhawirakembaren.blogspot.com/2011/01/laporan-praktikum-statistik.html>

<1% - [https://issuu.com/bimkes/docs/bimiki\\_vol\\_1\\_no1](https://issuu.com/bimkes/docs/bimiki_vol_1_no1)

<1% - <http://www.ijceit.org/published/volume10/issue3/1Vol11No3.pdf>

<1% -

<https://zombiedoc.com/jurnal-keperawatand136715d7df9f0579ea40a4b7fa0afe336911.html>

<1% -

<https://www.belajarilmu.blogspot.com/2013/04/upaya-meningkatkan-motivasi-dan-hasil.html>

<1% -

[https://mafiadoc.com/silahkan-download-disini\\_59c12dc31723dde21069fc3c.html](https://mafiadoc.com/silahkan-download-disini_59c12dc31723dde21069fc3c.html)

<1% - <https://www.statistikian.com/2012/07/uji-t-paired-dengan-spss.html>

<1% - <http://digilib.uinsby.ac.id/9680/3/bab%204.pdf>

<1% - <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1429/1/SKRIPSI%20AL-HUJURAT.pdf>